



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 88 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL  
BOROBUDUR-YOGYAKARTA-PRAMBANAN TAHUN 2024 - 2044**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan mempunyai peran yang strategis dalam pengembangan pariwisata nasional;
  - b. bahwa untuk mempercepat pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan perlu dilakukan perencanaan secara terpadu dan menyeluruh terhadap aspek kepariwisataan, cagar budaya, infrastruktur, kehutanan, kemaritiman, tata ruang, investasi, lingkungan, sosial budaya, dan pengembangan wilayah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan Tahun 2024 - 2044;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL BOROBUDUR-YOGYAKARTA-PRAMBANAN TAHUN 2024 - 2044.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
2. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
3. Destinasi Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah destinasi Pariwisata yang berskala nasional.
4. DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan adalah DPN yang meliputi kawasan strategis Pariwisata nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.
5. Rencana Induk DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan yang selanjutnya disebut RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan adalah dokumen perencanaan pengembangan Kepariwisata terpadu di DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan tahun 2024 - 2044.
6. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, badan pengelola, badan usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

- (1) RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan dalam menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Kepariwisata secara terpadu di DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.
- (2) Pemerintah daerah pada DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. Pemerintah Kabupaten Klaten;
  - d. Pemerintah Kabupaten Magelang;
  - e. Pemerintah Kabupaten Sleman;
  - f. Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
  - g. Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 3

- (1) RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
  - a. visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup;
  - b. sasaran dan arah pengembangan;
  - c. pelaksanaan pengembangan; dan
  - d. rencana aksi.
- (2) RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata;
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata; dan
- g. pengelolaan DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 5

- (1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d disusun untuk 5 (lima) tahap dalam periode tahun 2024 - 2044 meliputi:
  - a. tahap pertama tahun 2024;
  - b. tahap kedua tahun 2025 - 2029;
  - c. tahap ketiga tahun 2030 - 2034;
  - d. tahap keempat tahun 2035 - 2039; dan
  - e. tahap kelima tahun 2040 - 2044.
- (2) Rencana aksi tahap pertama tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Rencana aksi masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Presiden berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional, hasil evaluasi tahunan, dan peninjauan kembali pada akhir tahap.

Pasal 6

- (1) RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan dijabarkan dalam bentuk:
  - a. rencana kerja kementerian/lembaga; dan
  - b. rencana kerja pemerintah daerah pada DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.
- (2) Pemerintah daerah pada DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan harus melaksanakan RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan harus memelihara dan menjaga fungsi sarana prasarana fisik yang dibangun sesuai dengan RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola di Kompleks Candi Borobudur sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengelolaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Pengelolaan DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola di Kompleks Candi Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kawasan lindung dan daya dukung atau daya tampung kawasan wisata.
- (3) Pengelolaan DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola di Kompleks Candi Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan kelembagaan dan regulasi;
  - b. pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
  - c. pengembangan daya dukung ekosistem objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
  - d. pelestarian aset alam, rencana pengelolaan lingkungan, dan penanggulangan bencana; dan
  - e. tata kelola sosial budaya.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola di Kompleks Candi Borobudur dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 8**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIPDN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(3) Evaluasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Bupati/wali kota pada DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan melaporkan pelaksanaan RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan menteri/pimpinan lembaga terkait melaporkan pelaksanaan RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Menteri melaporkan pelaksanaan RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisata berdasarkan hasil laporan Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaporan pelaksanaan RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 10

- (1) RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan ditinjau setiap 5 (lima) tahun pada akhir tahap berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Peninjauan kembali RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada akhir tahap pertama.
- (3) Peninjauan kembali RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisata.

Pasal 11

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2024  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2024  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRAKTINO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 179**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



**Silvanna Djaman**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA  
NASIONAL BOROBUDUR-YOGYAKARTA-  
PRAMBANAN TAHUN 2024 - 2044

**RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL  
BOROBUDUR-YOGYAKARTA-PRAMBANAN TAHUN 2024 - 2044**

**BAB I**

**VISI, MISI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

**A. Latar Belakang**

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini memberikan perhatian dan harapan besar terhadap sektor Pariwisata sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan dapat menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar berupa devisa dan pembukaan lapangan kerja. Untuk mewujudkan sasaran pengembangan Pariwisata tersebut, pemerintah pusat mencanangkan program pengembangan 10 (sepuluh) destinasi Pariwisata prioritas, termasuk DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (BYP). Pembangunan DPN BYP akan dilakukan melalui penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial. Pengembangan DPN BYP diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan mendorong perkembangan destinasi Pariwisata di wilayah sekitarnya sehingga memberi peluang pendapatan dan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Respon terhadap potensi Pariwisata di DPN BYP ditunjukkan oleh perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara ke DPN BYP yang terus meningkat hingga mencapai 447.790 (empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh) wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Pangsa pasar wisatawan mancanegara terbesar berasal dari Malaysia, Singapura, Jepang, dan Belanda. Perkembangan kunjungan wisatawan nusantara ke DPN BYP juga terus meningkat hingga mencapai 13.363.680 (tiga belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh) wisatawan nusantara pada tahun 2019. Perkembangan Pariwisata di DPN BYP terus ditata agar dapat melayani permintaan dan minat wisatawan yang semakin terdiversifikasi. Penataannya dipandu melalui satu rencana induk terpadu yang bertumpu pada 3 (tiga) kawasan yang masing-masing mewakili warisan budaya Jawa.

Pertama . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pertama, Kompleks Candi Borobudur tepatnya di Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Mungkid di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan situs warisan dunia *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dan beberapa candi serta desa-desa budaya di sekitarnya. Kedua, Kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO dan Situs Ratu Boko di Kecamatan Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Kecamatan Prambanan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga, yaitu Kota Yogyakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa dimana modalitas warisan budaya dan sejarah menyatu dengan kreativitas masyarakat yang dapat dikembangkan untuk menawarkan ragam atraksi.

Penataan dilakukan berdasarkan RIDPN BYP yang secara khusus diarahkan pada penanganan terhadap isu-isu utama dalam pengembangan DPN BYP antara lain kepadatan penduduk, konektivitas yang kurang memadai, layanan dasar yang kurang layak, dan manajemen destinasi yang masih perlu untuk ditingkatkan, khususnya manajemen situs cagar budaya. RIDPN BYP diharapkan dapat mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pengembangan Pariwisata di DPN BYP, antara lain:

1. keterbatasan produk Pariwisata yang ditawarkan;
2. ketergantungan yang tinggi pada Pariwisata budaya;
3. kepadatan wisatawan (*overtourism*) di Candi Borobudur;
4. rendahnya apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai warisan budaya;
5. kawasan terbangun di sekitar kompleks candi didominasi oleh lahan dengan status hak milik;
6. belum terpenuhinya standar internasional dalam aspek Daya Tarik Wisata (DTW) dan interpretasi;
7. akses transportasi yang belum memadai;
8. infrastruktur layanan dasar yang belum memadai;
9. penurunan kondisi lingkungan, termasuk polusi udara dan penurunan ketersediaan air tanah akibat penggundulan lahan dan penebangan pohon di lereng Perbukitan Menoreh yang kritis rawan longsor;
10. belum optimalnya upaya resiliensi bencana dan perubahan iklim;
11. rendahnya kapasitas masyarakat lokal;
12. kerangka kerja dan penegakan hukum yang lemah; dan
13. koordinasi dan perencanaan yang belum memadai.

Penanganan isu-isu tersebut dilaksanakan dengan melibatkan keterpaduan dan kolaborasi lintas Pemangku Kepentingan, serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan mempertimbangkan aspek Kepariwisata, cagar budaya, infrastruktur, kehutanan, kemaritiman, tata ruang, investasi, lingkungan, sosial budaya, serta pengembangan wilayah secara regional Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar). Hasilnya diharapkan dapat mendukung perbaikan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pembangunan infrastruktur, pemanfaatan kemajuan teknologi untuk meningkatkan pelayanan dasar dan

peluang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

peluang usaha, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha bidang Pariwisata, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan keberlanjutan lingkungan.

Penyusunan RIDPN BYP telah mempertimbangkan segi kesehatan, saat ini destinasi Pariwisata memasuki tahapan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Untuk meningkatkan standar Pariwisata berkelanjutan dalam konteks kesehatan telah ditetapkan standar pelayanan Pariwisata berbasis kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, serta ditetapkan menjadi SNI CHSE 9042:2021. Penetapan standar ini sesuai dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan dan investor.

Hasil pemetaan dan analisis terhadap isu utama dalam pengembangan DPN BYP dituangkan dalam RIDPN BYP yang terdiri atas:

1. visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup;
2. sasaran dan arah pengembangan;
3. pelaksanaan pengembangan; dan
4. rencana aksi.

**B. Visi**

Visi pengembangan Pariwisata di DPN BYP secara terpadu pada tahun 2024 - 2044 yaitu *“Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagai destinasi Pariwisata berkelanjutan dan berkelas dunia berbasis pelestarian kearifan budaya Jawa.”*

Visi ini dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan Pariwisata di DPN BYP yang mampu merespons ragam minat wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dengan memperhatikan aspek pelestarian warisan budaya yang ada dan penerapan Pariwisata berkelanjutan. Makna yang terkandung dalam visi dijelaskan sebagai berikut:

1. destinasi Pariwisata berkelanjutan: menunjukkan komitmen untuk menjadikan Pariwisata sebagai hasil dari pengelolaan aset alam, budaya, dan buatan yang dilakukan dengan benar sehingga mendukung perbaikan kualitas lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar, baik di DPN BYP maupun destinasi Pariwisata secara regional Joglosemar;
2. berkelas dunia: menunjukkan komitmen untuk mengembangkan DTW yang unik dan atraktif, melengkapi warisan budaya kelas dunia yang ada, mampu beradaptasi dengan tren Pariwisata yang terus berubah, serta mampu mengurangi risiko bencana, perubahan iklim, dan dampak lingkungan; dan
3. pelestarian kearifan budaya Jawa: menunjukkan komitmen untuk melestarikan budaya Jawa dalam rangka mencapai nilai-nilai luhur kehidupan manusia. Budaya Jawa yang dimaksud tidak hanya yang berada di segitiga BYP tetapi tersebar pada skala yang lebih luas yaitu wilayah Joglosemar.

Gambar 1 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -



Gambar 1. Citra Destinasi Pariwisata Joglosemar

Visi pengembangan DPN BYP dibangun selaras dengan citra Destinasi Pariwisata Joglosemar. Citra *Java Cultural Wonders* mencerminkan harapan untuk menyatukan seluruh potensi wisata yang ada di kawasan Joglosemar. “*Cultural Wonders*” sendiri menunjukkan wisata utama yang berbasis DTW budaya yaitu Candi Borobudur yang merupakan bagian dari DPN BYP. Ragam warna yang dipilih mencerminkan tingkat kehidupan manusia yang merupakan bagian dari Joglosemar yang beragam dan selaras dengan skema citra “*Wonderful Indonesia*” dan “*Pesona Indonesia*”.

Makna dari warna logo DPN BYP yaitu:

1. biru: universalitas, kedamaian, dan konsistensi;
2. hijau: kreativitas, ramah lingkungan, dan keselarasan;
3. jingga: inovasi, hasrat perubahan, dan keterbukaan;
4. ungu: daya imajinasi, iman, dan kesatuan jiwa raga; dan
5. magenta: keseimbangan, kepekaan, dan pemikiran praktis.

### C. Misi

Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pengembangan DPN BYP sebagai berikut:

1. mengembangkan konsep Pariwisata terpadu yang mencakup aspek-aspek sosial ekonomi, spasial, pelestarian budaya, lingkungan, pengelolaan risiko bencana, perubahan iklim, serta tata kelola kelembagaan dan kerangka regulasi yang didukung oleh seluruh Pemangku Kepentingan;
2. memfokuskan pengembangan dengan pola dekonsentrasi secara bertahap dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang hingga tahun 2044, dimulai dari kawasan BYP yang menjadi pengungkit dengan manfaat yang dapat diperluas melalui keterkaitannya secara regional di kawasan segitiga perkotaan Joglosemar;
3. memenuhi kebutuhan pelayanan dan infrastruktur dasar bagi wisatawan serta penduduk lokal pada DPN BYP;

4. mengembangkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

4. mengembangkan berbagai atraksi dan meningkatkan DTW yang berkualitas; dan
5. meningkatkan kapasitas kelembagaan, termasuk kelompok masyarakat di bidang Pariwisata dan pelestarian cagar budaya.

**D. Tujuan**

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, pengembangan Pariwisata di DPN BYP bertujuan untuk:

1. meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan Pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. meningkatkan kualitas infrastruktur aksesibilitas dan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas dan usaha Pariwisata;
3. meningkatkan perekonomian masyarakat lokal yang digerakkan oleh sektor Pariwisata; dan
4. mendorong investasi swasta yang bernilai tambah tinggi.

**E. Ruang Lingkup**

RIDPN BYP mencakup rencana pengembangan DPN BYP dalam periode 21 (dua puluh satu) tahun, yang dilengkapi dengan rencana pengembangan secara terinci untuk 1 (satu) tahun pertama.

RIDPN BYP disusun melalui serangkaian tahapan tentang kondisi dan tantangan pengembangan Pariwisata di DPN BYP yang diselaraskan dengan aspirasi Pemangku Kepentingan, yaitu:

1. analisis kelembagaan, hukum, regulasi, dan kerangka kebijakan baik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sektor Pariwisata di DPN BYP;
2. analisis permintaan dan peluang pengembangan kawasan destinasi Pariwisata;
3. analisis kondisi awal rencana tata ruang, kesenjangan infrastruktur, atraksi, dan fasilitas bagi wisatawan;
4. artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial ekonomi, objek pemajuan kebudayaan, dan cagar budaya, termasuk kesesuaian jenis wisata dengan daya dukung dan daya tampung kawasan wisata;
5. penyiapan visi, proyeksi pertumbuhan, dan beberapa skenario pengembangan;
6. perincian skenario pengembangan terpilih yang menjadi dasar perumusan rencana aksi;
7. penyusunan dokumen RIDPN BYP;
8. pelibatan partisipasi aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam seluruh tahapan; dan
9. ruang lingkup wilayah dan substansi dari RIDPN BYP mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada sebelumnya dan memadukan rencana yang relevan dengan kebutuhan pengembangan Pariwisata di DPN BYP ke depan.

Beberapa . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

Selain peraturan perundang-undangan di atas, juga perlu memperhatikan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

4. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5); dan
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2).

Secara administrasi kewilayahan, ruang lingkup DPN BYP mencakup 2 (dua) kabupaten di Provinsi Jawa Tengah serta 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Pemerintah Kabupaten Klaten;
4. Pemerintah Kabupaten Magelang;
5. Pemerintah Kabupaten Sleman;
6. Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
7. Pemerintah Kota Yogyakarta.

Delineasi DPN BYP mencakup 3 (tiga) KSPN yaitu:

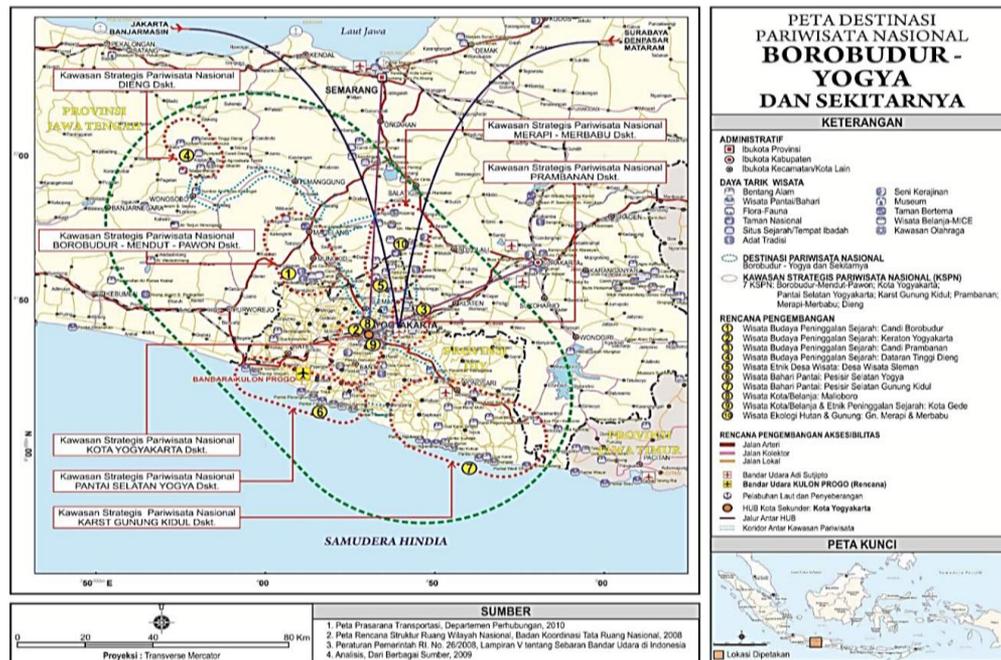
1. KSPN Borobudur dan sekitarnya;
2. KSPN Yogyakarta Kota dan sekitarnya; dan
3. KSPN Prambanan-Kalasan dan sekitarnya.

Gambar 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -



Gambar 2. Peta DPN Borobudur–Yogyakarta dan Sekitarnya

Adapun deliniasi perluasan DPN BYP dalam konteks segitiga perkotaan Joglosemar mencakup KSPN Dieng dan sekitarnya, KSPN Karst Gunung Kidul dan sekitarnya, KSPN Pantai Selatan Yogyakarta dan sekitarnya, KSPN Merapi–Merbabu dan sekitarnya, KSPN Karimunjawa dan sekitarnya, KSPN Sangiran dan sekitarnya, KPPN Solo Kota dan sekitarnya, serta KPPN Wonogiri dan sekitarnya. Secara administratif, deliniasi perluasan ini mencakup Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kota Semarang, Kota Magelang, dan Kota Surakarta.

*Key Tourism Area* (KTA) yang dipilih sebagai fokus pengembangan pada DPN BYP yaitu KTA Borobudur, KTA Yogyakarta, dan KTA Prambanan. Ketiga KTA dipilih karena memiliki potensi yang paling besar sebagai pengungkit bagi pengembangan DPN BYP dan keterkaitan penyebaran manfaatnya secara regional Joglosemar. Penetapan 3 (tiga) KTA ini didasarkan pada Kajian *Market Analysis and Demand Assessments* DPN BYP pada tahun 2017 dan *Baseline Analysis* DPN BYP pada tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan di atas, disepakati 3 (tiga) KTA meliputi wilayah DPN BYP di dalamnya juga dilengkapi dengan Sub KTA. Rincian KTA dan Sub KTA (Tabel 1) sebagai berikut:

Tabel 1 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Tabel 1. KTA dan Sub KTA di DPN BYP

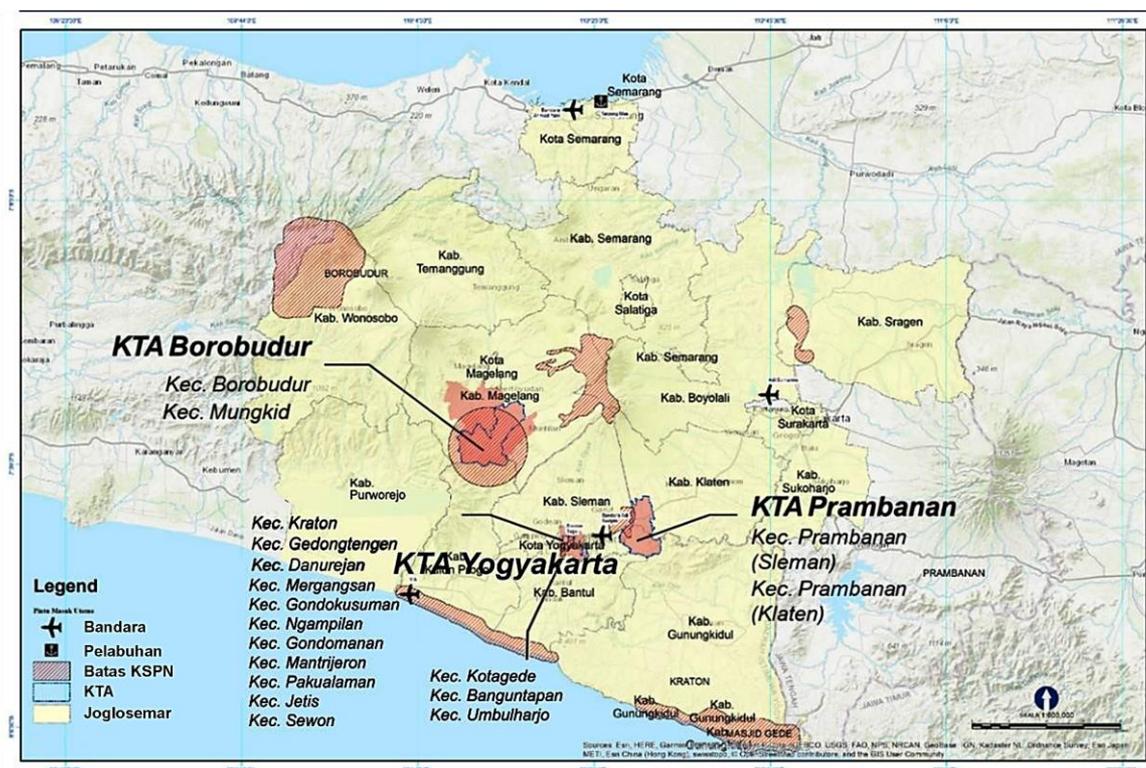
KTA	Sub KTA	Kecamatan	Kabupaten/Kota
Borobudur	Borobudur	Borobudur	Kabupaten Magelang
		Mungkid	Kabupaten Magelang
Yogyakarta	Sumbu Filosofi	Kraton	Kota Yogyakarta
		Gedongtengen	Kota Yogyakarta
		Danurejan	Kota Yogyakarta
		Mergangsan	Kota Yogyakarta
		Gondokusuman	Kota Yogyakarta
		Ngampilan	Kota Yogyakarta
		Gondomanan	Kota Yogyakarta
		Mantrijeron	Kota Yogyakarta
		Pakualaman	Kota Yogyakarta
		Jetis	Kota Yogyakarta
		Sewon	Kabupaten Bantul
	Kotagede	Kotagede	Kota Yogyakarta
		Banguntapan	Kabupaten Bantul
	Gajah Wong Eco District	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
Prambanan	Prambanan	Prambanan	Kabupaten Sleman
		Prambanan	Kabupaten Klaten

Gambar 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -



Gambar 3. Lokasi KTA DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan

Masing-masing KTA memiliki tema pengembangan yang disesuaikan dengan DTW yang dimiliki. Tema pengembangan ketiga KTA di DPN BYP sebagai berikut:

1. KTA Borobudur

Pengembangan KTA Borobudur mengusung tema “Persebaran Atraksi Wisata di Desa Wisata yang Saling Terintegrasi, dengan Berbasis Potensi Alam dan Budaya” dengan tujuan untuk meratakan persebaran wisatawan dan manfaat Pariwisata, agar tidak terpusat pada Candi Borobudur sehingga keberlanjutan daya dukungnya dapat ditingkatkan.

2. KTA Yogyakarta

Pengembangan KTA Yogyakarta mengusung tema “Koridor Pariwisata Budaya yang Terintegrasi dan Berkesinambungan” dengan mengoptimalkan potensi yang ada, serta mendukung kesinambungan daya dukung lingkungan dan sosial.

3. KTA Prambanan

Tema pengembangan KTA Prambanan yaitu “Penguatan Keterkaitan Historis Antara Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Prambanan dan Gunung Merapi” sebagai bagian dari perlindungan bentang pandang antara ketiga situs tersebut.

Ketiga . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Ketiga KTA di DPN BYP memiliki DTW utama berbasis wisata budaya, yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional dan warisan budaya dunia UNESCO, yaitu Kawasan Cagar Budaya Nasional Borobudur, Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Prambanan, Sumbu Filosofi Yogyakarta, serta beberapa tujuan wisata lainnya seperti wisata alam, wisata pedesaan, kampung wisata, wisata minat khusus, *meeting, incentive, convention, and exhibition*, wisata belanja, serta wisata kuliner.

Tabel 2. DTW di DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
Borobudur	Air Terjun Curug Silawe	Alam	Kajoran	Kabupaten Magelang
	Air Terjun Kedung Kayang	Alam	Sawangan	Kabupaten Magelang
	Ketep Pass	Alam	Sawangan	Kabupaten Magelang
	Air Terjun Sekarlangit	Alam	Grabag	Kabupaten Magelang
	Telaga Bleder	Alam	Grabag	Kabupaten Magelang
	Pemandian Air Hangat Candi Umbul	Alam	Grabag	Kabupaten Magelang
	Air Terjun Sumuran Seloprojo	Alam	Ngablak	Kabupaten Magelang
	Punthuk Setumbu	Alam	Karangrejo	Kabupaten Magelang
	Bukit Rhema (Gereja Ayam)	Alam	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Bukit Barede	Alam	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Punthuk Mongkrong	Alam	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Bekas Danau Purba	Alam	Borobudur	Kabupaten Magelang

Agrowisata . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
	Agrowisata Desa Borobudur	Alam	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Agrowisata Sentra Nanas Kembanglimus	Alam	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Agrowisata Honey Bee Garden (Desa Giri Tengah)	Alam	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Susur Sungai Elo	Alam	Mungkid	Kabupaten Magelang
	Punthuk Mangir Gunung Payung	Alam	Tempuran	Kabupaten Magelang
	Taman Wisata Karang Wulan	Alam	Kaliangkrik	Kabupaten Magelang
	Saujana Perkampungan Lereng Gunung	Alam	Kaliangkrik	Kabupaten Magelang
	Bukit Menoreh	Alam	Bagelen	Kabupaten Purworejo
	Candi Ngawen	Budaya	Muntilan	Kabupaten Magelang
	Candi Mendut	Budaya	Mungkid	Kabupaten Magelang
	Candi Borobudur	Budaya	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Candi Pawon	Budaya	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Wisata Palbapang	Budaya	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Candi Kenyo Wringinputih	Budaya	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Situs Brongsongan	Budaya	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Situs Brongsong	Budaya	Borobudur	Kabupaten Magelang

Candi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
	Candi Brangkal	Budaya	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Situs Dipan	Budaya	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Candi Asu Sengi	Budaya	Dukun	Kabupaten Magelang
	Candi Pendem	Budaya	Dukun	Kabupaten Magelang
	Bukit Gunung Gono	Budaya	Dukun	Kabupaten Magelang
	Candi Lumbung	Budaya	Sawangan	Kabupaten Magelang
	Candi Retno	Budaya	Secang	Kabupaten Magelang
	Candi Gunungsari	Budaya	Salam	Kabupaten Magelang
	Candi Losari	Budaya	Salam	Kabupaten Magelang
	Candi Gunung Wukir	Budaya	Salam	Kabupaten Magelang
	Candi Selogriyo	Budaya	Windusari	Kabupaten Magelang
	Candi Batur	Budaya	Windusari	Kabupaten Magelang
	Situs Plandi	Budaya	Mertoyudan	Kabupaten Magelang
	Situs Samberan	Budaya	Tempuran	Kabupaten Magelang
	Situs Bowongan	Budaya	Tempuran	Kabupaten Magelang
	Festival Telaga Bleder	Buatan	Grabag	Kabupaten Magelang

Makam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
	Makam Kerkop Mendut	Buatan	Mungkid	Kabupaten Magelang
	Taman Rekreasi Mendut	Buatan	Mungkid	Kabupaten Magelang
	Borobudur Marathon	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Perayaan Trisuci Waisak	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Gelar Budaya Wanurejo	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Festival Kali Elo	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Festival Makanan Djadoel	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Borobudur Island Park Candirejo	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Borobudur Art Center dan Village Healthy Life di Rumah Dharma Wanurejo	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Floating Market Bigaran	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Kampung Dolanan Bumiharjo	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Galeri dan Kerajinan Bambu Kebonsari	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Pasar Wisata dan Rest Area Sambirejo	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Sentra Tahu Tanjungsari	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang

Wisata . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
	Wisata Industri Pengolahan Air Minum Skala Desa Sambeng	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Arena Rekreatif dan Swafoto Svargabumi Ngadiharjo	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Candirejo	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Wanurejo	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Karangrejo	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Borobudur	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Karanganyar	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Wringinputih	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Giripurno	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Giritengah	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Sambeng	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Ngadiharjo	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Majaksingi	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Bigaran	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Kebonsari	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang

Desa . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
	Desa Wisata Ngargogondo	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Tanjungsari	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Tuksongo	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Ngadiharjo	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Kenalan	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Tegalarum	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Desa Wisata Kembanglimus	Buatan	Borobudur	Kabupaten Magelang
	Taman Wisata dan Rest Area Tegalsari	Buatan	Candimulyo	Kabupaten Magelang
Yogyakarta	Penyangga Obyek Wisata Gembira Loka	Alam	Kotagede	Kota Yogyakarta
	Gethekan Susur Sungai dan Gajah Wong Riverwalk	Alam	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
	Puncak Suroloyo	Alam	Samigaluh	Kabupaten Kulon Progo
	Perkebunan Teh Nglingsgo	Alam	Samigaluh	Kabupaten Kulon Progo
	Goa Kiskendo	Alam	Girimulyo	Kabupaten Kulon Progo
	Kalibiru	Alam	Kokap	Kabupaten Kulon Progo
	Tradisi Apeman dan Ruwahan	Budaya	Gedongtengen	Kota Yogyakarta

Kawasan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
	Kawasan Malioboro-Margamulya	Budaya	Gedongtengen, Danurejan, dan Gondomanan	Kota Yogyakarta
	Kraton Yogyakarta	Budaya	Kraton	Kota Yogyakarta
	Taman Sari	Budaya	Kraton	Kota Yogyakarta
	Pagelaran Kraton	Budaya	Kraton	Kota Yogyakarta
	Museum Kereta Kraton	Budaya	Kraton	Kota Yogyakarta
	Penyangga Obyek Wisata Tamansari dan Kraton Yogyakarta	Budaya	Kraton	Kota Yogyakarta
	Ndalem Mangkubumen	Budaya	Kraton	Kota Yogyakarta
	Ndalem Condoprajan	Budaya	Kraton	Kota Yogyakarta
	Ndalem Wiragunan	Budaya	Kraton	Kota Yogyakarta
	Ndalem Purwodirjan	Budaya	Kraton	Kota Yogyakarta
	Ndalem Kaneman	Budaya	Kraton	Kota Yogyakarta
	Ndalem Pakuningratan	Budaya	Kraton	Kota Yogyakarta
	Ndalem Joyokusuman	Budaya	Kraton	Kota Yogyakarta
	Seni Budaya Lokal Pathuk	Budaya	Kraton	Kota Yogyakarta
	Museum Sonobudoyo	Budaya	Gondomanan	Kota Yogyakarta
	Istana Gedung Agung	Budaya	Gondomanan	Kota Yogyakarta

Penyangga . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
	Penyangga Area Wisata Malioboro dan Kraton	Budaya	Gondomanan	Kota Yogyakarta
	Masjid Gede Kauman	Budaya	Gondomanan	Kota Yogyakarta
	Seni Budaya Lokal Ratmakan	Budaya	Gondomanan	Kota Yogyakarta
	Makam Raja Mataram	Budaya	Kotagede	Kota Yogyakarta
	Kraton Kotagede	Budaya	Kotagede	Kota Yogyakarta
	Ndalem Kedaton Purbayan	Budaya	Kotagede	Kota Yogyakarta
	Cokroyudan Kotagede	Budaya	Kotagede	Kota Yogyakarta
	Mbumen Kotagede	Budaya	Kotagede	Kota Yogyakarta
	Kemasan Mboharen Kotagede	Budaya	Kotagede	Kota Yogyakarta
	Upacara Adat Wiwitan	Budaya	Kotagede	Kota Yogyakarta
	Berbagai Seni Pertunjukan dan Hasil Budaya Tradisional Kotagede	Budaya	Kotagede	Kota Yogyakarta
	Sendratari Ballet Ramayana di Purawisata	Budaya	Mergangsan	Kota Yogyakarta
	Bangunan Cagar Budaya Ndalem Djoyodipuran	Budaya	Mergangsan	Kota Yogyakarta

Kesenian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
	Kesenian Rakyat Reog Dor dan Barongan	Budaya	Tegalrejo	Kota Yogyakarta
	Seni Macapat dan Karawitan	Budaya	Tegalrejo	Kota Yogyakarta
	Museum Batik Sulaman	Budaya	Pakualaman	Kota Yogyakarta
	Penyangga Kawasan Obyek Wisata Kraton Kadipaten Pakualaman	Budaya	Pakualaman	Kota Yogyakarta
	Berbagai Seni Pertunjukan dan Hasil Budaya Tradisional Pakualaman	Budaya	Pakualaman	Kota Yogyakarta
	Museum Puro Pakualaman	Budaya	Pakualaman	Kota Yogyakarta
	Atraksi Karawitan Ki Wasitodiningrat	Budaya	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
	Seni Budaya Lokal Jogoyudan	Budaya	Jetis	Kota Yogyakarta
	Seni Budaya Lokal Suryatmajan	Budaya	Danurejan	Kota Yogyakarta
	Seni Budaya Lokal Panembahan	Budaya	Danurejan	Kota Yogyakarta
	Panggung Krapyak	Budaya	Sewon	Kabupaten Bantul
	Atraksi Edukasi Satwa dan Agro Gembira Loka	Buatan	Kotagede	Kota Yogyakarta
	Tata Kelola Pertanian Kota	Buatan	Kotagede	Kota Yogyakarta

Pembuatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
	Pembuatan Kuliner Keripik	Buatan	Kotagede	Kota Yogyakarta
	Berbagai Wisata Kuliner	Buatan	Kotagede	Kota Yogyakarta
	Kampung Penghasil Souvenir	Buatan	Kotagede	Kota Yogyakarta
	Kuliner Lapangan Karang	Buatan	Kotagede	Kota Yogyakarta
	Festival Kipo	Buatan	Kotagede	Kota Yogyakarta
	Pusat Kerajinan dan Kuliner XT Square	Buatan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
	Tempat Pembuatan Gamelan dan Peralatan Pertukangan dan Pertanian	Buatan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
	Pusat Kerajinan dan Kuliner XT Square	Buatan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
	Industri Pembuatan Replika	Buatan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
	Makam Ki Hajar Dewantara	Buatan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
	Sanggar Edukasi	Buatan	Tegalrejo	Kota Yogyakarta
	Kerajinan Bahan Daur Ulang dan Kuliner Jajanan Pasar	Buatan	Tegalrejo	Kota Yogyakarta
	Museum Sasana Wiratama Pangeran Diponegoro	Buatan	Tegalrejo	Kota Yogyakarta

Wisata . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
	Wisata Kuliner Seperti Jamu Gingsang dan Gudeg Permata	Buatan	Pakualaman	Kota Yogyakarta
	Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman	Buatan	Pakualaman	Kota Yogyakarta
	Outbound Susur Sungai	Buatan	Mergangsan	Kota Yogyakarta
	Museum Dewantara Kirti Griya	Buatan	Mergangsan	Kota Yogyakarta
	Museum Perjuangan	Buatan	Mergangsan	Kota Yogyakarta
	Museum Biologi Universitas Gadjah Mada	Buatan	Mergangsan	Kota Yogyakarta
	Wisata Sungai Jogoyudan	Buatan	Jetis	Kota Yogyakarta
	Wisata Sungai Ratmakan	Buatan	Gondomanan	Kota Yogyakarta
	Museum Benteng Vredeburg	Buatan	Gondomanan	Kota Yogyakarta
	Wisata Sungai Suryatmajan	Buatan	Danurejan	Kota Yogyakarta
	Museum Pusat Angkatan Darat Dharma Wiratama	Buatan	Gondokusuman	Kota Yogyakarta
	Museum Sandi	Buatan	Gondokusuman	Kota Yogyakarta
	Sentra Pembuatan Bakpia Pathuk	Buatan	Kraton	Kota Yogyakarta
	Museum Bahari	Buatan	Wirobrajan	Kota Yogyakarta
	Goa Maria Sendangsono	Buatan	Kalibawang	Kabupaten Kulon progo

Prambanan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

KTA	Nama DTW	Jenis Wisata	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
Prambanan	Agrowisata Bukit Bugisan	Alam	Prambanan	Kabupaten Sleman
	Susur Sungai Opak	Alam	Kalasan	Kabupaten Sleman
	Candi Prambanan	Budaya	Prambanan	Kabupaten Sleman
	Candi Ijo	Budaya	Prambanan	Kabupaten Sleman
	Candi Banyunibo	Budaya	Prambanan	Kabupaten Sleman
	Candi Barong	Budaya	Prambanan	Kabupaten Sleman
	Situs Ratu Boko	Budaya	Prambanan	Kabupaten Sleman
	Candi Dawangsari	Budaya	Prambanan	Kabupaten Sleman
	Candi Gupolo	Budaya	Prambanan	Kabupaten Sleman
	Candi Gana	Budaya	Prambanan	Kabupaten Klaten
	Candi Sojiwan	Budaya	Prambanan	Kabupaten Klaten
	Candi Plaosan	Budaya	Prambanan	Kabupaten Klaten
	Candi Kalasan	Budaya	Kalasan	Kabupaten Sleman
	Candi Kedulan	Budaya	Kalasan	Kabupaten Sleman
	Candi Sari	Budaya	Kalasan	Kabupaten Sleman
	Taman Wisata Candi Prambanan	Buatan	Prambanan	Kabupaten Sleman
	Botanical Heritage Park Bugisan	Buatan	Prambanan	Kabupaten Klaten
Tebing Breksi	Buatan	Prambanan	Kabupaten Sleman	

BAB II . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

**BAB II  
SASARAN DAN ARAH PENGEMBANGAN**

**A. Sasaran**

Sasaran pengembangan Pariwisata di DPN BYP yaitu meningkatnya pertumbuhan dan kualitas aktivitas Pariwisata di DPN BYP dalam periode 21 (dua puluh satu) tahun yang ditopang daya dukung lingkungan yang memadai. Peningkatan kualitas utamanya ditujukan untuk peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan yang membentuk devisa dari wisatawan mancanegara dan pendapatan dari wisatawan nusantara. Proyeksi kunjungan wisatawan dan pendapatan Pariwisata disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3. Proyeksi Kunjungan Wisatawan dan Pendapatan Pariwisata  
DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan**

Indikator	Target				
	2024	2029	2034	2039	2044
a. Wisatawan Mancanegara (Kunjungan)	644.000	841.000	1.079.000	1.369.000	1.728.000
b. Pendapatan Devisa (Juta US\$)*	672	931	1.403	1.877	2.595
c. Wisatawan Nusantara (Perjalanan)	15.529.000	17.499.000	18.519.000	19.754.000	21.455.000
d. Pendapatan (Rp juta)	22.165.110	30.776.000	39.862.690	50.634.210	54.223.930

\*)Keterangan: kurs US\$ 1 = Rp15.000

Pertumbuhan aktivitas Pariwisata ini didukung oleh penyediaan tenaga kerja dan ketersediaan lahan yang masing-masing diwakili oleh indikator jumlah penduduk dan ketersediaan lahan. Pengembangan Pariwisata di DPN BYP juga mempertimbangkan pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut yang diperkirakan akan mencapai 459.914 (empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas) jiwa pada tahun 2044, dengan sebaran di KTA Yogyakarta sebesar 43,4% (empat puluh tiga koma empat persen), KTA Prambanan sebesar 28,2% (dua puluh delapan koma dua persen), dan KTA Borobudur sebesar 28,4% (dua puluh delapan koma empat persen).

Pengembangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Pengembangan Pariwisata di DPN BYP diharapkan dapat menciptakan tambahan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja terampil, baik pada tingkat manajer atau pengelola maupun pekerja. Potensi tambahan lapangan kerja diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja mencapai lebih dari 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu) orang. Tambahan lapangan kerja ini tidak hanya disumbangkan oleh pengembangan Pariwisata di 3 (tiga) KTA, tetapi juga didukung oleh pengembangan di deliniasi perluasan dalam segitiga perkotaan Joglosemar.

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas Pariwisata diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan lahan di DPN BYP seluas 1.805,5 Ha (seribu delapan ratus lima koma lima hectare) untuk memfasilitasi pembangunan permukiman 35,6% (tiga puluh lima koma enam persen), hotel dan pondok wisata (*homestay*) 11,9% (sebelas koma sembilan persen), dan amenitas lainnya 52,5% (lima puluh dua koma lima persen) sampai dengan tahun 2044.

**B. Arah Pengembangan**

Kebijakan pengembangan RIDPN BYP dalam periode tahun 2024 - 2044 diarahkan untuk:

1. menangani isu strategis, yaitu penyediaan infrastruktur dasar dan aksesibilitas, peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM Pariwisata, peningkatan tata kelola destinasi dan lingkungan, serta peningkatan kemudahan berinvestasi dan berusaha;
2. mengembangkan akses pasar dan meningkatkan diversifikasi destinasi, termasuk produk dan layanan wisata; dan
3. meningkatkan keberlanjutan Pariwisata di DPN BYP agar dapat memberi manfaat yang optimal untuk perbaikan kualitas kehidupan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, pelestarian budaya, dan peningkatan kualitas lingkungan dan resiliensi bencana.

Arah pengembangan tersebut dilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan yaitu:

**1. TAHAP PERTAMA: PENINGKATAN INTEGRASI KTA (Tahun 2024)**

Tahap pertama difokuskan pada peningkatan integrasi kelembagaan dan kerjasama Pemangku Kepentingan, konektivitas dan aksesibilitas, kesadaran dan perilaku para Pemangku Kepentingan dalam melestarikan nilai penting objek pemajuan kebudayaan, dan cagar budaya kolaborasi antar Pemangku Kepentingan dalam pemanfaatan dan meningkatkan kualitas pelayanan Pariwisata, serta adaptasi teknologi untuk pengembangan Pariwisata. Pengembangan pada tahap ini akan difokuskan ke kawasan cagar budaya, yaitu BYP dengan strategi untuk:

- a. mendorong komitmen koordinasi dan kolaborasi antar Pemangku Kepentingan;

b. mengendalikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- b. mengendalikan pemanfaatan ruang melalui pengaturan bentang pandang dan intensitas kawasan terbangun;
  - c. membentuk struktur pengelolaan yang terintegrasi dalam manajemen destinasi tunggal (*single destination management*) yang merupakan manajemen profesional yang dapat mengintegrasikan aspek wisata dan pengembangan ekonomi terutama Pariwisata dengan tetap memperhatikan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
  - d. melestarikan cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dengan fokus pada KTA, seperti dalam amanat peraturan perundang-undangan dan rekomendasi dari UNESCO;
  - e. meningkatkan kesadaran dan komitmen para Pemangku Kepentingan untuk melestarikan kearifan lokal, pemanfaatan untuk Pariwisata dan aktivitas lainnya, pengelolaan persampahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Peningkatan kesadaran ini didukung peningkatan kapasitas Pemangku Kepentingan, termasuk aparatur pemerintah, pengembang DTW, pemandu wisata, staf akomodasi dan fasilitas wisatawan, serta masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan cagar budaya;
  - f. penyiapan *readiness criteria* untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas KTA dari dan ke simpul transportasi utama Bandar Internasional Yogyakarta (YIA), Stasiun Kereta Api Tugu, dan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan dan antar KTA DPN BYP menggunakan jaringan transportasi jalan dan/atau kereta api (lintas YIA-Yogyakarta), termasuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan pada tahap kedua; dan
  - g. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi komunikasi terkini serta kemampuan adaptasi teknologi untuk peningkatan layanan Pariwisata yang berkualitas dan terintegrasi.
2. TAHAP KEDUA: PERCEPATAN I (Tahun 2025 - 2029)
- Tahap kedua melanjutkan integrasi kelembagaan dan kerja sama Pemangku Kepentingan, konektivitas dan aksesibilitas, serta peningkatan fungsi Pariwisata secara intensif yang mampu menarik segmen pasar baru, dan kolaborasi antar Pemangku Kepentingan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mendukung pelestarian Kawasan Cagar Budaya Nasional Borobudur, diversifikasi atraksi, peningkatan literasi, bakat dan kompetensi SDM terampil untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pariwisata, dan pengembangan produk wisata yang semakin bervariasi.
- Strategi yang dilaksanakan pada tahap ini akan difokuskan pada:
- a. mendorong komitmen koordinasi dan kolaborasi antar Pemangku Kepentingan;

b. meningkatkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- b. meningkatkan kapasitas Pemangku Kepentingan, termasuk aparaturnya pemerintah, pengembang DTW swasta, pemandu wisata, serta staf akomodasi dan fasilitas wisata dalam rangka meningkatkan kualitas layanan di tempat wisata, transportasi umum, akomodasi dan fasilitas, serta pengalaman wisata dan nilai tambah;
  - c. mengendalikan pemanfaatan ruang melalui pengaturan bentang pandang dan intensitas kawasan terbangun;
  - d. memantapkan kualitas layanan atraksi dan amenitas budaya serta memperkenalkan atraksi non budaya seperti wisata buatan dan alam untuk diversifikasi tema untuk peningkatan pilihan wisata;
  - e. pembangunan secara bertahap untuk peningkatan konektivitas dan aksesibilitas KTA dari dan ke simpul transportasi utama (Bandar Udara YIA, Stasiun Kereta Api Tugu, dan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan) dan antar KTA DPN BYP menggunakan jaringan transportasi jalan dan/atau kereta api (lintas YIA-Yogyakarta dan reaktivasi kereta api lintas Ambarawa-Magelang-Borobudur-Yogyakarta) yang terintegrasi dengan kapasitas yang memadai;
  - f. melakukan pembangunan infrastruktur aksesibilitas, amenitas, dan perlindungan lingkungan hidup seperti pengelolaan sampah yang sudah dipersiapkan pada tahap pertama;
  - g. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi komunikasi terkini serta kemampuan adaptasi teknologi untuk peningkatan layanan Pariwisata yang berkualitas dan terintegrasi; dan
  - h. meningkatkan fungsi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aset budaya di KTA Borobudur dan KTA Prambanan untuk menjadikan destinasi wisata budaya berkelas dunia.
3. **TAHAP KETIGA: PERCEPATAN II (Tahun 2030 - 2034)**
- Tahap ketiga difokuskan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur, kolaborasi antar Pemangku Kepentingan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mendukung pelestarian di Borobudur yang didukung keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan DPN BYP. Strategi yang dilaksanakan pada tahap ini akan difokuskan pada:
- a. meningkatkan cakupan dan kualitas layanan publik (kelistrikan, komunikasi, air bersih, sanitasi, pengolahan persampahan, dan pengelolaan lingkungan, termasuk sumber daya air) di kawasan Pariwisata. Pelaksanaannya juga diharapkan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait peningkatan sanitasi, perbaikan pengelolaan air tanah untuk menghentikan pengambilan berlebihan air tanah, pengurangan pembuangan sampah dan peningkatan pengolahan sampah, serta

mencapai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- mencapai 30% (tiga puluh persen) kawasan hijau dengan menghentikan deforestasi dan praktek pertanian yang tidak berkelanjutan, terutama di daerah hulu sungai, melalui peningkatan partisipasi masyarakat, penyediaan insentif, dan penegakan hukum;
- b. meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang didukung dengan perluasan penggunaan energi terbarukan;
  - c. melanjutkan pembangunan untuk peningkatan konektivitas dan aksesibilitas KTA dari dan ke simpul transportasi utama (Bandar Udara YIA, Stasiun Kereta Api Tugu, dan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan) dan antar KTA DPN BYP menggunakan jaringan transportasi jalan dan/atau kereta api (lintas YIA–Yogyakarta dan reaktivasi kereta api lintas Ambarawa–Magelang–Borobudur–Yogyakarta) yang terintegrasi dengan kapasitas yang memadai serta peningkatan frekuensi dan kualitas layanan transportasi yang terintegrasi; dan
  - d. meningkatkan diversifikasi wisata antara lain wisata *meeting, incentive, convention, and exhibition* di Kota Yogyakarta, wisata minat khusus di kawasan otorita Badan Otorita Borobudur (BOB), dan wisata berbasis event dan edukasi yang akan dikembangkan di Kawasan DPN BYP yang didukung potensi alam dan budaya.
4. **TAHAP KEEMPAT: INTEGRASI DEKONSENTRASI (Tahun 2035 - 2039)**  
Tahap keempat difokuskan pada pengembangan atraksi unggulan baru dan peningkatan kualitas layanan konektivitas antar KTA DPN BYP dengan perluasan wilayah Joglosemar. Strategi yang dilaksanakan pada tahap ini akan difokuskan pada:
- a. pengembangan pemasaran dengan alternatif paket perjalanan wisata berdasarkan arah pintu masuk meliputi Semarang-Karimunjawa-Sangiran-Solo-Merapi-Borobudur-Dieng-Prambanan;
  - b. mengintegrasikan Borobudur sebagai destinasi prioritas dengan destinasi lainnya di wilayah Joglosemar;
  - c. peningkatan frekuensi dan kualitas layanan transportasi yang terintegrasi melalui peningkatan konektivitas dan aksesibilitas KTA dari dan ke simpul transportasi utama Daerah Istimewa Yogyakarta (Bandar Udara YIA, Stasiun Kereta Api Tugu, dan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan) dan wilayah Joglosemar (Bandar Udara Internasional Ahmad Yani dan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo), Terminal Penumpang Tipe A (Mangkang dan Tirtonadi), Stasiun Kereta Api (Tawang dan Solo Balapan) dan antar KTA DPN BYP dengan Kawasan Joglosemar menggunakan jaringan transportasi jalan dan/atau kereta api

(lintas . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

(lintas Bandar Udara YIA–Yogyakarta yang terintegrasi dengan kapasitas yang memadai;

- d. optimalisasi Kota Semarang sebagai pintu masuk utama wisatawan mancanegara dengan moda kapal pesiar; dan
  - e. rencana pengembangan kawasan Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung.
5. **TAHAP KELIMA: DIVERSIFIKASI WISATA (Tahun 2040 - 2044)**

Tahap kelima pengembangan Pariwisata yang difokuskan pada penguatan keberlanjutan Pariwisata yang berdampingan secara harmonis dengan pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya serta sumber daya alam, peningkatan kompetensi SDM terampil yang berdaya saing, serta perkembangan aktivitas sosial ekonomi di kawasan DPN BYP khususnya dan kawasan Joglosemar secara keseluruhan. Pelaksanaannya mencakup upaya-upaya perluasan jumlah dan diverifikasi jenis atraksi yang ditawarkan kepada pengunjung wisatawan. Strategi yang dilaksanakan mencakup:

- a. melaksanakan diversifikasi atraksi tingkat lanjut sejalan dengan dekonsentrasi tempat-tempat wisata di wilayah perluasan untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan revitalisasi aset objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya serta alam; dan
- c. melanjutkan peningkatan frekuensi dan kualitas layanan transportasi yang terintegrasi melalui peningkatan konektivitas dan aksesibilitas KTA dari dan ke simpul transportasi utama Daerah Istimewa Yogyakarta (Bandar Udara YIA, Stasiun Kereta Api Tugu, dan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan) dan wilayah Joglosemar (Bandar Udara Internasional Ahmad Yani dan Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo), Terminal Penumpang Tipe A (Mangkang dan Tirtonadi), Stasiun Kereta Api (Tawang dan Solo Balapan), Pelabuhan Tanjung Mas, dan antar KTA DPN BYP dengan Kawasan Joglosemar menggunakan jaringan transportasi jalan dan/atau kereta api (lintas Bandar Udara YIA-Yogyakarta) yang terintegrasi dengan kapasitas yang memadai.

BAB III . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

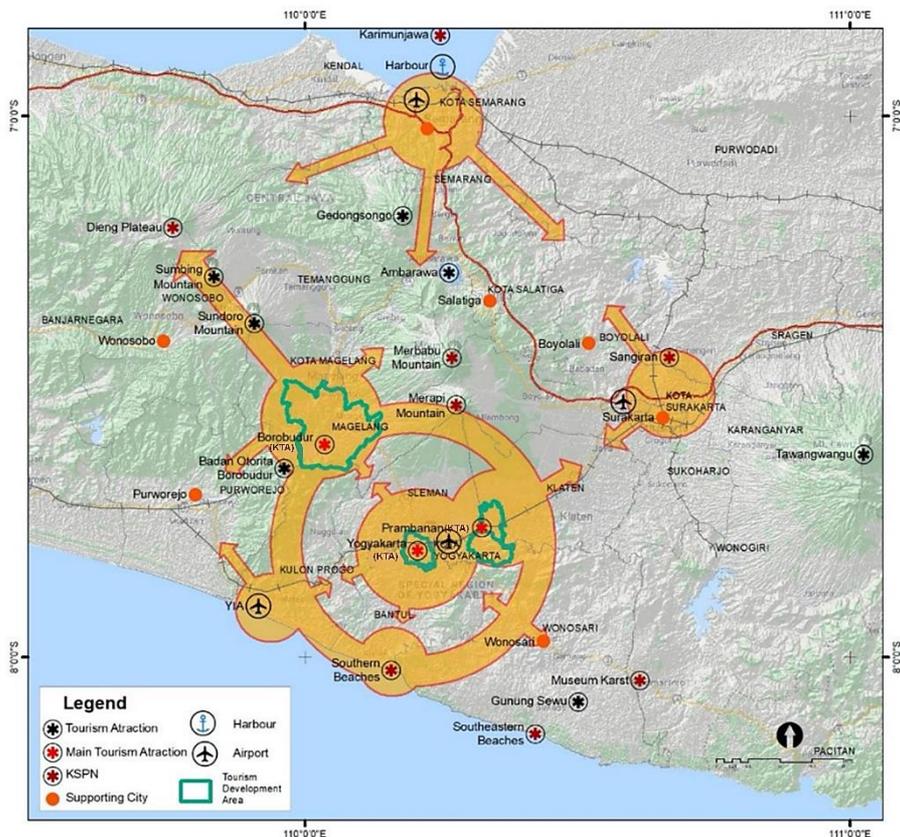
- 29 -

**BAB III**

**PELAKSANAAN PENGEMBANGAN**

**A. Perwilayahan Pembangunan DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan**

Konsep pengembangan Pariwisata secara spasial di DPN BYP mengikuti pola pengembangan pemerataan distribusi pembangunan atau dekonsentrasi.



Gambar 4. Pola Pengembangan Dekonsentrasi DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan

Secara terinci, pola pengembangan dekonsentrasi mencakup langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Pengembangan Pariwisata dengan Pola Dekonsentrasi
  - a. Pengembangan DTW difokuskan pada DPN BYP dan diperkuat keterkaitannya dalam pola kunjungan wisatawan dari kawasan DPN BYP ke KSPN di sekitarnya termasuk Karimun Jawa, Dieng, Gedong Songo, Sangiran, Pantai Selatan, dan Taman Bumi (*geopark*) Gunung Sewu. Pola pengembangan ini dilengkapi

dengan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

dengan pola perjalanan bertajuk *Borobudur Trail of Civilization* yakni merupakan sebuah pola perjalanan wisata minat khusus *heritage* yang berfokus pada jejak peradaban dan kebudayaan pada masa kerajaan Mataram Kuno dengan memiliki 9 (sembilan) sub tema yang diambil dari interpretasi relief Candi Borobudur, dikemas secara menarik dan memiliki unsur pendidikan-pengalaman-hiburan.

Pada tahap pertama, terdapat 9 (sembilan) sub tema yang dikembangkan sebagai berikut:

- 1) waluku: budaya peradaban;
  - 2) tubuh dan jiwa;
  - 3) keterampilan tangan;
  - 4) dunia flora tropis;
  - 5) bintang berjalan;
  - 6) sudhana manohara: kisah cinta abadi;
  - 7) perjalanan dari bebatuan;
  - 8) cerita fabel jenaka; dan
  - 9) musik dan irama.
- b. Pola pengembangan Pariwisata di Candi Borobudur dan Candi Prambanan akan mendukung pelestarian *Outstanding Universal Value* (OUV) berdasarkan pedoman operasional untuk implementasi konvensi warisan dunia menyatakan bahwa rencana pengelolaan, termasuk rencana pengelolaan pengunjung, harus disiapkan untuk setiap situs warisan dunia dalam rangka mempertahankan OUV. Pelestarian OUV juga mencakup upaya untuk mempertahankan bentang pandang dan fungsi pertanian di sekitar Candi Borobudur dan Candi Prambanan.
- c. Pola pengembangan kawasan Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung, dengan pusat pengembangan di Kota Magelang. Distribusi pengembangan Pariwisata di kawasan ini memanfaatkan kedatangan wisatawan melalui YIA untuk disebarakan melalui jalur Purwomanggung.

Gambar 5 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -



Gambar 5. Pola perjalanan menuju Borobudur melalui Purwomanggung

Dalam konteks ini, pengembangan Pariwisata kawasan BYP akan diintegrasikan dengan kawasan otorita BOB seluas paling sedikit 300 Ha (tiga ratus Hektare) di perbukitan Menoreh, Kabupaten Purworejo, dan kawasan lainnya dalam koordinasi BOB. Kawasan BOB akan dikembangkan menjadi kawasan Pariwisata terpadu dengan nama Borobudur Highland. Saat ini kawasan tersebut adalah hutan pinus yang direncanakan untuk menjadi produk wisata berstandar global, sebagaimana tercantum di dalam *masterplan* yang telah disusun. Borobudur Highland dikembangkan dengan konsep “*Cultural Adventure Eco-tourism*” dan visi kawasan “Menjadi destinasi wisata alam, petualangan, dan budaya skala internasional dengan prinsip berkelanjutan sebagai *tourism hub* kawasan Pariwisata Candi Borobudur pada tahun 2030.” Selain itu, kawasan Purwomanggung juga menjadi jembatan bagi persebaran destinasi dan pola perjalanan menuju Borobudur dari kota Semarang.

Gambar 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -



Gambar 6. Lokasi kawasan Badan Otorita Borobudur

- d. Penguatan kerja sama dan dukungan segitiga kawasan perkotaan utama, khususnya Semarang dan Surakarta untuk berbagi peran dengan Yogyakarta dalam mengatur pergerakan wisatawan di BYP dan destinasi di sekitarnya. Pembagian peran ini mengarahkan pergeseran konsentrasi wisatawan yang selama ini begitu kuat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ke arah Semarang dan Surakarta.

Rencana pembangunan jalan tol Semarang–Yogyakarta, yang dekat atau melewati KTA Borobudur, serta peningkatan kapasitas Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani akan memperkuat peran Semarang dalam memasok wisatawan ke KTA Borobudur. Peran Kota Surakarta juga akan semakin kuat dengan perluasan kapasitas Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo dan rencana jalan tol Yogyakarta–Surakarta, khususnya untuk memasok wisatawan ke KTA Prambanan, KTA Yogyakarta, dan KTA Borobudur, serta destinasi Sangiran dan sekitarnya.

Penguatan peran ketiga kota juga memperkuat penyebaran perjalanan wisatawan ke Surakarta dan ke beberapa kawasan wisata lainnya. Kerja sama tiga kota akan memperkuat peran Surakarta yang akan dikembangkan secara terintegrasi dengan Tawangmangu dan Gunung Lawu sebagai *remote* destinasi Surakarta. Kawasan wisata yang dapat diakses melalui kerja sama tiga kota akan mencakup kawasan wisata alam di sekitar Gunung Merapi, kawasan pantai selatan mulai dari Kabupaten Gunungkidul, Bantul hingga ke Kulon Progo, serta kawasan cagar

budaya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

budaya yang terletak di Kabupaten Sleman (kawasan candi), Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Penguatan kerja sama tiga kota juga mengarahkan pembangunan infrastruktur yang akan semakin terpadu.

- e. Diversifikasi tematik pengembangan destinasi di DPN BYP dan KSPN sekitarnya dilakukan dengan menambahkan tema:
    - 1) wisata melihat matahari terbit/terbenam, serta wisata petualangan ringan seperti pendakian jarak pendek dan susur sungai di Borobudur;
    - 2) wisata alam di sekitar kawasan Gunung Merapi/Merbabu, Gunung Sindoro/Sumbing, Wonosari, dan Taman Bumi (*geopark*) Gunung Sewu;
    - 3) wisata pantai dan laut di pantai selatan dan tenggara Daerah Istimewa Yogyakarta dan kepulauan Karimunjawa;
    - 4) wisata belanja di sekitar YIA;
    - 5) wisata kota lama di Semarang; dan
    - 6) wisata jelajah tematik dengan tur jalan kaki, bersepeda, atau mengemudi, misal Jalur Diponegoro, rute Gerilya Jenderal Sudirman, *Cradle of the Republic*, *Trail Temple*, *Trail Volcano*, *Traditional Life of Java*, Musik dan Teater Jawa, Gastronomi Jawa, dan lain sebagainya.
  - f. Pengelolaan dan penanggulangan bencana dalam pola dekonsentrasi lebih banyak difokuskan pada wilayah Joglosemar, khususnya terkait dengan penyediaan lahan untuk pengembangan destinasi maupun atraksi baru di KSPN Dieng, Rawa Pening-Gedong Songo, Karimunjawa, Sangiran, Pantai Selatan, Kawasan Karst Gunungsewu, kawasan otoritatif BOB di Purworejo, serta KPPN Semarang Kota dan Surakarta, mengingat ketersediaan lahan di kawasan BYP relatif terbatas.
2. Peningkatan Aksesibilitas
- a. Peningkatan kinerja jaringan jalan yang ada, baik jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten untuk menghubungkan antar kawasan wisata seperti dari DPN BYP ke KSPN Dieng di Wonosobo, KSPN Karst Gunung Kidul, KSPN Pantai Selatan Yogyakarta, KSPN Merapi-Merbabu, KSPN Karimunjawa, dan KSPN Sangiran. Pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta dengan akses pintu tol di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas ke kawasan tersebut. Rencana pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo juga diharapkan mampu memberikan alternatif bagi wisatawan dalam memilih pintu gerbang kedatangan dan mengatur jadwal perjalanan. Pembangunan akses jalan alternatif lain, misalnya dari YIA menuju Candi Borobudur melalui Jalur Bedah Menoreh,

dapat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

dapat dilaksanakan untuk mempersingkat waktu tempuh wisatawan yang hendak langsung menuju kawasan Candi Borobudur sambil menikmati wisata alam.

- b. Pengintegrasian konektivitas simpul-simpul transportasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Borobudur agar terhubung secara regional dengan Kawasan Cagar Budaya Nasional Prambanan, Kota Yogyakarta, dan kawasan Joglosemar yang lebih luas. Konektivitas untuk mendukung kedatangan wisatawan mancanegara dari YIA di Kulon Progo, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Semarang, dan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo di Boyolali dapat dilengkapi dengan aksesibilitas ke berbagai kawasan wisata di BYP dan wilayah yang lebih luas di kawasan Joglosemar. Sebagai contoh, peningkatan layanan kereta api yang menghubungkan YIA menuju Stasiun Tugu di Kota Yogyakarta, serta reaktivasi layanan kereta dari Ambarawa–Magelang–Borobudur–Yogyakarta diharapkan menambah cakupan layanan transportasi publik menuju kawasan destinasi Pariwisata di Kawasan Cagar Budaya Nasional Borobudur, Kawasan Cagar Budaya Nasional Prambanan, serta Kota Yogyakarta.

3. Pelestarian Warisan Budaya

Kawasan BYP memiliki situs warisan dunia yang ditetapkan UNESCO, yaitu Kompleks Candi Borobudur, Kompleks Candi Prambanan, dan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Berdasarkan warisan budaya di kawasan BYP, pelestarian warisan budaya yang akan dilakukan yaitu:

- a. peningkatan pengetahuan, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi masyarakat dan pengunjung terhadap nilai penting pada setiap situs, melalui penyediaan informasi, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas;
- b. pengembangan kerja sama yang melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan dalam pelestarian warisan budaya; dan
- c. pengawasan dan pengendalian pemberian izin bangunan pada zona-zona tertentu dan mempertahankan karakter kawasan dalam rangka melestarikan OUV.

4. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Peningkatan kualitas lingkungan diawali dengan penyusunan atau pembaharuan Rencana Detail Tata Ruang oleh pemerintah kabupaten/kota di kawasan BYP dalam rangka menjaga harmonisasi dan konsistensi pemanfaatan ruang, menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati, menjaga lanskap budaya, serta mengendalikan izin pengembangan atraksi dan amenitas wisata. Upaya ini diperkuat dengan pemantauan terhadap kualitas udara pada seluruh kawasan perkotaan, pusat-pusat aktivitas, serta

Kawasan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

Kawasan Cagar Budaya Nasional Borobudur dan Kawasan Cagar Budaya Nasional Prambanan. Penggunaan kendaraan berbahan bakar rendah emisi akan dipromosikan yang didukung dengan penyediaan insentif bagi penggunaannya.

5. Pengembangan Pertanian Berkelanjutan untuk Pemenuhan Pangan Mandiri serta Pengembangan Agrowisata

Mempertahankan lahan pertanian di kawasan BYP dengan pola pertanian yang berkelanjutan merupakan bagian dari pelestarian OUV. Pelaksanaannya diperkuat dengan pemberdayaan dan regenerasi petani yang dilakukan dengan pola pertanian yang semakin produktif dan modern.

Pengembangan pertanian berkelanjutan ini juga mencakup penguatan aktivitas pendukung di luar ladang sebagai bagian dari peningkatan nilai tambah Pariwisata. Salah satu aktivitas pendukung tersebut adalah pengembangan wisata pedesaan berbasis pertanian yang tersebar di kawasan BYP. Kegiatan pertanian mulai dari menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian yang dapat dikemas menjadi atraksi wisata. Aktivitas yang dikembangkan diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja, khususnya bagi generasi muda dan ibu rumah tangga. Pada saat yang sama, nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas agrowisata diharapkan dapat mendukung pelestarian lahan-lahan pertanian di dalam kawasan BYP.

6. Pembangunan yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko Bencana, Perubahan Iklim, Lingkungan, dan Sosial

Setiap kegiatan pengembangan Pariwisata akan mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan risiko bencana multi bahaya. Perencanaan penanggulangan bencana akan dilengkapi dengan penguatan kelembagaan dan pengembangan kemitraan dalam pengelolaan risiko resiliensi bencana dan perubahan iklim, serta peningkatan partisipasi seluruh Pemangku Kepentingan dan warga yang berpotensi terdampak.

7. Peningkatan Kualitas Amenitas melalui Pemenuhan Standar Internasional

Peningkatan kualitas amenities melalui pemenuhan standar internasional merupakan bagian dari upaya penyediaan layanan Pariwisata yang berkualitas dan paripurna. Pelaksanaannya akan didukung dengan peningkatan kapasitas penyedia amenities dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bidang Pariwisata dalam penerapan standar pelayanan yang lebih tinggi dan pemeliharannya. Selain itu, terwujudnya manajemen pengelolaan pondok wisata terintegrasi juga diharapkan dapat memberikan peluang dan kerja sama untuk mendukung peningkatan kualitas amenities dalam memenuhi standar internasional.

Selanjutnya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

Selanjutnya untuk mendukung pola dekonsentrasi, pengembangan Pariwisata di DPN BYP difokuskan pada 3 (tiga) KTA, yaitu: Borobudur, Yogyakarta, dan Prambanan yang diharapkan menjadi pengungkit perkembangan Pariwisata di BYP. Rencana pengembangan wilayah di masing-masing KTA diuraikan sebagai berikut:

a. Rencana Pengembangan KTA Borobudur

Berdasarkan pengembangan dekonsentrasi, pengembangan pada KTA Borobudur tidak terbagi dalam Sub KTA karena difokuskan pada satu kawasan berbasis budaya yang terbagi dalam beberapa segmen di Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Mungkid. Prinsip utamanya yaitu:

- 1) memperkuat OUV di Kompleks Candi Borobudur;
- 2) mempertahankan karakter dari kawasan perdesaan; dan
- 3) menyebarkan atraksi wisata agar tidak terpusat di Candi Borobudur.

Penahapan pembangunan spasial dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang untuk kegiatan Pariwisata. Pada tahap pertama, pengembangan ruang diarahkan pada pengembangan amenities dan akomodasi, serta keterhubungan desa-desa wisata di Kecamatan Borobudur yang didukung adaptasi teknologi untuk layanan Pariwisata. Pada tahap kedua dan tahap ketiga, pengembangan mulai difokuskan di Kawasan Palbapang dan jalur antara Yogyakarta–Magelang dan Magelang–Salaman. Pada tahap ini pengembangan lebih difokuskan di luar Borobudur, dengan mengembangkan amenities dan akomodasi di jalan Magelang–Blondo. Untuk tahap keempat dan tahap kelima pengembangan diperluas mencakup kawasan Joglosemar.

Secara garis besar, pada tahap pertama, pengembangan dimulai di Kecamatan Borobudur dan Mungkid, yaitu:

- 1) Pariwisata budaya utama Borobudur-Pawon-Mendut;
- 2) Pariwisata Campuran Balai Ekonomi Desa 20 (dua puluh) desa wisata;
- 3) amenities segmen Blondo-Palbapang;
- 4) Pariwisata perkotaan gerbang kawasan 4 (empat) lokasi (Gerbang Palbapang, Gerbang Blondo, Gerbang Klangan, Gerbang Kembanglimus); dan
- 5) pelestarian Bekas Danau Purba.

Pada tahap kedua dan tahap ketiga, pengembangan dilanjutkan di kecamatan-kecamatan lain di sekitar KTA Borobudur, yaitu:

- 1) Pariwisata berbasis alam Pegunungan Menoreh;
- 2) pemukiman Mungkid-Mertoyudan;
- 3) amenities Kota Magelang; dan
- 4) Pariwisata berbasis alam Kecamatan Tempuran.

Pada . . .

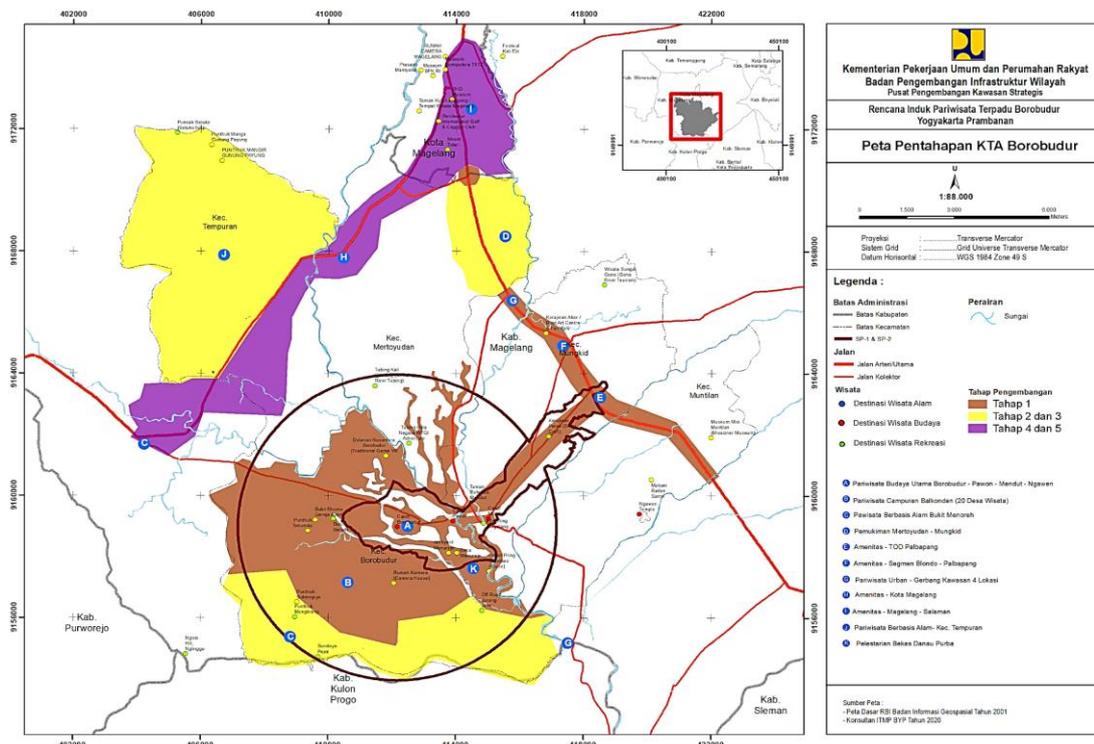


PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pada tahap keempat dan tahap kelima, pengembangan diperluas ke KTA-KTA baru di sekitar KTA Borobudur, yaitu:

- 1) amenities Kota Magelang; dan
- 2) Pariwisata perkotaan Kota Magelang.



Gambar 7. Tahapan Pengembangan KTA Borobudur dan sekitarnya

Penataan Candi Borobudur diatur dengan relokasi pedagang dan parkir dan disebarakan ke titik kantong parkir baru, serta pengaturan sirkulasi pengunjung untuk mengurangi arus pengunjung yang naik ke atas candi. Zona 2 di sekeliling candi akan dihijaukan kembali dan menjadi taman arkeologi yang digunakan sebagai sarana konservasi, spiritual, edukasi, dan Pariwisata yang tetap akan menyesuaikan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku.

Pengembangan KTA Borobudur dibagi menjadi beberapa bagian:

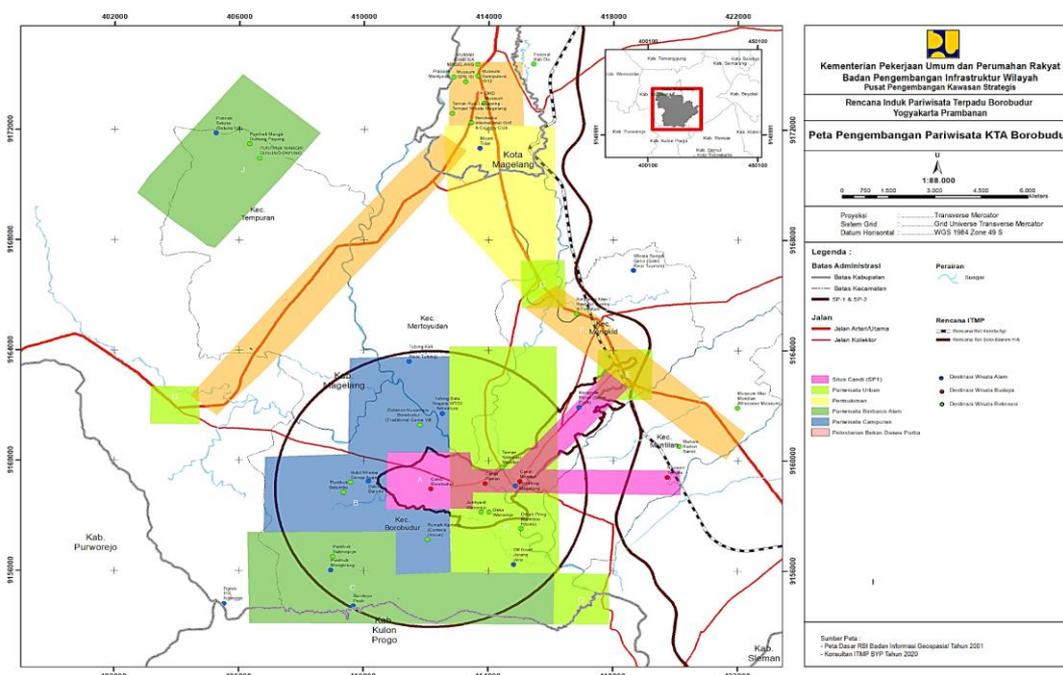
- 1) sumbu Borobudur-Pawon-Mendut;
- 2) pintu masuk 4 (empat) gerbang kawasan;
- 3) parkir dan transit multifungsi; dan
- 4) pelestarian Bekas Danau Purba.

Gambar 8 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -



Gambar 8. Zonasi Pengembangan KTA Borobudur dan sekitarnya

Rencana yang lebih rinci terkait pengembangan KTA Borobudur sebagai berikut:

1) Sumbu Borobudur-Pawon-Mendut

Kompleks Candi Borobudur sebenarnya juga mencakup Candi Pawon dan Candi Mendut yang berjarak 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kilometer dan 2,9 (dua koma sembilan) kilometer dari Candi Borobudur. Namun, wisatawan biasanya lebih tertarik berkunjung ke situs utama di Candi Borobudur. Kunjungan ke ketiga candi dapat dilakukan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau naik kereta kuda/andong. Namun dalam praktiknya pengunjung lebih banyak yang menggunakan kendaraan bermotor. Untuk mengunjungi ketiga candi, pengunjung harus mengambil jalan memutar, melewati pemukiman penduduk yang padat, serta menyeberang Sungai Elo dan Sungai Progo melalui jembatan yang padat arus lalu lintasnya.

Kondisi ini tidak ideal untuk mendukung pola perjalanan yang efisien dan penyediaan layanan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sumbu Borobudur-Pawon-Mendut diarahkan ke penataan zona 1 sampai zona 3 dan sirkulasinya, dengan mengedepankan narasi Borobudur dan kedua candi lainnya, serta pembangunan fasilitas baru dan panduan bangunan di sepanjang sumbu Borobudur-Pawon-Mendut, dengan rincian sebagai berikut: mempertajam konsep taman

arkeologi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

arkeologi di zona 4 sampai zona 5, menciptakan lingkungan yang ekologis dan berwawasan lingkungan, dan menata kembali tampilan bangunan di dalam zona 2 sampai zona 5 dengan karakteristik daya dukung lingkungan rendah yang sejalan dengan peraturan tata ruang yang berlaku dan meningkatkan kualitas fisik jalur utama wisata dan ibadah ziarah di sepanjang garis imajiner sumbu Borobudur-Pawon-Mendut, terutama untuk fasilitas pejalan kaki dan pengendara sepeda/kendaraan non-motor lainnya.

a) Zonasi Kompleks Candi Borobudur

Berdasarkan *Masterplan Borobudur Archaeological Park (Japan International Cooperation Agency/JICA, 1979)* yang telah direvisi pada tahun 2021 dalam dokumen *Borobudur Temple Compounds Management Plan*, zonasi Kompleks Candi Borobudur terdiri atas:

- (1) zona 1: Candi Borobudur dialokasikan sebagai zona sakral (*sanctuary area*);
- (2) zona 2: Candi Borobudur merupakan taman arkeologi;
- (3) zona 3: pengembangan (*land use regulation zone*) dalam rangka menunjang kelestarian candi;
- (4) zona 4: perlindungan bentang pandang Borobudur (*historical scenery preservation zone*); dan
- (5) zona 5: perlindungan kawasan arkeologi (*national archaeological park zone*).

Upaya perbaikan KDB pada zona 2 akan dilakukan sekaligus dengan peningkatan kualitas bangunan yang sudah ada dan pengembalian karakter alami dari lanskap Borobudur, antara lain mencakup:

- (1) revitalisasi Museum Samudra Raksa dengan memanfaatkan bangunan lama disesuaikan dengan KDB dan dibuat selaras dengan lanskapnya serta pembangunan Museum Borobudur;
- (2) revitalisasi klaster pengetahuan dan rekreasi, serta pusat pengunjung, memanfaatkan bangunan lama yang disesuaikan KDB dan dibuat selaras dengan lanskapnya;
- (3) revitalisasi plaza penerima dan plaza ziarah, dengan memanfaatkan bangunan lama yang nantinya akan dilengkapi dengan loket pengunjung selaras dengan lanskapnya;
- (4) revitalisasi bekas Hotel Manohara menjadi Borobudur *study center* dibuat selaras dengan lanskap; dan

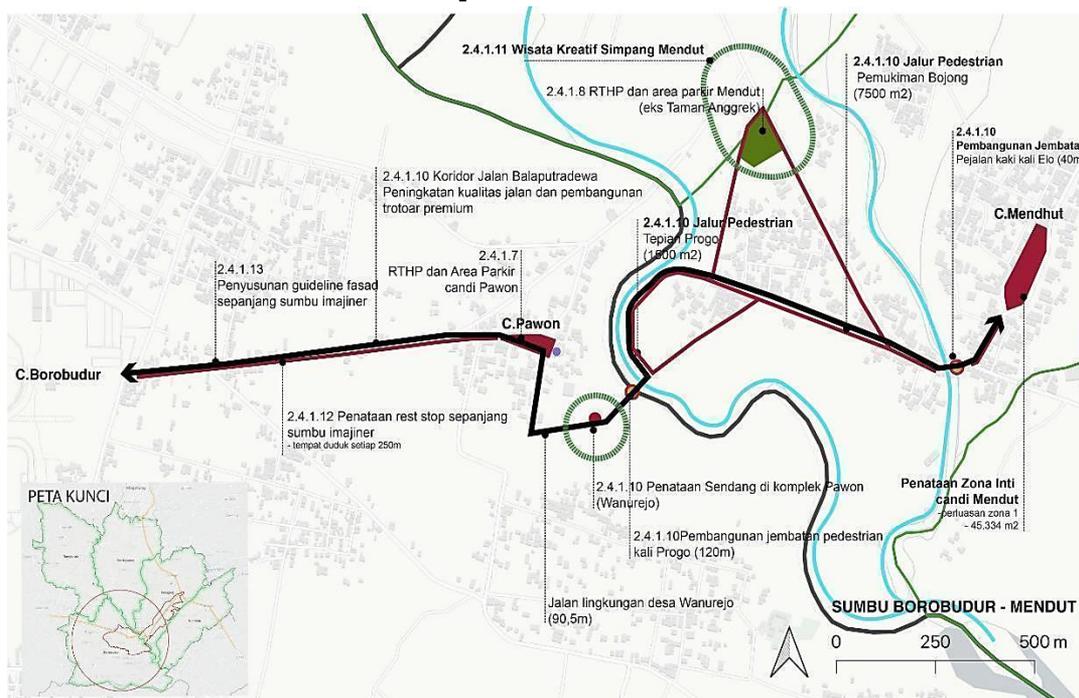
(5) penghijauan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (5) penghijauan di lahan bekas lokasi parkir dan kios pengasong dengan menanam jenis tanaman yang terdapat di relief Candi Borobudur.



Gambar 9. Arahan Penataan Sumbu Borobudur-Pawon-Mendhut.

- Rencana pelaksanaan yang terinci sebagai berikut:
- (1) pengembangan kampung seni di Lapangan Kujon sebagai pengganti area pedagang di parkir zona 2. Lapangan Kujon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata kelola kompleks Candi Borobudur, berada di zona 3 sebagai area yang melindungi zona 1 dan zona 2 untuk Pelestarian Borobudur sebagai warisan budaya dunia. Lapangan Kujon memiliki total luas 10 Ha (sepuluh Hektare), dengan pembagian 2,9 Ha (dua koma sembilan Hektare) milik kas desa, dan sisanya milik pemerintah daerah. Pelaksanaannya telah diawali dengan *Heritage Impact Assessment* (HIA) yang memberi basis data dan informasi yang lebih jelas terkait potensi dampak yang perlu diantisipasi dan dikelola. Hasil HIA akan ditindaklanjuti dengan pemindahan kios-kios pedagang ke Lapangan Kujon. Kantong parkir juga akan dibangun di Lapangan Kujon untuk menampung kendaraan yang masuk ke zona 1 dan zona 2. Pemindahan lokasi parkir dan pedagang juga diarahkan ke Lapangan Desa Tuksongo, area Gerbang

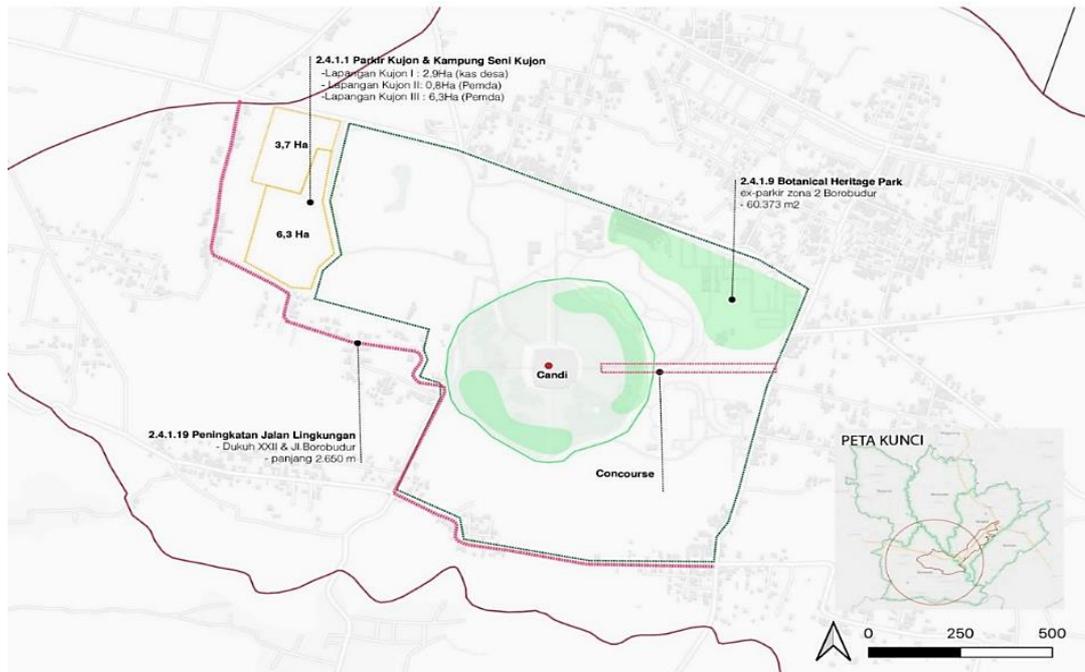
Kembanglimus, . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

- Kembanglimus, serta kawasan anjungan cerdas Palbapang.
- (2) penataan zona 2 Candi Borobudur menjadi Taman Botani. Taman ini berisi jenis-jenis tanaman yang dipahat di relief Candi Borobudur. Pelaksanaannya didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan untuk memberi basis data dan informasi yang lebih jelas terkait potensi dampak yang perlu diantisipasi dan dikelola. Rencana transformasi area parkir di Borobudur menjadi taman botani dapat ditindaklanjuti setelah dilakukan koordinasi yang dimaksud diatas. Pintu masuk utama akan direnovasi dan diintegrasikan dengan area kedatangan kendaraan umum (*shuttle*) yang terhubung ke kantong-kantong parkir, termasuk di Lapangan Kujon. Total luas lahan taman yang akan dikembangkan adalah 6 Ha (enam Hektare).



Gambar 10. Arahlan Pengembangan  
Zona 1 dan Zona 2 Borobudur

- b) Segmen Borobudur-Pawon  
Segmen Borobudur-Pawon mencakup koridor Jalan Balaputradewa yang merupakan bagian jalur ritual, namun saat ini telah berkembang menjadi kawasan perdagangan dan jasa. Beberapa fungsi residensial dan pertanian masih terdapat di sepanjang Jalan Balaputradewa. Rencana penataan kawasan ini

akan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

akan mencakup penataan desain bangunan untuk mempertahankan karakter perdesaan dan bentang pandang alam sekitar lanskap budaya Borobudur yang terkait dengan tradisi masa lalu yang masih hidup sampai sekarang, yaitu cara hidup tradisional masyarakat Jawa. Media interpretasi budaya dapat disediakan di sepanjang jalur pedestrian Borobudur-Pawon-Mendut yang memberi informasi dan pengetahuan tentang kawasan Borobudur, sejarah, dan aspek geologis yang signifikan.

c) Segmen Pawon-Mendut

Segmen Pawon-Mendut melewati Sungai Progo dan Sungai Elo yang didominasi oleh permukiman penduduk. Segmen ini dihubungkan oleh jalur pedestrian yang melalui permukiman di sisi selatan Candi Pawon dan jembatan yang menyeberangi Sungai Progo dan Sungai Elo. Restorasi garis imajiner segmen Pawon-Mendut diarahkan pada penataan jalur-jalur pedestrian berupa:

- (1) penataan lingkungan sekitar Candi Mendut meliputi perluasan lahan, berupa penataan kios pedagang, dan pengalihan arus jalan. Luas total dari area penataan adalah 4,5 Ha (empat koma lima Hektare). Fasilitas yang ditambahkan adalah area parkir mobil dan bus, fasilitas edukasi, dan pengembangan kios.
- (2) penataan lingkungan sekitar Candi Mendut diawali berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan untuk memberi basis data dan informasi yang lebih jelas terkait potensi dampak yang perlu diantisipasi dan dikelola.
- (3) jembatan pedestrian Sungai Elo akan meningkatkan kenyamanan pejalan kaki di sepanjang segmen Pawon-Mendut. Jembatan ini berlokasi di samping jembatan yang sudah ada dengan bahan struktur beton. Jembatan ini memiliki panjang 400 (empat ratus) meter dengan lebar 3 (tiga) meter.
- (4) penataan jalan lingkungan permukiman Bojong sepanjang 1,5 (satu koma lima) kilometer dengan lebar 4 (empat) meter untuk menghubungkan Candi Pawon ke perkampungan penduduk di Dusun Bojong.

(5) pembangunan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

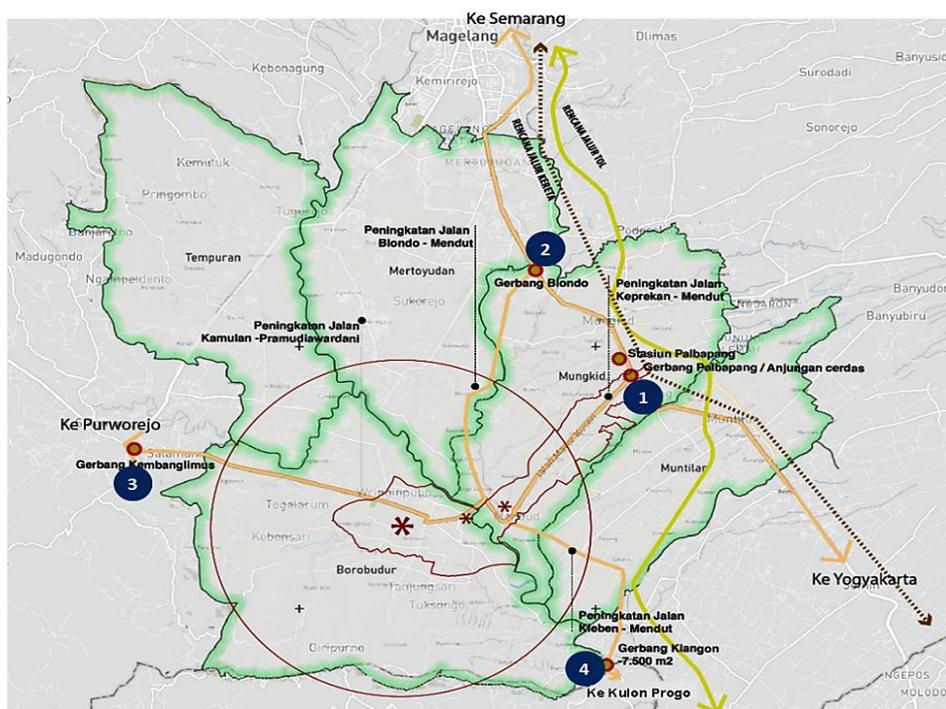
- (5) pembangunan trotoar papan kayu (*boardwalk*) dan Jembatan Sungai Progo sepanjang 120 (seratus dua puluh) meter dengan lebar 2 (dua) meter sebagai jalur religi untuk menghubungkan aksis budaya (sumbu imajiner) antara Candi Borobudur-Mendut-Pawon sesuai dengan *Masterplan Borobudur Archaeological Park (Japan International Cooperation Agency/JICA, 1979)*.
  - (6) penataan jalan lingkungan Desa Wanurejo memiliki keunggulan untuk dijadikan sebagai salah satu DTW, terutama dengan adanya jalur susur sungai Sungai Progo dan keberadaan sendang dan mata air alami. Penataan jalan ini akan difokuskan di tepian Sungai Progo yang terhubung dengan jembatan Sungai Progo.
  - (7) Penataan sendang di komplek Pawon (Wanurejo) telah diawali dengan HIA yang memberi basis data dan informasi yang lebih jelas terkait potensi dampak yang perlu diantisipasi dan dikelola. Tindak lanjut dari hasil HIA yaitu penataan Sendang Wadon, termasuk untuk menjadikan titik ini sebagai kawasan beristirahat untuk jalur ziarah Borobudur-Pawon-Mendut.
- 2) Pintu Masuk 4 (Empat) Gerbang Kawasan
- Kawasan Borobudur memiliki 4 (empat) pintu masuk yang diletakkan di segmen jalur-jalur utama dari Yogyakarta, Semarang, Purworejo, dan Kulon Progo, yaitu:
- a) Gerbang Palbapang dan koridor Mayor Kusen sebagai jalur dari arah Yogyakarta yang dilengkapi vegetasi dan drainase, serta jalur pedestrian Gerbang Palbapang (Gerbang Singa);
  - b) Gerbang dan koridor Blondo sebagai jalur akses dari arah Semarang dilengkapi dengan drainase, serta jalur pedestrian. Gerbang Blondo berbentuk pohon Kalpataru. Gerbang Blondo terletak di sisi utara gerbang Palbapang, yaitu arah menuju Magelang/Semarang terletak di ruas jalan utama Jogja-Magelang;
  - c) Gerbang Kembanglimus dan koridor Salaman sebagai jalur akses dari arah Purworejo dilengkapi jalur lambat/sepeda, drainase, serta jalur pedestrian. Gerbang Kembanglimus terletak di pertigaan Salaman (Patung Diponegoro) dengan memanfaatkan fungsi kawasan beristirahat di lahan embrio kawasan beristirahat di Desa Kembanglimus; dan
  - d) Gerbang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- d) Gerbang dan koridor Klangon sebagai jalur akses dari arah Kulon Progo dilengkapi dengan kawasan beristirahat, drainase, serta jalur pedestrian. Gerbang Klangon berbatasan dengan Kulon Progo dan berbentuk kapal Samudraraksa dan terletak di atas Sungai Progo.



Gambar 11. Pintu Masuk 4 (Empat) Gerbang Kawasan

### 3) Kantong Parkir dan Transit Multifungsi

Pemindahan kantong parkir beserta kios pedagang di dalamnya membutuhkan alokasi lahan 4.000 (empat ribu) meter persegi. Kantong-kantong parkir yang baru ini akan terintegrasi dengan fasilitas *shuttle* kendaraan menuju candi dan dapat dikembangkan melewati desa-desa wisata dan Balai Ekonomi Desa.

Arahan penataan transportasi dan lokasi parkir untuk kawasan Borobudur antara lain: mengembangkan kawasan transit multifungsi (pusat cendera mata, kuliner, parkir, dan kebugaran), anjungan cerdas di Kabupaten Magelang (Palbapang), dan mengembangkan Kampung Seni Terpadu Kujon yang menampung pedagang-pedagang yang direlokasi dari zona 2 Candi Borobudur.

Penataan ini dilengkapi dengan penataan kios pedagang, pembuatan toilet umum, peletakan rambu dan kursi-kursi di area pejalan, dan penataan plaza pedestrian yang terhubung dengan Jalan Pramudyawardhani serta

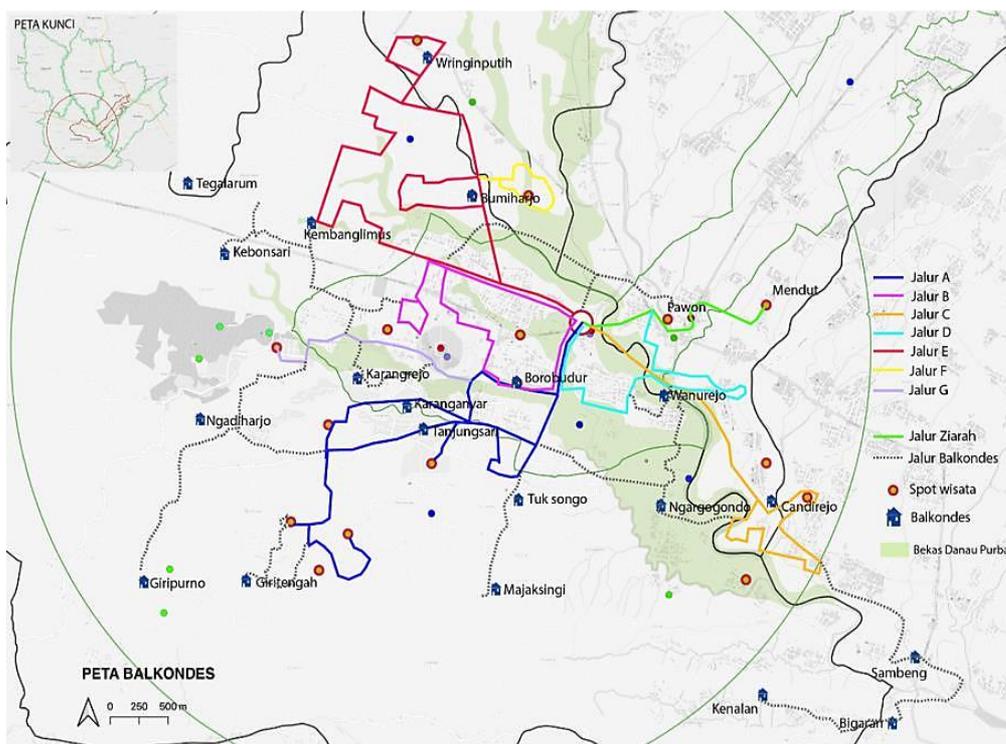
Pasar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Pasar Borobudur. Penataan ini juga akan disertai dengan pemberdayaan desa-desa untuk mengembangkan potensi-potensi desa sehingga mampu mensejahterakan masyarakat desa. Saat ini sudah terbangun 20 (dua puluh) Balai Ekonomi Desa di wilayah Kecamatan Borobudur. Wisatawan dapat memperoleh informasi pada setiap Balai Ekonomi Desa sesuai dengan tema yang ada. Layanan ini akan berkontribusi untuk diversifikasi atraksi dan diharapkan akan membantu pengelolaan arus pengunjung ke candi.



Gambar 12. Arahlan Pengembangan Jalur Desa Wisata dan Balai Ekonomi Desa

4) Pelestarian Bekas Danau Purba

Penataan di lokasi danau ini perlu mempertimbangkan banyaknya bangunan komersial yang berdiri di atasnya, mengingat lokasi yang strategis. Penataan untuk kawasan ini diarahkan untuk:

- a) menjaga bentuk danau dengan mempertahankan fungsi pertanian;
- b) mengembalikan varietas tanaman pangan lokal dan mengembangkan produk olahan lokal; dan
- c) menata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rencana Tata Ruang KSN Kawasan Borobudur dan sekitarnya, dengan himbauan untuk:

(1) tampilan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- (1) tampilan bangunan tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya;
- (2) jika ada pengecatan pelindungan, seperti lapisan anti-karat, harus menggunakan warna yang mengarah ke warna tanah;
- (3) menanam lebih banyak vegetasi dengan pilihan yang diupayakan sesuai dengan tanaman yang ada di relief dan tanaman yang tumbuh di kawasan Borobudur;
- (4) menanam minimal 1 (satu) pohon tajuk besar di sekitar bangunan per 16 (enam belas) meter persegi; dan
- (5) menutupi atap bangunan supaya lanskap dan tampak dari udara tetap hijau dengan beberapa alternatif berikut:
  - (a) menambahkan tanaman rambat untuk menutupi atap; dan
  - (b) memberi warna atap bangunan dengan warna gelap dan tidak mengkilap supaya tidak tampak mencolok dari Candi Borobudur.

Selain penataan KSN Borobudur, arah penataan beberapa potensi kawasan wisata di sekitar KTA Borobudur antara lain mencakup:

- a) pembenahan obyek-obyek wisata candi di Kabupaten Magelang seperti Candi Asu Sengi, Candi Ngawen, Candi Lumbung, Candi Retno, Candi Selogriyo, Candi Gunung Wukir, Candi Gunungsari, Candi Losari, Candi Pendem, Candi Batur, Situs Brongsongan, Situs Plandi, Situs Dipan, Situs Samberan, Situs Bowongan, dan Makam Kerkop Mendut;
- b) pembenahan infrastruktur jalan yang menghubungkan antar candi yang berada di Kabupaten Magelang;
- c) pengembangan wisata alam Sambak-Kajoran, Kaliangkrik, Bukit Gunung Gono, Air Terjun Kedung Kayang, dan Ketep Pass;
- d) peningkatan infrastruktur jalan yang menghubungkan antar destinasi di kawasan Menoreh; dan
- e) pembenahan objek DTW di sebelah selatan Candi Borobudur yang berada di kawasan Pegunungan Menoreh Kabupaten Kulon Progo, antara lain Puncak Suroloyo, Gua Maria Sendangsono, Gua Kiskendo, Kalibiru, Perkebunan Teh Nginggo, untuk mendistribusikan wisatawan yang datang melalui YIA.

b. Rencana . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

b. Rencana Pengembangan KTA Yogyakarta

Pengembangan KTA Yogyakarta akan difokuskan pada tema Wisata Sejarah Berwawasan Budaya, yang mengikuti perkembangan zaman dan Pariwisata berkelanjutan. KTA Yogyakarta digolongkan dalam 5 (lima) bagian, yaitu Pariwisata campuran, amenities, aktivitas Pariwisata budaya utama, aktivitas wisata urban berwawasan lingkungan, dan permukiman yang terintegrasi dengan aktivitas Pariwisata. Penetapan lokasi didasarkan pada kelompok atraksi dan aktivitasnya sebagai berikut:

- 1) Pariwisata budaya utama Panggung Krapyak;
- 2) permukiman tema khusus Kampung Mijen;
- 3) Pariwisata Campuran Plengkung Gading-Panggung Krapyak;
- 4) amenities tema khusus Kraton;
- 5) Pariwisata Perkotaan Berwawasan Lingkungan Kali Code;
- 6) Pariwisata Budaya Utama Kraton;
- 7) amenities Tema Khusus Taman Sari;
- 8) amenities Terminal Ngabean;
- 9) Pariwisata Perkotaan Berwawasan Lingkungan Kali Winongo;
- 10) Pariwisata Campuran Margo Utomo-Kotabaru dan Malioboro-Margamulya-Pakualaman;
- 11) amenities Stasiun Tugu;
- 12) amenities Terminal Jombor dan Condong Catur;
- 13) Permukiman Kotagede;
- 14) Pariwisata Budaya Utama Kotagede;
- 15) amenities Adisucipto;
- 16) Pariwisata Perkotaan Berwawasan Lingkungan Kali Gajah Wong;
- 17) amenities Terminal Giwangan; dan
- 18) Pariwisata Perkotaan Berwawasan Lingkungan Tegalrejo.

Fokus pengembangan dalam setiap tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pada tahap pertama akan dipusatkan pada:
  - a) Pariwisata Campuran Plengkung Gading-Panggung Krapyak;
  - b) amenities Tema Khusus Kraton;
  - c) Pariwisata Budaya Utama Kraton;
  - d) amenities Tema Khusus Taman Sari;
  - e) amenities Terminal Ngabean;
  - f) Pariwisata Perkotaan Berwawasan Lingkungan Kali Winongo;
  - g) Pariwisata Campuran Margo Utomo-Kotabaru dan Malioboro-Margamulya-Pakualaman;
  - h) Pariwisata Budaya Utama Kotagede;

i) Pariwisata . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- i) Pariwisata Perkotaan Berwawasan Lingkungan Kali Gajah Wong; dan
  - j) Pariwisata Perkotaan Berwawasan Lingkungan Tegalrejo.
- 2) Pengembangan pada tahap kedua dan tahap ketiga akan dilanjutkan mencakup:
- a) Pariwisata Budaya Utama Panggung Krapyak;
  - b) pemukiman Tema Khusus Kampung Mijen;
  - c) Pariwisata Perkotaan Berwawasan Lingkungan Kali Code;
  - d) Pariwisata Budaya Utama Kraton,
  - e) amenities Stasiun Tugu;
  - f) pemukiman Kotagede; dan
  - g) amenities Terminal Giwangan.
- 3) Pengembangan pada tahap keempat dan tahap kelima akan dipusatkan pada:
- a) amenities Terminal Jombor dan Condongcatur; dan
  - b) amenities Adisucipto.

KTA Yogyakarta terbagi menjadi 3 (tiga) Sub KTA yaitu Sub KTA Sumbu Filosofi, Sub KTA Kotagede, dan Sub KTA Gajah Wong EcoDistrict. 2 (dua) Sub KTA di antaranya, yaitu Sumbu Filosofi dan Kotagede merupakan kawasan bersejarah tertua di dalam KTA Yogyakarta yang telah ada sejak abad ke-17 dan ke-18. Pembagian Sub KTA Sumbu Filosofi dan Sub KTA Kotagede selanjutnya akan berkembang ke arah Kabupaten Bantul, secara spesifik daerah Kerto, Pleret, dan Imogiri sebagai daerah bersejarah yang terintegrasi dalam sejarah kerajaan Mataram Islam.

1) Sub KTA Sumbu Filosofi

Sub KTA Sumbu Filosofi terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan utama yaitu: Gedongtengen, Danurejan, Ngampilan, Mergangsan, Gondokusuman, Gondomanan, Kraton, Jetis, Mantrijeron, Pakualaman, dan Sewon yang berkedudukan di Bantul. Penambahan kecamatan ini untuk meningkatkan kesatuan sebagai kawasan budaya dalam sumbu Filosofi, seperti misalnya Panggung Krapyak yang berada di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dan Monumen Tugu yang berada di Kecamatan Jetis. Pada Sub KTA Sumbu Filosofi yang diutamakan dalam pengembangannya adalah 4 (empat) bagian yang mengacu

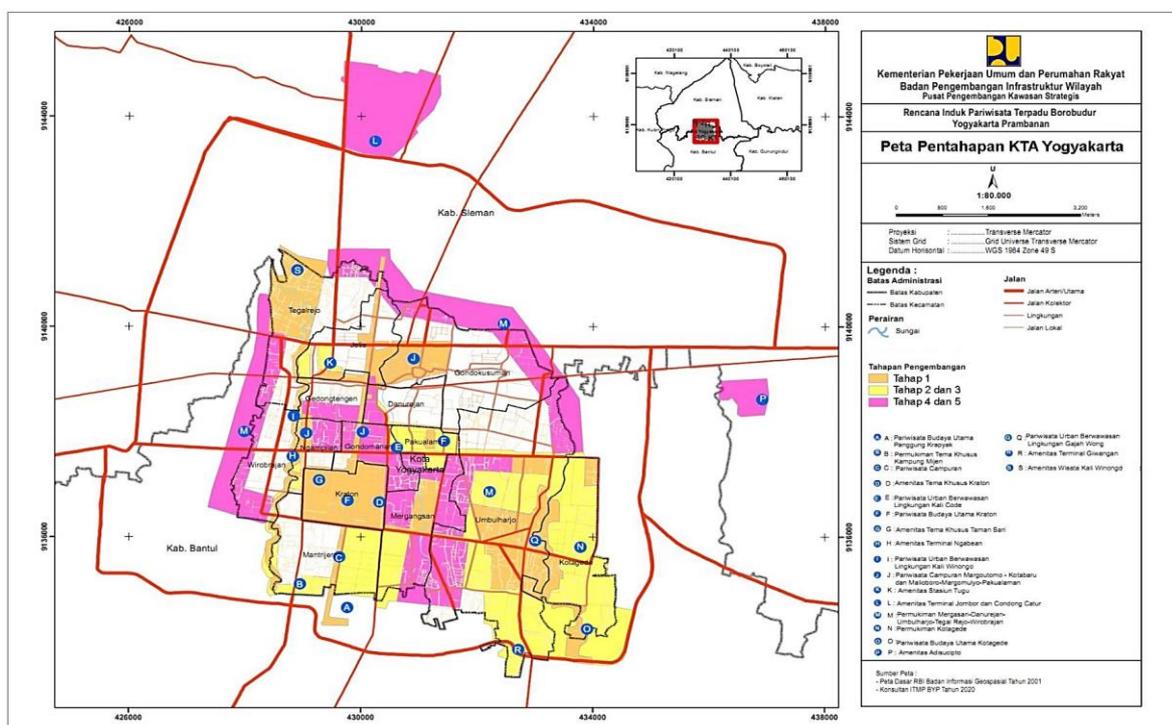
pada . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

pada *Dossier Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historical Landmarks* yang disiapkan untuk UNESCO, yaitu:



Gambar 13. Arahan Pengembangan KTA Yogyakarta

a) Plengkung Gading-Panggung Krpyak

Fokus pengembangannya adalah: “citra gerbang selatan wisata Sumbu Filosofi” yang memiliki aset cagar budaya (Panggung Krpyak), ruang kota yang teduh, ramah pedestrian, dan penuh informasi tentang sejarah Sumbu Filosofi. Rencana pengembangannya meliputi:

- (1) adaptasi bangunan cagar budaya Panggung Krpyak dan area sekelilingnya, penataan pedestrian utama kawasan segmen Plengkung Gading-Panggung Krpyak, pembuatan hutan mini, dan pusat pengunjung Panggung Krpyak yang didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan;
- (2) pengembangan Kampung Mijen dan Niti Gedongkiwo;
- (3) pengembangan dan penataan lahan parkir Lapangan Patmasuri serta pengembangan dan penataan lahan parkir Lapangan Panggungharjo;
- (4) renovasi dan penataan area Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY);
- (5) penataan lingkungan Kawasan Prawirotaman;

(6) penataan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- (6) penataan Lapangan Minggiran; dan
  - (7) penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Winongo segmen Plengkung Gading-Panggung Krapyak dan Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Code segmen Plengkung Gading-Panggung Krapyak.
- b) Kraton
- Fokus pengembangan adalah: “wisata yang berfokus pada dialog budaya dan simulasi seni, budaya, dan tradisi lokal”, yang difasilitasi melalui penyelenggaraan *event* tradisional-kebudayaan dan berbagai *workshop* yang melibatkan masyarakat. Rencana pelaksanaannya didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan; meliputi:
- (1) revitalisasi kawasan cagar budaya Kraton;
  - (2) adaptasi eks Stasiun Ngabean;
  - (3) revitalisasi Kampung Panembahan;
  - (4) revitalisasi Kampung Wisata Tamansari dan Kampung Wisata Kadipaten;
  - (5) revitalisasi Kampung Wisata Kauman;
  - (6) revitalisasi Jalan Senopati;
  - (7) revitalisasi taman parkir Senopati;
  - (8) pengembangan lahan parkir Terminal Ngabean;
  - (9) adaptasi bangunan dan interior Museum Sonobudoyo;
  - (10) pengembangan akses dan jalan Taman Sari dan Kraton; dan
  - (11) pembuatan konten video 360 dan *virtual reality* segmen Kraton (titik Plengkung Nirbaya Gading).
- c) Malioboro-Margamulya
- Arahan penataan adalah: “wisata yang berfokus pada kegiatan kuliner dan belanja benda-benda kerajinan tangan”, yang dikembangkan sebagai wisata yang menyeluruh. Rencana pelaksanaannya meliputi:
- (1) pengembangan area campuran eks Bioskop Indra;
  - (2) revitalisasi kawasan cagar budaya Pakualaman yang didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan;
  - (3) pengembangan Kampung Wisata Suryatmajan dan Kampung Wisata Sosromenduran;
  - (4) pengembangan Kampung Ratmakan;
  - (5) revitalisasi Kawasan Kampung Ketandan yang didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan;

(6) pengembangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- (6) pengembangan Kampung Bakpia-Pathuk/Ngampilan;
- (7) pedestrianisasi segmen Malioboro-Margamulya yang didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan;
- (8) pengembangan tempat khusus parkir Pasar Sore;
- (9) pengembangan lahan parkir eks Universitas Pembangunan Nasional;
- (10) pengembangan Jalan KH. Ahmad Dahlan;
- (11) konstruksi bangunan dan interior Jogja Planning Gallery yang didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan; dan
- (12) pengembangan wisata *virtual* segmen Malioboro-Margamulya.

d) Margo Utomo

Arahan penataan difokuskan pada pengembangan “citra gerbang utara wisata Sumbu Filosofi”. Warga/masyarakat kampung menjadi subyek utama wisata Sumbu Filosofi ini sehingga pengembangan kampung dan masyarakatnya menjadi rencana aksi penting dalam penataan kawasan ini. Perencanaannya juga akan didukung dengan pengembangan Kawasan Jetis dan revitalisasi kawasan cagar budaya Kotabaru yang didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan. Programnya akan meliputi:

- (1) pengembangan Kawasan Jetis;
- (2) revitalisasi kawasan cagar budaya Kotabaru yang didahului dengan kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) revitalisasi area *mix-used* Stasiun Tugu;
- (4) pengembangan Kampung Jogoyudan;
- (5) pengembangan Kampung Wisata Cokrodiningratan;
- (6) pedestrianisasi segmen Margo Utomo;
- (7) penataan Pasar Kranggan dan sekitarnya;
- (8) pengembangan potensi lahan parkir serta RTH segmen Margo Utomo; dan
- (9) pengembangan wisata *virtual* segmen Margo Utomo.

2) Sub KTA Kotagede

Sub KTA Kotagede mencakup kawasan cagar budaya Kotagede. Sub KTA ini beririsan dengan Sub KTA Gajah Wong EcoDistrict. Namun tujuan pengembangan kedua Sub KTA

memiliki . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

memiliki orientasi yang berbeda. Orientasi pengembangan Sub KTA Kotagede adalah kebudayaan dan Sub KTA Gajah Wong EcoDistrict adalah pengembangan kawasan ekologis yang terintegrasi.

Penataan Kotagede *Greater Area*, meliputi:

- a) pembangunan Kawasan DAS Gajah Wong;
- b) peningkatan keterhubungan Kawasan Kotagede dengan Sub KTA Gajah Wong EcoDistrict;
- c) penataan Kotagede Complex Shuttle Service;
- d) pengadaan fasilitas informasi situs di kawasan cagar budaya Kotagede; dan
- e) Penataan pusat Kotagede, meliputi:
  - (1) penataan pedestrianisasi jalan utama di dalam zona inti;
  - (2) adaptasi Cepuri keliling Kotagede;
  - (3) penataan halaman Masjid Kotagede;
  - (4) revitalisasi Pasar Kotagede/Pasar Legi;
  - (5) revitalisasi kampung alun-alun; dan
  - (6) revitalisasi Kawasan Kedaton dan Watu Gilang.

Penataan Koridor Jalan Mondorakan, Koridor Jalan Karanglo, dan Koridor Tegalgendu, meliputi:

- a) pembangunan Museum Perak dan Museum Kotagede sebagai pusat informasi kawasan di Rumah Kalang Tegalgendu;
- b) pedestrianisasi dan penataan fasad bangunan di Jalan Mondorakan;
- c) adaptasi bangunan cagar budaya Kelurahan Purbayan;
- d) adaptasi bangunan cagar budaya Kelurahan Jagalan; dan
- e) pelestarian objek pemajuan kebudayaan di Kelurahan Jagalan.

Penataan Koridor Nyi Pembayun, meliputi:

- a) revitalisasi Lapangan Karang; dan
- b) adaptasi bangunan cagar budaya Kelurahan Prenggan.

Penataan Kampung Desa Singosaren, meliputi:

- a) adaptasi Jagang Selatan: Pembangunan Embung Mataram;
- b) penyediaan gedung parkir Lapangan Singosaren;
- c) ekstensifikasi Pasar Singosaren; dan
- d) pelestarian objek pemajuan kebudayaan di Kampung Joyopranan.

3) Sub KTA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

3) Sub KTA Gajah Wong EcoDistrict

Pengembangan EcoDistrict menggabungkan modalitas budaya dengan pola aktivitas berwawasan lingkungan yang seimbang. Kawasan pertama yang ditata adalah kawasan Kali Gajah Wong, seluas kurang lebih 215 Ha (dua ratus lima belas Hektare) dengan mengangkat tema: kawasan percontohan wisata masa depan yang mengakar dalam budaya dan lestari (*sustainable and ecological*). Adapun rencana pengembangannya sebagai berikut:

- a) penataan area parkir *XT Square*;
- b) penataan *green transportation nodes*;
- c) penataan Taman Pintar 2: *Aquatic Art Tech Park*;
- d) pembuatan talud di sepanjang Kali Gajah Wong yang masuk ke dalam EcoDistrict;
- e) pembuatan *pilot project* Kawasan EcoDistrict Skala Kampung;
- f) pembangunan Gajah Wong *Learning Center*;
- g) pembangunan percontohan pedestrian Jalan Pramuka; dan
- h) pembangunan kawasan hijau Kali Gajah Wong.

c. Rencana Pengembangan KTA Prambanan

Penataan KTA Prambanan mengambil tema “Penguatan Karakter Kawasan Kota Kuno Prambanan Secara Holistik”. Pengembangan KTA Prambanan (Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman) akan berfokus pada pengendalian pertumbuhan kawasan perkotaan dalam kawasan cagar budaya, penataan kawasan candi dan kawasan di sekitarnya sesuai dengan sejarah masa lampau, pemanfaatan ruang yang harmoni dengan pelestarian peninggalan arkeologis, penguatan karakter permukiman perdesaan, serta pelibatan masyarakat dalam pelestarian candi dan peningkatan ekonomi lokal secara holistik.

Secara spesifik pengembangan di KTA Prambanan dilakukan dengan tujuan:

- 1) menyusun rencana pengelolaan pengunjung (*visitor management plan*) untuk Kompleks Candi Prambanan yang mengatur penyebaran arus pengunjung mulai dari Candi Prambanan hingga Candi Sewu, termasuk museum dan *botanical heritage park*.
- 2) mengurai pengunjung KTA Prambanan yang sebelumnya hanya terpusat di Kompleks Candi Prambanan dan Situs Ratu Boko ke arah percandian di dalam Kawasan Cagar Budaya Nasional Prambanan yang tersebar di area Bugisan, Kalasan, dan Bokoharjo;

3) mengembangkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

- 3) mengembangkan jalur bersepeda terintegrasi dan *shuttle bus* yang menghubungkan seluruh candi yang disertai dengan pemerataan area-area amenities seperti pondok wisata, usaha kuliner dan kerajinan tangan ke sebagian besar wilayah KTA Prambanan, yang sebelumnya hanya terpusat pada Jalan Raya Solo-Prambanan;
- 4) menyebarkan pengunjung ke tipe wisata lain seperti desa-desa wisata dan wisata berbasis alam; dan
- 5) menyebarkan pengunjung ke berbagai KSPN potensial lainnya seperti KSPN Gunung Merapi, KSPN Karimunjawa, KSPN Klaten dan Solo, KSPN Wonogiri, KSPN Gunung Nglanggeran, dan KSPN Imogiri yang saat ini belum dikembangkan dengan optimal.

KTA Prambanan dan sekitarnya (Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman) mencakup 10 (sepuluh) bagian berdasarkan kelompok atraksi dan aktivitasnya, yaitu:

- 1) Pariwisata budaya utama Prambanan-Bugisan;
- 2) Pariwisata budaya utama Bokoharjo;
- 3) Pariwisata budaya utama Kalasan;
- 4) amenities-segmen Jalan Raya Solo-Prambanan;
- 5) amenities-segmen Jalan Opak-Bokoharjo;
- 6) permukiman-Bugisan dan Kalasan;
- 7) permukiman-Bokoharjo;
- 8) Pariwisata berbasis alam-Bugisan;
- 9) Pariwisata berbasis alam-Bokoharjo; dan
- 10) Pariwisata berbasis alam-Sungai Opak.

Pengembangan KTA Prambanan dalam setiap tahapan sebagai berikut:

- 1) pengembangan pada tahap pertama dipusatkan pada:
  - a) Pariwisata Budaya Utama di Kompleks Candi Prambanan dan Pariwisata Budaya Utama Kalasan;
  - b) permukiman-Bugisan dan Kalasan; dan
  - c) amenities utama yaitu Stasiun Brambanan dan koneksi transportasi publik.
- 2) pengembangan pada tahap kedua dan tahap ketiga akan dilanjutkan pada:
  - a) Pariwisata Budaya Utama Bokoharjo;
  - b) amenities Jalan Solo;
  - c) permukiman Bugisan dan Kalasan;
  - d) permukiman Bokoharjo; dan
  - e) Pariwisata Berbasis Alam Bokoharjo.
- 3) pengembangan pada tahap keempat dan kelima akan dipusatkan pada:
  - a) amenities tambahan di Jalan Opak-Bokoharjo; dan
  - b) Pariwisata Berbasis Alam Sungai Opak dan Bugisan, kemudian pengembangan bergerak ke arah Klaten, Wonogiri, dan Area Gunung Nglanggeran.

Khusus . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

Khusus KTA Prambanan, pengembangannya diarahkan untuk:

- 1) menguatkan OUV Kompleks Candi Prambanan;
- 2) melestarikan situs-situs di Kawasan Cagar Budaya Nasional Prambanan; dan
- 3) mengembangkan amenities dan atraksi wisata termasuk desa-desa wisata di Prambanan sisi Klaten dan sisi Sleman yang didahului kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam KTA Prambanan akan dilakukan penataan, berupa:

- 1) Budaya Utama Prambanan-Bugisan

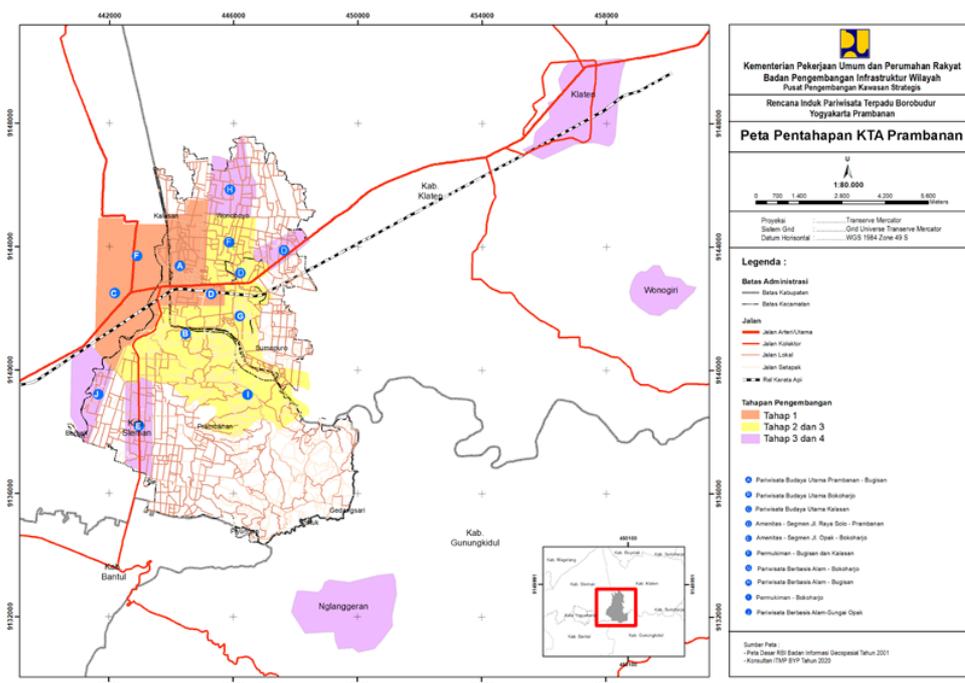
Keberadaan komplek Candi Prambanan dan candi-candi lain di kawasan Bugisan menjadikan kawasan ini sangat berkembang secara ekonomi. Penataan akan difokuskan pada penyeimbangan antara aktivitas wisata budaya dan interpretasi, religi (candi), edukasi (museum), dan rekreasi (taman).

- 2) Budaya Utama Bokoharjo

Penataan difokuskan pada candi-candi yang sebagian tersebar di area permukiman dan paling banyak di area perbukitan dengan tujuan untuk mempertahankan bentang pandang ke arah Kompleks Candi Prambanan dan Gunung Merapi.

- 3) Budaya Utama Kalasan

Penataan difokuskan pada candi-candi yang ada di Kalasan yang cukup tersebar. Candi Kalasan berada sangat dekat dengan Jalan Raya Solo-Prambanan, Candi Sari terdapat di tengah-tengah permukiman, sementara Candi Kedulan berada di tengah lahan hijau.



Gambar 14. Arahan Pengembangan KTA Prambanan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

## B. Pembangunan DTW

### 1. Pembangunan DTW KTA Borobudur

Pembangunan DTW di KTA Borobudur secara umum diarahkan untuk memperkuat pasar yang dominan saat ini yaitu wisatawan nusantara dan meningkatkan kualitas destinasi-destinasi tertentu yang mengarah pada segmen wisatawan mancanegara. Pengembangan DTW KTA Borobudur dan sekitarnya secara spesifik diarahkan sebagai berikut:

- a. pembangunan DTW warisan budaya dengan pelestarian, penguatan interpretasi dan pengelolaan pengunjung, serta peningkatan kapasitas masyarakat terkait pelaksanaan Sapta Pesona di Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Selogriyo, dan Candi Ngawen;
- b. pembangunan DTW alam dengan peningkatan aksesibilitas, penataan area, dan peningkatan kapasitas pengelolaan oleh kelompok masyarakat di Kawasan Air Terjun Curug Silawe, Air Terjun Kedung Kayang, Air Terjun Sekarlangit, Air Terjun Sumuran Seloprojo, Punthuk Setumbu, Telaga Bleder, Pemandian Air Hangat Candi Umbul, Bukit Rhema (Gereja Ayam), Curug Delimas, Bukit Baredo, Punthuk Mondrong, Susur Sungai Elo, dan Punthuk Mangir Gunung Payung;
- c. pembangunan DTW buatan dengan penataan kawasan dan peningkatan kualitas atraksi dan amenitas di Taman Rekreasi Mendut yang didahului dengan kajian dan Pemandian Air Hangat Candi Umbul;
- d. pembangunan DTW buatan dalam rangka penyelenggaraan *event* dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan, peningkatan kapasitas masyarakat terkait pelaksanaan sapta pesona pada *event* Borobudur Marathon, Perayaan Trisuci Waisak, Festival Telaga Bleder, Gelar Budaya Wanurejo, Festival Kali Elo, dan Festival Makanan Djadoel; dan
- e. pembangunan DTW pedesaan di 20 (dua puluh) desa wisata dengan perbaikan aksesibilitas, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan organisasi pengelola, pengembangan interpretasi Borobudur, dan pelatihan tuturan cerita.

### 2. Pembangunan DTW KTA Yogyakarta

DTW di KTA Yogyakarta terdiri dari DTW berbasis budaya dan bangunan cagar budaya serta buatan. Sebagian besar DTW memiliki segmen wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, sementara DTW buatan lebih banyak diminati oleh wisatawan nusantara. Pembangunan DTW ke depan diselaraskan dengan misi pembangunan KTA Yogyakarta yang mengangkat tema Sumbu Filosofi. Pembangunan DTW KTA Yogyakarta secara spesifik diarahkan sebagai berikut:

- a. Pembangunan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

- a. Pembangunan DTW warisan budaya dan sejarah dengan peningkatan kualitas pemeliharaan bangunan, penataan kawasan, penguatan OUV Sumbu Filosofi, perluasan area pedestrian, serta penataan dan pengelolaan pengunjung. DTW yang akan dikembangkan adalah: Kraton Yogyakarta, Taman Sari, Pagelaran Kraton, Kawasan Indis Kotabaru-Kridosono, Panggung Krapyak, Kawasan Malioboro sebagai bagian dari Sumbu Filosofi, Museum Sonobudoyo, Museum Sasmitaloka Pangsar Soedirman, Museum Taman Siswa Dewantara Kirti Griya, Museum Sasana Wiratama Pangeran Diponegoro, Museum Pusat Dharma Wiratama, Museum Perjuangan, Museum Kereta Kraton, Museum Benteng Vredeborg, Museum Biologi Universitas Gadjah Mada, Museum Puro Pakualaman, Museum Batik Sulaman, Istana Gedung Agung, Makam Raja Mataram, Kraton Kotagede, Museum Bahari, dan Museum Sandi;
  - b. Pembangunan DTW buatan dengan revitalisasi dan penataan area Purawisata dan peningkatan kapasitas pemeliharaan di Kebun Plasma Nutfah, Gembira Loka, Taman Pintar, dan Jogja Gallery;
  - c. Pembangunan DTW buatan kampung wisata di beberapa lokasi yaitu Dipowinatan, Purbayan, Prenggan, Tamansari, Kauman, Kadipaten, Pandeyan, Becak Maju, Rejowinangun, Pakualaman, Cokrodiningratan, Warungboto, Sosromenduran, Dewa Bronto Brontokusuman, Tahunan, Jogoyudan, Ratmakan, Suryatmajan, Panembahan, dan Pathuk; dan
  - d. Pembangunan DTW atraksi wisata di Sub KTA Kotagede dan Sumbu Filosofi yang didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan.
3. Pembangunan DTW KTA Prambanan
- KTA Prambanan memiliki objek warisan budaya dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan KTA Borobudur yang hanya berjumlah 5 (lima) candi. Saat ini telah dikembangkan setidaknya 13 (tiga belas) candi baik untuk pelestarian maupun penguatan interpretasi atas masing-masing candi. Segmen pasar bagi DTW warisan budaya ini diarahkan pada wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Di luar daerah tujuan wisata budaya juga terdapat destinasi alam dan buatan. Keduanya sebagian telah dikembangkan dan sebagian lainnya belum dikembangkan. Pembangunan DTW di KTA Prambanan secara khusus diarahkan sebagai berikut:
- a. pembangunan DTW berbasis budaya dan sejarah dengan pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya serta peningkatan kualitas pemeliharaan, penataan dalam rangka penguatan OUV, dan peningkatan kualitas interpretasi di beberapa lokasi yaitu Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Ijo, Candi Banyunibo, Candi Barong, Situs Ratu Boko, Candi Dawangsari, Candi Gupolo, Candi Kedulan, Candi Sari, Candi Gana, Candi Sojiwan, dan Candi Plaosan;

b. peningkatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

- b. peningkatan kualitas pemeliharaan dan pemantauan, peningkatan kualitas atraksi, dan peningkatan kualitas pengelolaan destinasi di Kompleks Candi Prambanan dan *Botanical Heritage Park* yang didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan serta pembangunan DTW buatan di Tebing Breksi yang didahului penyusunan dokumen kajian.
- c. pembangunan DTW berbasis alam yaitu:
  - 1) Susur Sungai Opak dengan pengembangan atraksi wisata sungai dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk pengelolaan atraksi;
  - 2) Cagar Alam Bukit Ijo dengan pengembangan gardu pandang, jalur setapak, jalur menuju candi-candi, pengembangan atraksi pemanfaatan alam dan juga penyediaan amenities non-permanen, serta peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk pengelolaan atraksi; dan
  - 3) Agrowisata Bukit Bugisan dengan pengembangan gardu pandang, jalur setapak, insentif bagi petani untuk pengembangan agrowisata, dan peningkatan kapasitas petani agro untuk mengelola agrowisata.
- d. pembangunan DTW buatan berupa 22 (dua puluh dua) desa wisata, 6 (enam) desa wisata berasal dari Prambanan Sleman dan sisanya 16 (enam belas) desa wisata berasal dari Prambanan Klaten.

**C. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata**

Kawasan Candi Borobudur dan destinasi wisata di sekitarnya dikembangkan dengan simpul-simpul transportasi yang terhubung secara regional Joglosemar dan mempunyai aksesibilitas yang baik ke destinasi wisata lain di Kawasan Cagar Budaya Nasional Prambanan dan Kota Yogyakarta. Prasarana jalan yang menghubungkan simpul transportasi di wilayah Joglosemar dengan daerah tujuan wisata di Borobudur, Prambanan, dan Yogyakarta sebagai berikut:

1. Koridor Jalan Nasional Semarang–Bawen–Magelang dan Yogyakarta;
2. Koridor Jalan Nasional Solo–Yogyakarta–Wates–Kulon Progo;
3. Koridor Jalan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Koridor Jalan Kabupaten Magelang, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Klaten;
5. Koridor Jalan Kota Yogyakarta;
6. Koridor Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulon Progo; dan
7. Koridor Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C, dan jalan Tol Semarang Bawen.

Rencana pembangunan aksesibilitas Pariwisata di masing-masing KTA diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

1. Pembangunan Aksesibilitas KTA Borobudur

Konektivitas jalan menuju KTA Borobudur saat ini ditempuh melalui pintu gerbang utama di Kawasan Joglosemar menuju destinasi dengan kendaraan pribadi yang memerlukan waktu 2,5 (dua koma lima) jam dari Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, 2 (dua) jam dari Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo, dan 1,5 (satu koma lima) jam dari YIA Kulon Progo. Konektivitas ini ditingkatkan melalui pembangunan aksesibilitas yang didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan mencakup:

- a. pembangunan infrastruktur jalan dari bandar udara, pelabuhan, serta kota-kota besar di sekitar tempat kegiatan wisata;
- b. peningkatan jaringan jalan di Kabupaten Magelang untuk mendukung aktivitas Pariwisata dengan aksesibilitas transportasi publik dari Terminal Borobudur;
- c. peningkatan jalan di Kabupaten Magelang ruas Borobudur-Pakem sebagai penghubung kawasan parkir;
- d. perbaikan jembatan di Kabupaten Magelang sebagai penghubung kawasan Candi Borobudur dengan Balai Ekonomi Desa;
- e. pengembangan akses eksternal berupa jalan nasional dan jalan provinsi; dan
- f. peningkatan fasilitas akses internal pada KTA Borobudur dengan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan jalan pada koridor jalan kabupaten sebagai penghubung antar destinasi wisata di wilayah BYP.

2. Pembangunan Aksesibilitas KTA Yogyakarta

KTA Yogyakarta memiliki 47 (empat puluh tujuh) ruas jaringan jalan yang mendukung aktivitas Pariwisata. Rencana pembangunan aksesibilitas di 47 (empat puluh tujuh) ruas ini mencakup:

- a. pembangunan infrastruktur jalan dari bandar udara, pelabuhan, serta kota-kota besar di sekitar tempat kegiatan wisata;
- b. pengembangan konsep penataan pedestrian di kawasan cagar budaya Kotagede dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah atau instansi yang menangani urusan bidang kebudayaan;
- c. peningkatan manajemen transportasi untuk pengembangan keselamatan transportasi jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di ruas Klangan-Tempel;
- d. percepatan pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta;
- e. pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo;
- f. pengembangan akses eksternal berupa jalan nasional dan jalan provinsi; dan
- g. peningkatan fasilitas akses internal pada KTA Yogyakarta dengan meningkatkan kualitas layanan jalan pada koridor jalan kabupaten sebagai penghubung antar destinasi wisata di wilayah BYP.

3. Pembangunan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

3. Pembangunan Aksesibilitas KTA Prambanan

Pembangunan aksesibilitas untuk wilayah KTA Prambanan mencakup:

- a. pembangunan infrastruktur jalan dari dan menuju bandar udara, pelabuhan, serta kota-kota besar di sekitar tempat kegiatan wisata;
- b. pembangunan jaringan jalan di Kabupaten Sleman yang menghubungkan aktivitas Pariwisata di Kompleks Candi Prambanan dengan daerah tujuan wisata lain di sekitarnya yang didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan;
- c. peningkatan jalan di Kabupaten Klaten khususnya di ruas Dengok-Candi Plaosan-Candi Sewu yang didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan;
- d. peningkatan dan rehabilitasi jalan di Kabupaten Klaten khususnya di ruas Tlogo-Candi Sewu yang didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan;
- e. rehabilitasi jalan di Kabupaten Sleman khususnya di ruas Marangan-Nglengkong-Ledoksari;
- f. pembangunan *Flyover* Diponegoro, *Flyover* Kartini, dan *Flyover* Kartosuro untuk meningkatkan aksesibilitas dari wilayah Jawa Tengah; dan
- g. pengembangan simpul transportasi untuk jalan eksternal dan jaringan jalan yang menghubungkan BYP, termasuk jaringan jalan yang sudah ada dan jaringan jalan yang mempunyai relevansi kuat dalam mendukung pengembangan kawasan Pariwisata di masa yang akan datang.

D. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pada tahun 2018, cakupan akses ke pasokan air berkualitas baik (perpipaan dan non-perpipaan) di KTA Borobudur adalah 90,9% (sembilan puluh koma sembilan persen). Sementara itu, layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) baru menjangkau sekitar 20% (dua puluh persen) rumah tangga di KTA Borobudur, yang meliputi sekitar 962 (sembilan ratus enam puluh dua) rumah tangga di Kecamatan Borobudur dengan persentase 6% (enam persen) dan 6.030 (enam ribu tiga puluh) rumah tangga di Kecamatan Mungkid dengan persentase 31% (tiga puluh satu persen). Kecamatan Mungkid sendiri memiliki satu wilayah perkotaan besar yang menampung lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) populasi kecamatan.

Cakupan akses ke pasokan air berkualitas baik (perpipaan dan non perpipaan) di KTA Yogyakarta adalah sebesar 96% (sembilan puluh enam persen). Layanan air bersih perpipaan di Kota Yogyakarta disediakan oleh PDAM Tirtamarta dari air baku

sumber . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

sumber sungai, mata air, sumur dangkal, dan sumur dalam dengan total kapasitas terpasang 629 (enam ratus dua puluh sembilan) liter/detik, dan kapasitas produksi 504 (lima ratus empat) liter/detik pada tahun 2018. PDAM Tirtamarta pada tahun 2018 melayani 32.247 (tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh) sambungan rumah tangga dan berhasil menurunkan tingkat kehilangan air dari 35,07% (tiga puluh lima koma nol tujuh persen) menjadi 31,33% (tiga puluh satu koma tiga puluh tiga persen) pada periode tahun 2016-2018.

Untuk KTA Prambanan sampai dengan tahun 2018, cakupan akses ke pasokan air berkualitas baik (perpipaan dan non-perpipaan) adalah sebesar 86,8% (delapan puluh enam koma delapan persen). Layanan air bersih perpipaan PDAM Klaten maupun PDAM Sleman masing-masing mengelola satu sistem jaringan air bersih terpisah untuk Kecamatan Prambanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK). Masing-masing SPAM IKK bersumber dari sumur dalam dengan paket standar pengolahan dan jaringan. Di SPAM IKK Prambanan Klaten terpasang 3 (tiga) sumur dalam, dengan total kapasitas 30 (tiga puluh) liter/detik dan daerah pelayanannya meliputi 5 (lima) desa, yaitu Desa Tlogo, Desa Taji, Desa Kebondalem Kidul, Desa Bugisan, dan Desa Kotesan. Sementara SPAM IKK Prambanan-Sleman menggunakan sistem pompa dan gravitasi. Sumber air dari air tanah bebas melalui Sumur Dangkal (*Shallow Well* atau SW) yaitu SW3 Instalasi Prambanan Timur dan SW4 instalasi Prambanan Barat dengan kapasitas masing-masing sumber sebesar 5 (lima) liter/detik dan 4 (empat) liter/detik. Air dari sumur dipompa ke instalasi pengolahan yang terdiri dari aerator, sedimentasi, dan bak filter. Setelah melalui bak pengolahan kemudian di tampung di dalam satu buah reservoir untuk didistribusikan ke pelanggan.

Berdasarkan kondisi akses air berkualitas di KTA BYP tersebut, upaya untuk penyediaan air minum yang akan dilaksanakan adalah:

- a. perluasan SPAM Kabupaten untuk Kabupaten Magelang, Klaten, dan Sleman (Sistem IKK) oleh perusahaan penyedia air berbasis mata air, sumur dalam, dan air permukaan;
- b. pengelolaan Air Tanah Berkelanjutan di KTA Yogyakarta melalui regulasi, pemantauan dan penegakan hukum, serta pengalokasian kelebihan pasokan;
- c. peningkatan pengelolaan distribusi air bersih dari Bendungan Pasuruhan untuk pemenuhan kebutuhan 500 (lima ratus) liter/detik ke Kota Yogyakarta, 500 (lima ratus) liter/detik ke Kabupaten Bantul, dan 700 (tujuh ratus) liter/detik ke Kabupaten Kulon Progo. Peningkatan prasarana pengelolaan distribusi air bersih ini dilakukan atas rekomendasi instansi yang menangani bidang kebudayaan. Pasokan ke Kabupaten Kulon Progo ditujukan untuk mendukung YIA, rencana pembangunan

Aerometropolis, . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

Aerometropolis, dan rencana pengembangan pelabuhan perikanan. Pengurangan kebocoran air di semua kecamatan di KTA dengan target untuk mengurangi 1% (satu persen) kebocoran per tahun, dan mencapai target pengurangan kebocoran sebesar 20% (dua puluh persen);

- d. kampanye penghematan air melalui sosialisasi di sekolah-sekolah dan pemukiman di seluruh Kecamatan KTA; dan
- e. perluasan Pasokan Air Desa (SPAM Desa) untuk 6 (enam) desa di KTA Borobudur dan 8 (delapan) desa di KTA Prambanan melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), SPAM DAK, dan SPAM Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam rangka mencapai 100% (seratus persen) akses air bersih di KTA Borobudur dan Prambanan.

2. Sistem Air Limbah dan Sanitasi

Cakupan akses fasilitas sanitasi di KTA Borobudur, baik komunal maupun individual, meningkat dari 74,1% (tujuh puluh empat koma satu persen) pada tahun 2015 menjadi 83,6% (delapan puluh tiga koma enam persen) pada tahun 2019. Untuk KTA Borobudur, Pemerintah Kabupaten Magelang belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang mengolah air limbah domestik, sehingga pembuangan limbah cair rumah tangga sebagian besar masih di lahan terbuka, sungai, atau perairan bebas. Penanganan air limbah yang ada merupakan sistem setempat yang dikelola sendiri oleh masyarakat/rumah tangga sendiri.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perkotaan di Sewon adalah satu-satunya IPAL terpusat yang dimiliki dan dioperasikan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. IPAL Sewon menyediakan pelayanan air limbah ke Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Pada akhir 2018 jumlah rumah tangga yang sudah tersambung ke jaringan IPAL Sewon telah mendekati kapasitas sebesar 25.000 (dua puluh lima ribu) rumah tangga. Di Kota Yogyakarta, hanya sekitar 21% (dua puluh satu persen) rumah tangga yang sudah tersambung ke IPAL Sewon. Sisanya dilayani oleh sistem setempat termasuk *septic tank* komunal atau individu. Di sisi lain, cakupan akses ke sanitasi berkualitas baik di KTA Yogyakarta telah mencapai 100% (seratus persen) pada tahun 2019.

Kondisi di KTA Prambanan menunjukkan belum ada sistem jaringan air limbah terpusat yang tersedia di Kecamatan Prambanan-Sleman maupun Kecamatan Prambanan-Klaten. Di lain sisi, cakupan akses ke sanitasi berkualitas baik di KTA Prambanan telah mencapai 100% (seratus persen) pada 2019.

Untuk . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

Untuk mengatasi gap layanan pengolahan air limbah dan sanitasi di BYP, upaya yang akan dilaksanakan, antara lain:

- a. perluasan sistem air limbah terpusat di Kota Yogyakarta:
  - 1) perluasan *Sewage Treatment Plant* (STP) Sewon dari kapasitas 132 (seratus tiga puluh dua) liter/detik menjadi 343 (tiga ratus empat puluh tiga) liter/detik;
  - 2) pembangunan jangka panjang STP Pleret dengan kapasitas 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) liter/detik; dan
  - 3) perluasan cakupan saluran air limbah di kecamatan dengan kepadatan tinggi terutama di KTA Yogyakarta dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah atau instansi yang menangani urusan bidang kebudayaan.
- b. peningkatan sanitasi di tempat:
  - 1) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Magelang untuk menghapus praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
  - 2) pembangunan IPLT baru di Magelang;
  - 3) penambahan truk vakum yang didukung kerja sama dengan layanan penyedotan lumpur pribadi;
  - 4) penambahan IPAL Komunal dan meningkatkan tangki septik individu di KTA; dan
  - 5) program Masyarakat Pelayanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) di KTA.
- c. peningkatan kualitas air permukaan dan air tanah:
  - 1) penguatan jaringan pemantauan kualitas air;
  - 2) penegakan hukum tentang pembuangan air limbah secara ilegal oleh industri menengah dan besar; dan
  - 3) sosialisasi dan penyediaan insentif untuk industri kecil dan rumah tangga untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas air permukaan dan air tanah.

3. Sistem Pengolahan Sampah

Sistem Pengelolaan Sampah KTA Borobudur membutuhkan tambahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) TPA sampah di Kabupaten Magelang, yaitu TPS Pasuruhan seluas 31.258 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan) meter persegi di Kecamatan Mertoyudan dan TPA Klegen seluas 3.080 (tiga ribu delapan puluh) meter persegi di Kecamatan Grabag. TPA yang ada memiliki kapasitas terbatas dan diperkirakan akan penuh dalam 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan, sehingga direncanakan akan ada perluasan TPA Pasuruhan 3.000 (tiga ribu) meter persegi dan TPA Klegen 7.000 (tujuh ribu) meter persegi.

Untuk KTA Yogyakarta, pengolahan sampah dilayani oleh TPA Regional Piyungan, yang menerima sampah sebesar 400-500 ton/hari (empat ratus sampai lima ratus ton per hari) dari Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

TPA Regional Piyungan telah mencapai kapasitas penuh pada tahun 2010 dan belum ada lokasi pengganti. KTA Yogyakarta juga menghadapi keterbatasan sarana pengumpul sampah.

Layanan pengumpulan sampah di KTA Prambanan terbagi dalam Kecamatan Prambanan-Klaten dan Kecamatan Prambanan-Sleman. Sampah dari Kecamatan Prambanan-Sleman dibuang ke TPA Piyungan, yang terletak 15 (lima belas) kilometer dari KTA Prambanan. Sampah dari Kecamatan Prambanan-Klaten dibuang ke TPA Troketon, yang terletak 30 (tiga puluh) kilometer dari KTA Prambanan.

Penanganan kendala dalam pengelolaan sampah di tiga KTA BYP akan dilaksanakan melalui:

- a. pengumpulan sampah di tingkat desa akan dikelola oleh masyarakat dan dikumpulkan di tempat pemindahan/daur ulang sampah (tempat pengolahan sampah-*reduce reuse recycle*/TPS 3R dan/atau bank sampah). Hasilnya diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah melalui pengomposan dan kegiatan daur ulang yang dapat digunakan kembali di pedesaan hingga 30% (tiga puluh persen) pada tahun 2025 dan hingga 50% (lima puluh persen) pada tahun 2044.
  - b. pengumpulan sampah di perkotaan dilakukan oleh stasiun pengalihan perantara (tempat pengolahan sampah terpadu/TPST). Pengurangan sampah ditargetkan dapat mencapai 15% (lima belas persen) pada tahun 2025 dan 25% (dua puluh lima persen) pada tahun 2044.
  - c. limbah sisa TPS 3R (pedesaan) dan TPST dikumpulkan 100% (seratus persen) dan diangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah.
  - d. pembangunan TPST Regional di Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.
  - e. Klaten sudah membangun fasilitas pengelolaan sampah yaitu TPA Troketon yang sudah beroperasi penuh. Untuk melayani seluruh Kabupaten Klaten, TPST ini akan diperluas.
  - f. pengembangan TPA Piyungan di Kota Yogyakarta dengan konsep pembangkit listrik tenaga sampah melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha. Pengembangannya akan diawali dengan penyusunan studi kelayakan.
  - g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi.
4. Sistem Penyediaan Listrik

Gardu induk yang mencakup KTA BYP termasuk dalam interkoneksi jaringan listrik Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan transmisi 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) dan 500 kV (lima ratus kilovolt). Kebutuhan pelayanan listrik di masa yang akan datang telah mengantisipasi tambahan kamar hotel, pondok wisata, serta perkembangan perumahan. Kebutuhan layanan listrik sampai tahun

2044 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

2044 sebenarnya masih mampu dicukupi dari Gardu Induk yang ada di KTA Borobudur, KTA Prambanan, dan KTA Yogyakarta. Namun rencana pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk oleh PLN untuk melayani aktivitas ekonomi lain di luar sektor Pariwisata, yaitu rumah tangga, industri, pelayanan publik tetap dipertimbangkan. Penerapan instalasi transmisi kabel bawah tanah pada kawasan destinasi wisata di Borobudur–Yogyakarta–Prambanan juga akan dilaksanakan sebagai bagian dari penataan kawasan.

5. Sistem Teknologi Informasi Komunikasi

Saat ini KTA Borobudur, Yogyakarta, dan Prambanan telah terlayani sambungan internet dengan frekuensi 4G. Namun, pada beberapa daerah tujuan wisata yang berada pada kondisi geografi yang berbukit seperti Tebing Breksi dan Candi Ijo, di Kabupaten Sleman, masih belum terjangkau layanan internet dengan kecepatan tinggi dan/atau tidak terjangkau sinyal telepon genggam (daerah *blank spot*).

Upaya untuk peningkatan jangkauan dan layanan TIK di KTA BYP dengan pengembangan jaringan telekomunikasi di KTA BYP yang meliputi *fixed broadband* dan *mobile broadband*.

6. Pengembangan Amenitas dan Fasilitas Pariwisata

Rencana pengembangan amenities dan fasilitas Pariwisata untuk setiap KTA sebagai berikut:

a. KTA Borobudur

- 1) Pariwisata budaya utama Borobudur–Pawon–Mendut: pengembangan kelengkapan amenities dan fasilitas Pariwisata diarahkan untuk mendukung kondisi alamiah pedesaan Borobudur dengan batas alam seperti pegunungan, sungai, dan kontur, dengan aktivitas wisata budaya dan interpretasi religi (candi), edukasi (museum), dan rekreatif (Taman *Heritage* Borobudur pada zona 2) yang didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan;
- 2) Pariwisata campuran Balai Ekonomi Desa: pengembangan kelengkapan amenities dan fasilitas Pariwisata di 20 (dua puluh) desa wisata dan 20 (dua puluh) Balai Ekonomi Desa sebagai penyangga kawasan Borobudur dan destinasi pemerataan sebaran kunjungan wisatawan ke Borobudur;
- 3) Pariwisata berbasis alam Bukit Menoreh: pengembangan kelengkapan amenities dan fasilitas Pariwisata dari jalur Bedah Menoreh, yang berbatasan dengan kebun teh di Tritis dan memiliki beberapa *viewing point* yang dikelola oleh warga untuk menyebarkan pola perjalanan wisatawan dengan tetap mempertahankan karakter alamiahnya;

4) permukiman . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

- 4) permukiman Mungkid–Mertoyudan: pengembangan kelengkapan pondok wisata yang diutamakan dari rumah penduduk dan bernuansa pedesaan;
  - 5) Pariwisata perkotaan Simpang Palbapang *Transit Oriented Development* (TOD): pengembangan amenitas dan akomodasi di gerbang masuk kawasan Borobudur;
  - 6) Blondo–Palbapang: pengembangan kelengkapan amenitas dan fasilitas Pariwisata di akses utama dari Magelang dan Yogyakarta yang bernuansa pedesaan dengan kondisi lahan sekitar berupa ruang terbuka hijau dan lahan pertanian;
  - 7) Pariwisata perkotaan gerbang kawasan 4 (empat) Lokasi, yakni Gerbang Palbapang, Gerbang Blondo, Gerbang Klangon, dan Gerbang Kembanglimus Borobudur dilengkapi dengan fasilitas kantor pengelola, *rest area*, dan toko cendera mata; dan
  - 8) pelestarian Bekas Danau Purba: pengembangan kelengkapan amenitas dan fasilitas Pariwisata untuk mendukung pengembangan aktivitas wisata fotografi dan *trekking* yang tidak mengubah fungsi pertanian yang harus didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan.
- b. KTA Yogyakarta
- 1) Pariwisata budaya utama Panggung Krapyak: pengembangan kelengkapan amenitas dan fasilitas Pariwisata yang ramah pejalan kaki;
  - 2) Pariwisata campuran Plengkung Gading–Panggung Krapyak: pengembangan koridor untuk galeri seperti Cemeti dan Krack di jalan utama, dan bagian sekitar seperti Tirtodipuran dan Suryodiningratan, yang banyak diisi dengan studio seni dan galeri;
  - 3) amenitas tema khusus Kraton dan Taman Sari: pengembangan kelengkapan amenitas dan fasilitas Pariwisata dengan tidak mengubah secara signifikan bentuk bangunan agar tetap selaras mencerminkan inti kebudayaan Yogyakarta dan harmonis dengan lingkungan sekitarnya yang didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan;
  - 4) amenitas Terminal Ngabean: pengembangan lahan parkir dan terminal antar moda khusus wisata area Sub KTA Sumbu Filosofi yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang wisatawan;
  - 5) amenitas Stasiun Tugu: pengembangan fungsi akomodasi (hotel berbintang), area komersial, dan transportasi (stasiun kereta api) yang didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan;

6) Pariwisata . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

- 6) Pariwisata perkotaan berwawasan lingkungan Kali Winongo: amenities dan fasilitas Pariwisata dikembangkan dengan ruang yang harmonis dengan alam dan permukiman yang tertata rapi dengan aktivitas pertanian perkotaan yang didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan;
  - 7) Pariwisata campuran Margo Utomo-Kotabaru dan Malioboro-Margamulya-Pakualaman: pemeliharaan kawasan cagar budaya sepanjang Sub KTA Sumbu Filosofi dan pengembangan kelengkapan amenities dan fasilitas Pariwisata untuk mendukung aktivitas belanja dan kuliner serta edukasi sejarah yang didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan;
  - 8) Pariwisata budaya utama Kotagede: pengembangan kelengkapan amenities dan fasilitas Pariwisata yang memperkenalkan ikon wisata budaya kejayaan awal kerajaan Mataram Islam yang dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah atau instansi yang menangani urusan bidang kebudayaan;
  - 9) Pariwisata perkotaan berwawasan lingkungan Kali Gajah Wong: pengembangan kelengkapan amenities dan fasilitas Pariwisata untuk mendukung fungsi sebagai area penyangga ekologi, yang dimulai dengan penataan Kebun Binatang Gembira Loka sebagai tujuan wisata sebagai hutan kota, dilanjutkan dengan penataan sungai di sepanjang sungai Gajah Wong; dan
  - 10) Pariwisata perkotaan berwawasan lingkungan Tegalrejo: pengembangan penunjang atraksi baru Kali Winongo yang selaras dengan Desain Induk Sungai Winongo yang dicanangkan sampai tahun 2030 yang dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah atau instansi yang menangani urusan bidang kebudayaan.
- c. KTA Prambanan
- 1) Pariwisata budaya utama di Kompleks Candi Prambanan dan Kalasan: pengembangan kelengkapan amenities dan fasilitas Pariwisata yang menciptakan suasana tenang dan asri selaras dengan aktivitas keagamaan umat Hindu dan Buddha, serta wisatawan yang menikmati alam seperti pegunungan, sungai, dan kontur yang didahului berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan;
  - 2) permukiman Bugisan dan Kalasan: penataan permukiman masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan pengrajin yang dapat dikunjungi wisatawan, yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi pondok wisata yang dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah atau instansi yang menangani urusan bidang kebudayaan; dan
  - 3) amenities . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

- 3) amenitas utama yaitu pengembangan Stasiun Brambanan, koneksi transportasi publik, dan integrasi antar moda khusus wisata yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang wisatawan.

**E. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata**

Pengembangan dan penataan kawasan BYP diperkirakan akan memberi tambahan kesempatan kerja langsung di sektor Pariwisata rata-rata 5.300 (lima ribu tiga ratus) kesempatan kerja per tahun sampai tahun 2044. Pengembangan Pariwisata juga memberi manfaat penciptaan lapangan kerja tidak langsung dan ikutan (*induced*) di sektor-sektor dalam rantai pasok Pariwisata seperti pertanian, industri, komunikasi, dan lainnya sebesar rata-rata hampir 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) sampai tahun 2044. Dengan demikian total kesempatan kerja yang dihasilkan pertahun rata-rata lebih dari 15.700 (lima belas ribu tujuh ratus).

Peluang tambahan lapangan kerja dari pengembangan kawasan BYP dapat diwujudkan melalui pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM serta pemberdayaan masyarakat. Beberapa upaya yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Industri Pariwisata dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Untuk mengoptimalkan SDM, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dapat memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif akan dilaksanakan melalui:

- a. pendampingan dan inkubasi;
- b. pengembangan pusat keunggulan (*center of excellence*);
- c. fasilitasi inovasi dan penguatan merek;
- d. pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif, klaster/kota kreatif, dan *Be Creative District* (BCD);
- e. penerapan dan komersialisasi hak atas kekayaan intelektual; dan
- f. penguatan rantai pasok dan skala usaha kreatif. Peningkatan populasi pelaku usaha digital juga akan difasilitasi melalui pengembangan klaster digital, termasuk yang berbasis desa, kemudahan usaha, serta akses kepada pembiayaan dan pasar.

Dalam hal ini, produk Ekonomi Kreatif dilakukan melalui peningkatan kapasitas industri Pariwisata dan UMKM mencakup peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pengelolaan usaha. Peningkatan keterampilan tenaga kerja diberikan pada tenaga kerja formal Pariwisata di BYP yang berasal dari dalam dan luar wilayah BYP. Pelaksanaannya difokuskan pada pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi terstandar internasional yang didukung kerja sama antara program-program pemerintah pusat, pemerintah

daerah, . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

daerah, dan industri Pariwisata. SDM yang terampil dan kompetensinya terstandar diperlukan untuk mendukung industri Pariwisata, antara lain industri akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, operator perjalanan, dan jasa penunjang Pariwisata lainnya.

Peningkatan kapasitas SDM juga perlu dilengkapi dengan penguatan standar pengelolaan usaha Pariwisata sehingga menjadi lebih profesional dan handal. Perhatian khusus perlu diberikan pada usaha-usaha Pariwisata yang berskala kecil dan menengah. Bantuan dapat diberikan untuk mendukung pengembangan produk dan layanan, peningkatan akses ke pembiayaan, teknik pemasaran termasuk dalam pemanfaatan digitalisasi, konsultasi usaha, serta pendampingan untuk usaha baru. Penguatan UMKM di sektor Pariwisata secara terintegrasi di KTA BYP akan didukung:

- a. peningkatan koordinasi antar Pemangku Kepentingan dalam penyediaan regulasi yang bersahabat, kebijakan yang efektif, dan pembinaan teknis yang profesional;
- b. penguatan usaha melalui kemitraan asosiasi wisata Indonesia, antara lain Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, dan sebagainya dengan koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), dan UMKM penyedia paket wisata/travel agent, serta kerja sama di antara UMKM yang difasilitasi melalui koperasi untuk pengelolaan usaha kuliner, fesyen, pondok wisata, kerajinan, transportasi, dan sebagainya;
- c. peningkatan akses kepada pembiayaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya serta *Corporate Social Responsibility*; dan
- d. pemanfaatan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) untuk pendampingan bisnis, transfer teknologi, dan akses pasar.

Perhatian juga perlu diberikan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja Pariwisata dari kelompok perempuan dan penyandang disabilitas melalui program khusus yang memfasilitasi partisipasi mereka untuk memanfaatkan peluang kerja dan usaha yang berkembang di sektor Pariwisata serta sektor-sektor lainnya dalam rantai pasok Pariwisata.

2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat untuk Pembangunan Inklusif

Peningkatan kapasitas masyarakat sadar wisata bertujuan agar masyarakat dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan suasana yang kondusif. Pada saat yang sama, masyarakat yang sadar wisata diharapkan dapat memahami hak dan kebutuhannya terkait pengaruh pengembangan Pariwisata terhadap pola hidup, perilaku dan kebiasaan, interaksi dan komunikasi, daya dukung lingkungan, serta pada saat yang sama aktif berpartisipasi untuk memanfaatkan peluang kerja dan usaha yang terbuka dari pembangunan Pariwisata dan sektor-sektor yang terkait lainnya.

Peningkatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

Peningkatan kapasitas masyarakat sadar wisata dapat dilakukan melalui sosialisasi, lokakarya, pelatihan, pendampingan, dan gerakan bersama. Penyelenggaraan pelatihan dan lokakarya bagi masyarakat secara khusus didasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan kompetensi di bidang Pariwisata yang relevan. Hasil identifikasi pelatihan yang diusulkan oleh masyarakat antara lain: pelatihan sadar wisata dan sapta pesona, pemandu wisata, pondok wisata, seni dan budaya, pembuatan cendera mata, pelestarian lingkungan, pengelolaan warisan budaya dan alam, *front office*, *housekeeping*, dan pemasaran. Pelatihan *eco-spa*, industri rumah tangga, dan kuliner juga diberikan untuk meningkatkan partisipasi kelompok perempuan.

Pelatihan penting lainnya yang akan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat adalah pelatihan tuturan cerita (*story telling*) tentang Borobudur dan sekitarnya secara menyeluruh sehingga masyarakat dapat terlibat dalam memberikan pengayaan pengetahuan dan pembelajaran bagi wisatawan. Masyarakat juga akan dilibatkan dalam penggalian dan penyusunan cerita yang menyeluruh tentang Candi Prambanan dan sekitarnya, sehingga menambah daya tarik dan pengalaman berwisata. Pengembangan tuturan cerita bersama masyarakat ini juga dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan melalui penguatan interaksi dan komunikasi, yang selanjutnya berpotensi untuk meningkatkan pengeluaran wisatawan.

Khusus pelatihan pengelolaan warisan budaya dan alam akan diselenggarakan dengan status Kompleks Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan sebagai warisan dunia, dengan cakupan peningkatan: pemahaman tentang daya dukung lingkungan (*environmental carrying capacity*) dan pelestarian budaya, serta partisipasi dan kontribusi untuk menjaga pola konsumsi yang bertanggung jawab. Pelatihan ini dapat diperluas ke pelaku usaha yang ada di kawasan BYP dengan hasil yang diharapkan berupa pemahaman unit-unit usaha di sektor Pariwisata di BYP untuk menerapkan praktik produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab secara sosial, budaya, dan lingkungan.

Masyarakat di masing-masing KTA juga membutuhkan beberapa pelatihan yang bersifat khusus, seperti pelatihan manajemen Balai Ekonomi Desa di KTA Borobudur, pelatihan jasa Pariwisata bagi komunitas jip wisata agar dapat memberikan layanan yang aman dan nyaman bagi wisatawan di KTA Prambanan sisi Sleman, serta pelatihan dan lokakarya yang mendalami pemahaman terhadap Sumbu Filosofi di KTA Yogyakarta untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat agar secara kreatif mengembangkan dan mengemas paket wisata.

Pada . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

Pada akhirnya, masyarakat yang bekerja di bidang Pariwisata diwajibkan untuk mendapat sertifikasi kompetensi agar kualitas, keahlian, dan kompetensinya meningkat dan diakui. Upaya ini dilengkapi dengan penambahan LSP, yang sudah terdapat di KTA Yogyakarta dan KTA Prambanan, namun belum di KTA Borobudur.

Tabel 4. Rencana Pengembangan Kapasitas Masyarakat

No.	Target Komunitas	Topik Prioritas Pengembangan Kapasitas
1	Masyarakat Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bimbingan teknis (bimtek) pemandu wisata.</li><li>• Bimtek Pendampingan tuturan cerita umum bagi pemandu wisata di wilayah Sumbu Filosofi.</li><li>• Bimtek pendampingan tuturan cerita bagi pemandu wisata area Titik Nol Kilometer sampai dengan Tugu.</li><li>• Bimtek pendampingan tuturan cerita umum bagi pemandu wisata Plengkung Gading sampai dengan Panggung Krapyak.</li><li>• Bimtek pendampingan tuturan cerita umum bagi pemandu wisata kawasan candi-candi di Kawasan Prambanan.</li><li>• Bimtek konsolidasi pengusaha dan asosiasi Pariwisata, telekomunikasi, periklanan, dan lain-lain.</li><li>• Bimtek pengembangan SDM swasta industri/usaha Pariwisata berbasis kompetensi.</li><li>• Pelatihan usaha jasa makan dan minum, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknologi informasi, dan pelatihan pemasaran.</li></ul>
2	Penduduk Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bimtek Kepariwisata berbasis pelestarian dan pemanfaatan peluang ekonomi.</li><li>• Bimtek pondok wisata.</li><li>• Bimtek pengembangan kapasitas BUM Desa dan pelaku wisata dalam rangka promosi wisata secara digital.</li><li>• Bimtek produksi cendera mata.</li><li>• Bimtek pengemasan produk.</li><li>• Bimtek penyelenggaraan <i>event</i> budaya terpadu.</li><li>• Bimtek manajemen Balai Ekonomi Desa.</li></ul>

• Bimtek . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

No.	Target Komunitas	Topik Prioritas Pengembangan Kapasitas
		<ul style="list-style-type: none"><li>● Bimtek pengembangan jejaring kerja sama antar institusi.</li></ul>
3	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bimtek pengelolaan warisan dunia.</li><li>● Bimtek pelestarian seni dan budaya.</li><li>● Bimtek penyusunan pola perjalanan wisata (<i>travel pattern</i>) kawasan Candi Kalasan-Candi Sari-Candi Kedulan.</li><li>● Bimtek penyusunan pola perjalanan wisata (<i>travel pattern</i>) kawasan Kraton, Pakualaman, dan Kotagede.</li><li>● Bimtek penyusunan pola perjalanan wisata (<i>travel pattern</i>) antar Museum.</li><li>● Bimtek penyusunan pola perjalanan wisata (<i>travel pattern</i>) kawasan Candi Ijo-Candi Barong-Candi Banyunibo.</li><li>● Bimtek penyusunan pola perjalanan wisata (<i>travel pattern</i>) kawasan Candi Prambanan-Candi Sojiwan dan sekitarnya.</li><li>● Bimtek standar kualitas pelayanan jasa penyedia Pariwisata.</li><li>● Bimtek pendampingan Pokdarwis dalam perencanaan dan pelaksanaan program.</li><li>● Bimtek pelatihan Pariwisata dapat membantu komunitas jip wisata.</li><li>● Bimtek studi banding ke kawasan warisan budaya yang telah menerapkan HIA.</li><li>● Bimtek studi banding di dalam negeri maupun ke luar negeri.</li><li>● Pelatihan agrowisata.</li><li>● Bimtek kerja sama dengan TripAdvisor dalam penyediaan data <i>digital platform</i> (pelatihan pengembangan teknologi informasi untuk pengembangan pasar).</li><li>● Bimtek analisis data dari platform digital.</li><li>● Bimtek desain dan tata letak infrastruktur/peralatan teknologi informasi pada kawasan budaya dan Pariwisata.</li><li>● Bimtek penyediaan teknologi terbaru.</li><li>● Bimtek kampanye gerakan sadar wisata dan aksi sapta pesona.</li></ul>

● Pelatihan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

No.	Target Komunitas	Topik Prioritas Pengembangan Kapasitas
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelatihan bahasa asing: Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, dan lain-lain.</li></ul>
4	Kelompok Disabilitas	Pelatihan membuat, menjahit, kuliner, pijat, hidroponik, perdagangan elektronik ( <i>e-commerce</i> ), dan keterampilan lainnya yang relevan dengan bidang Pariwisata untuk penyandang disabilitas (difabel).
5	Kelompok Wanita Pengrajin	Pelatihan membuat, menjahit, memasak, dan keterampilan lainnya yang relevan dengan bidang Pariwisata untuk wanita pengrajin.
6	SDM Lembaga Diklat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bimtek penyelenggaraan perizinan dan pengawasan bangunan cagar budaya dan kawasan cagar budaya.</li><li>• <i>Biannual Tourism Forum</i>.</li><li>• Bimtek penyusunan dan review HIA.</li><li>• Bimtek Penyusunan dokumen <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO) Klumprit Point Center, Desa Wukirharjo.</li><li>• Bimtek penyusunan dokumen IPRO Pasar Kerajinan dan Plaza Kreatif Desa Bokoharjo.</li><li>• Bimtek kegiatan survei tingkat kepuasan konsumen di bidang Pariwisata.</li><li>• Bimtek evaluasi program yang sudah dilakukan.</li><li>• Sertifikasi kompetensi untuk masyarakat yang bekerja di bidang Pariwisata.</li><li>• Pembangunan Pusat Pelatihan Berbasis Kompetensi Terpadu (LSP).</li><li>• Pengembangan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata.</li><li>• Pengembangan kualitas guru, dosen, dan <i>trainer</i> pada lembaga formal dan non formal.</li><li>• Pendidikan formal dan pelatihan guru, dosen, dan <i>trainer</i> di bidang Pariwisata, budaya, bahasa, pelestarian, dan UMKM.</li></ul>

F. Pengembangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

#### F. Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata

Pengembangan investasi di bidang Pariwisata di DPN BYP mencakup investasi yang didanai dari sumber anggaran dan belanja pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Investasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan difokuskan untuk mendukung pengembangan sarana prasarana, termasuk infrastruktur dasar, infrastruktur konektivitas, infrastruktur permukiman dan perkotaan lainnya, pengembangan ruang terbuka, revitalisasi lingkungan, serta amenities dan atraksi Pariwisata, dan peningkatan kapasitas SDM, serta pemberdayaan masyarakat, UMKM, dan dunia usaha.

Khusus investasi dari swasta diarahkan untuk dapat melengkapi investasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk kerjasama pemerintah dengan badan usaha, Pembiayaan Investasi Non Anggaran pemerintah (PINA), serta dana *Corporate Social Responsibility* bersumber dari BUMN dan BUMD diarahkan untuk dapat melengkapi investasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk mendukung pembangunan atraksi wisata (*point centre*, amfiteater multifungsi, *glamping camp*, *instagrammable spot*, dan desa wisata), peningkatan sarana prasarana (pembangunan SPAM untuk pelayanan air bersih, pembangunan TPA untuk melayani pengelolaan sampah di kawasan wisata, pembuatan tempat parkir di DTW, pembuatan multi transit pendukung wisata, pembuatan prasarana sanitasi di obyek wisata, kios makanan, pusat kerajinan), serta penyediaan akomodasi (hotel, restoran, dan biro perjalanan).

Pengembangan investasi di DPN BYP dilaksanakan melalui perencanaan investasi, yang didukung promosi peluang investasi, fasilitasi dan pengendalian investasi, serta kerjasama investasi. Pelaksanaannya didukung dengan pengembangan dan penyediaan insentif fiskal dan nonfiskal. Investor juga didorong untuk bermitra dengan pelaku usaha di BYP, terutama UMKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UMKM yang akan melakukan investasi secara individu dan dalam pola kemitraan juga difasilitasi untuk mendapatkan kemudahan yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi rakyat. Peluang investasi swasta lainnya dapat merujuk pada lokasi-lokasi DTW yang dikembangkan di DPN BYP. Peluang investasi akomodasi di DPN BYP sampai tahun 2044 sebagai berikut:

Tabel 5 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

Tabel 5. Peluang Investasi Akomodasi di DPN BYP

No.	KTA	Tahap Pertama (2024) Jumlah Kamar	Tahap Kedua (2029) Jumlah Kamar	Tahap Ketiga (2034) Jumlah Kamar	Tahap Keempat (2039) Jumlah Kamar	Tahap Kelima (2044) Jumlah Kamar
1.	Borobudur	763	845	938	1.051	1.179
2.	Prambanan	64	95	153	205	274
3.	Yogyakarta	17.660	20.127	22.844	25.536	28.145

Selain akomodasi berupa hotel, desa-desa di sekitar Candi Borobudur memiliki fasilitas pondok wisata dengan menawarkan keindahan gabungan antara panorama kemegahan Candi Borobudur dan alam pegunungan yang melatarbelakanginya, kehidupan perdesaan masyarakat yang ada di sekitar Borobudur, pertunjukan kesenian tradisional, tur dengan mobil *Volkswagen* atau kendaraan tradisional, keragaman kerajinan tangan, dan kuliner khas Borobudur yang semuanya dapat dikemas dalam paket-paket wisata. Begitu juga dengan desa-desa wisata di sekitar Prambanan memiliki fasilitas pondok wisata dengan menawarkan pesona kemegahan Kompleks Candi Prambanan dan panorama persawahan, kehidupan masyarakat perdesaan yang kental dengan ritus, adat istiadat, seni, dan pengetahuan tradisional, yang dikemas dalam paket wisata.

Lokasi Kompleks Candi Prambanan berdekatan dengan Kota Yogyakarta, sebuah kota yang memiliki banyak hotel berbintang dan pondok wisata. Kampung-kampung wisata Daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan berbagai fasilitas penginapan, kafe, restoran, sentra pembuatan kerajinan khas Yogyakarta (batik, perak, dan kerajinan kulit), pembuatan kuliner khas Yogyakarta (misalnya bakpia dan gudeg) dan berbagai keperluan wisatawan lainnya yang dikemas dalam paket-paket wisata.

Pengembangan paket-paket wisata tersebut juga menjadi salah satu daya tarik untuk mengembangkan investasi yang sesuai. Pengembangan investasi juga dapat diperluas untuk mendorong kemitraan dengan DTW berbasis masyarakat lainnya yang mulai berkembang, seperti 20 (dua puluh) desa di KTA Borobudur dan 12 (dua belas) desa di KTA Prambanan yang telah dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah mulai mendapatkan kunjungan wisatawan. Peluang investasi swasta lainnya dapat merujuk pada lokasi-lokasi DTW yang dikembangkan di 3 (tiga) KTA di DPN BYP, atau di wilayah lain yang terhubung secara konektivitas dengan DPN BYP. Investasi lainnya terkait Pariwisata sampai tahun 2044 diperkirakan dapat mencapai US\$ 41 juta (empat puluh satu juta dolar AS).

Selain . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

Selain itu, peluang investasi di kawasan Borobudur Highland menyediakan 19 (sembilan belas) kavling untuk pembangunan resort, villa, glamping, dan akomodasi lainnya yang ramah lingkungan dan memiliki struktur yang ringan. Diperkirakan pada tahun 2030 jumlah kamar resor terbangun adalah 1.050 (seribu lima puluh) unit, dengan jumlah kunjungan 1 juta per tahun yang terdiri dari 500.000 (lima ratus ribu) tamu menginap dan lainnya adalah tamu yang hadir untuk menikmati suasana asri hutan pinus dan atraksi yang ada. Total investasi kawasan sekitar Rp1,5 triliun (satu koma lima triliun rupiah), yang terdiri dari Rp350 miliar (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) investasi pemerintah dan Rp1,15 triliun (satu koma lima belas triliun rupiah) investasi swasta. Borobudur Highland berpotensi menyerap 1.600 (seribu enam ratus) tenaga kerja dan menjadi produk Pariwisata baru bagi Kawasan Pariwisata Borobudur.

Pengembangan Borobudur Highland sejalan dengan konsep pola pengembangan dekonsentrasi yang juga menyebarkan pola perjalanan wisatawan. Borobudur Highland telah muncul di dalam peta konsep pengembangan kawasan dan berada di Cluster Investasi Perbukitan Menoreh. Pengembangan Borobudur Highland juga didukung oleh skema pendanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Pengembangan kawasan ini diharapkan mampu saling mendukung pengembangan BYP pada umumnya dan kawasan otoritatif pada khususnya. Untuk mendukung pengembangan kawasan otoritatif BOB, diperlukan integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan di kawasan koordinatif BOB, termasuk dukungan aksesibilitas dari dan menuju kawasan otoritatif seperti jalan dan jalan tol. *Master plan* pengembangan kawasan otoritatif BOB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**G. Pengelolaan DPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan**

Pengelolaan DPN BYP merupakan upaya jangka panjang yang membutuhkan pranata kelembagaan dalam satu sistem yang terpadu dan mewakili semua Pemangku Kepentingan. Sistem kelembagaan ini diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan pemerataan manfaat bagi semua pihak yang terkait.

**1. Pengembangan Kelembagaan dan Regulasi**

Upaya-upaya pengembangan kelembagaan dan regulasi terkait pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, serta peningkatan daya dukung ekosistemnya diuraikan secara terinci sebagai berikut:

**a. Kelembagaan dan Regulasi di Kompleks Candi Borobudur**

Pengelolaan Kompleks Candi Borobudur akan dilaksanakan oleh manajemen destinasi tunggal (*single destination management*) yang diterjemahkan melalui pembentukan sebuah pengelola. Pengelola ini berperan untuk menjadi *leading institution* dalam penyelenggaraan pengelolaan Kompleks Candi Borobudur yang berlandaskan *Conservatory Based Tourism*.

Pengelolaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

Pengelolaan Kompleks Candi Borobudur dilakukan dengan mengedepankan fungsi-fungsi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan secara terpadu dan harmonis. Pengelola memiliki kewenangan untuk mengelola Kompleks Candi Borobudur secara profesional sesuai dengan fungsi di atas. Kewenangan pengelolaan ini diperoleh dari kompetensi, tugas, dan fungsi lembaga yang membentuknya.

Pengelola melaksanakan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan:

- 1) tata ruang dan pembangunan;
- 2) pemanfaatan melalui mekanisme kerja sama dengan pemilik aset;
- 3) kunjungan dan Pariwisata;
- 4) peraturan dalam kawasan;
- 5) pengelolaan kawasan Borobudur;
- 6) penanggulangan bencana dalam kawasan;
- 7) lingkungan;
- 8) pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- 9) penyusunan laporan kondisi keterawatan (*state of conservation*) warisan dunia.

Pengelola diarahkan untuk dapat mengembangkan dan mengelola kerja sama untuk memberikan pemerataan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah.

b. Kelembagaan Kawasan Yogyakarta

Penguatan 2 (dua) badan pengelola KTA Yogyakarta, yakni Badan Pengelola Sumbu Filosofi untuk memastikan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya di kawasan tersebut agar tetap terpelihara dan menjadi fondasi pengembangan infrastruktur di Kota Yogyakarta serta Badan Pengelola Kawasan Kotagede yang mengelola bagian kota warisan budaya.

c. Kelembagaan dan Regulasi di Kawasan Prambanan

Kawasan Prambanan meliputi kawasan cagar budaya peringkat nasional Prambanan dan warisan dunia Kompleks Candi Prambanan. Kawasan ini memiliki sejumlah besar tinggalan Kerajaan Mataram Kuno abad VIII-X Masehi terutama berupa candi-candi yang terbuat dari batu andesit dan batu tufa atau paras serta tinggalan-tinggalan lainnya dan menjadi bukti rasa toleransi beragama yang dimiliki nenek moyang bangsa Indonesia.

Pengelolaan Kawasan Prambanan akan dilaksanakan melalui sistem tata kelola terpadu dengan memperhatikan aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, baik terhadap fisik cagar budaya, lingkungan, maupun masyarakat di kawasan ini. Sistem tata kelola terpadu tersebut akan diterjemahkan ke dalam pengelola yang menjadi wadah dalam pelaksanaan usaha pelestarian.

Pengelola . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

Pengelola melaksanakan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan:

- 1) tata ruang dan pembangunan;
- 2) pemanfaatan melalui mekanisme kerja sama dengan pemilik aset;
- 3) pengendalian lingkungan, terutama di situs cagar budaya;
- 4) kunjungan dan Pariwisata;
- 5) penegakan aturan di dalam kawasan;
- 6) penanggulangan bencana dalam kawasan;
- 7) pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- 8) penyusunan laporan kondisi keterawatan (*state of conservation*) warisan dunia.

Kebijakan dan strategi tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Pengelola diarahkan untuk memberikan pemerataan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah.

d. Kelembagaan Pendukung Koordinasi Lintas Pemangku Kepentingan

Komitmen Pemangku Kepentingan untuk bekerja sama dalam pengembangan DPN BYP menggunakan pendekatan kerja sama *pentahelix* (pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media). Kerja sama ini dapat diperkuat dengan penetapan peraturan presiden mengenai RIDPN BYP yang antara lain akan mengatur tata kelola pelaksanaan RIDPN BYP yang melibatkan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan RIDPN BYP juga dapat melibatkan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kerja sama lintas Pemangku Kepentingan ini difasilitasi dalam kelompok kerja (Pokja) Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) di setiap provinsi dan kabupaten/kota serta akan diperluas fasilitasnya untuk dapat mencakup kawasan Joglosemar.

Pokja P3TB diperkuat dengan kehadiran subpokja yang terbagi dalam tiga fungsi, yaitu: regulasi, koordinasi, dan partisipasi. Subpokja regulasi bertugas mengawal legitimasi dari komitmen semua perangkat daerah yang menjalankan fungsinya untuk sinkronisasi sejumlah regulasi. Subpokja koordinasi bertugas mengkoordinasikan tugas dan fungsi masing-masing Pemangku Kepentingan agar tidak tumpang tindih dan berkontribusi dalam pengembangan Pariwisata. Subpokja partisipasi bertugas merumuskan usulan-usulan program yang dapat dikerjasamakan secara terpadu dengan orientasi pada pelibatan masyarakat dan dunia usaha, termasuk kerja sama untuk mengatasi masalah dan tantangan dalam pengembangan Pariwisata di DPN BYP.

Secara . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

Secara khusus, keterlibatan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero)/PT TWC dan BOB sebagai mitra dalam peningkatan pelayanan Pariwisata yang profesional dan berkualitas di kawasan Candi Borobudur, Prambanan, dan Situs Ratu Boko. Keterlibatan asosiasi juga penting untuk menghimpun aspirasi para pelaku wisata, baik yang bergerak di bidang perhotelan dan restoran, pramuwisata, usaha taman rekreasi, biro perjalanan, gabungan industri Pariwisata, jasa kuliner/boga, serta asosiasi terkait lainnya.

BOB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur. Dibentuknya BOB oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi Pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur, yaitu di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinilai paling siap dibandingkan dengan destinasi Pariwisata lainnya di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden mengenai percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan lahan otorita BOB berada di Koridor Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung.

Tabel 6. Kapasitas Zonasi Borobudur Highland

Zona	Proporsi (%)	Luas Area (ha)	Jumlah Kamar
<i>Exclusive Resort</i>	17,39	53,76	740
<i>The Gate</i>	18,47	57,08	64
<i>Adventure Tourism</i>	29,33	90,65	128
<i>Cultural Tourism</i>	23,83	73,65	118
<i>Extreme Tourism</i>	10,98	33,94	-
Total			1.050

2. Pelestarian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

2. Pelestarian dan Daya Dukung Ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya.

Pelestarian Kompleks Candi Borobudur secara keseluruhan, baik situs candi, lanskap alam, lanskap budaya, dan unsur-unsur warisan budaya tak benda, akan menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dari UNESCO untuk pengelolaan warisan budaya dunia yang dijabarkan dalam *5C's Strategic Objectives* yang meliputi *Credibility, Conservation, Capacity Building, Communication, and Communities*. Pelaksanaan aktivitas dan/atau pembangunan dalam kawasan Kompleks Candi Borobudur harus diawali berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kebudayaan.

Persebaran candi yang meluas dan banyaknya jumlah candi di KTA Prambanan yang masih dalam proses pemugaran menjadikan upaya pelestarian diprioritaskan sekaligus pemanfaatannya untuk Pariwisata. Di KTA Yogyakarta, puluhan bangunan cagar budaya yang telah diregistrasi juga terus dilestarikan. Keberadaan kawasan seputar Sumbu Filosofi Yogyakarta yang tengah diajukan sebagai warisan budaya dunia kepada UNESCO juga menjadi prioritas upaya pelestarian.

Pelestarian daya dukung ekosistem objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya mencakup: penataan ruang, pengelolaan pengunjung, dan pelestarian aset fisik, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penataan Ruang

Penataan ruang akan dilaksanakan melalui:

- 1) penataan, fasilitasi, dan penegakan peraturan perundang-undangan mengenai tata ruang di Borobudur, Yogyakarta, dan Prambanan;
- 2) penerapan perizinan dari pemerintah pusat, provinsi, dan/atau kabupaten untuk setiap proyek pembangunan atau renovasi di dalam Kawasan Cagar Budaya Nasional Borobudur, Kawasan Cagar Budaya Nasional Prambanan, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- 3) penataan pembangunan yang berada di Kawasan Cagar Budaya Nasional Borobudur, Kawasan Cagar Budaya Nasional Prambanan, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
- 4) penertiban pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan;
- 5) penertiban ketinggian bangunan agar sesuai dengan ketentuan pengaturan zonasi;
- 6) penetapan peraturan daerah mengenai pengaturan jumlah pendirian dan rekayasa menara BTS khususnya di Kawasan Cagar Budaya Nasional Borobudur, Kawasan Cagar Budaya Nasional Prambanan, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;

7) pengendalian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

- 7) pengendalian terhadap perluasan permukiman dan sebaran kawasan komersial baru yang mengancam Kawasan Cagar Budaya Nasional Borobudur, Kawasan Cagar Budaya Nasional Prambanan, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
  - 8) penetapan kewajiban melakukan kajian sesuai peraturan perundang-undangan untuk semua proyek pembangunan Kawasan Cagar Budaya Nasional Borobudur, Kawasan Cagar Budaya Nasional Prambanan, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta guna menilai dampaknya terhadap atribut dan OUV;
  - 9) penyusunan rencana peruntukan kawasan lindung di Kawasan Cagar Budaya Nasional Borobudur, Kawasan Cagar Budaya Nasional Prambanan, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta;
  - 10) penghijauan khususnya di lereng Pegunungan Menoreh di selatan Kawasan Candi Borobudur untuk revitalisasi sumber daya air;
  - 11) penataan investasi perkotaan di seputar Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta yang berpotensi mengubah lanskap kawasan dan nilai-nilai pentingnya;
  - 12) peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha di Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta terkait keberadaan OUV dan tidak abai terhadap keberadaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; dan
  - 13) peningkatan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dan antar sektor untuk penataan dan pengelolaan tata ruang.
- b. Pengelolaan Pengunjung
- Pengelolaan pengunjung merupakan upaya yang krusial dilaksanakan untuk mengurangi tekanan, khususnya terhadap daya dukung Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan. Arus dan volume kedatangan pengunjung perlu diatur dari sisi sebaran kedatangan (titik masuk), waktu kunjungan, dan jumlah pengunjung dalam satu waktu berdasarkan kapasitas daya tampung. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kelestarian Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan, meningkatkan kualitas pengalaman berwisata candi dan peninggalan bersejarah, serta mendukung upaya perluasan manfaat dengan menyebarkan pengunjung ke DTW di sekitar Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan. Pengelolaan pengunjung di kawasan kedua candi ini akan dilaksanakan melalui:
- 1) penguatan Pengelola untuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2) penyusunan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

- 2) penyusunan Rencana Pengelolaan Pengunjung di Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan;
- 3) pengelolaan jadwal kunjungan yang diperkuat dengan sistem pendaftaran/reservasi secara daring dengan memilih tema tertentu, dan sistem pemantauan arus dan pergerakan wisatawan di Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan, serta didukung dengan sistem respon untuk memfasilitasi kebutuhan wisatawan di lapangan, baik terkait layanan Pariwisata, maupun keselamatan dan keamanan;
- 4) wisatawan hanya diberikan waktu 1 (satu) jam, dan menerima upanat kemudian didampingi oleh pemandu wisata selama berada di wilayah Candi Borobudur. Peran *guide* adalah *quality tourism*, *time keeper*, *liaison officer*, dan *sustainable tourism*.
- 5) penyediaan informasi, termasuk secara daring, untuk meningkatkan edukasi, pemahaman, interpretasi, dan apresiasi masyarakat, pelaku usaha Pariwisata, dan wisatawan;
- 6) pengaturan zonasi atraksi dan aktivitas Pariwisata yang didukung interkoneksi sarana prasarana transportasi yang menghubungkan antar DTW;
- 7) pengaturan titik masuk dan berkumpul wisatawan baik di sekitar gerbang Palbapang, Blondo, Kembanglimus, dan Klagon di Kawasan Candi Borobudur, yang dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas pendukung Pariwisata lainnya untuk mendukung pengaturan arus dan sebaran wisatawan, yang dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah atau instansi yang menangani urusan bidang kebudayaan;
- 8) penyebaran arus wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Candi Borobudur ke candi-candi lain, DTW alam, wisata olahraga dan petualangan, wisata budaya non candi seperti sentra kerajinan dan seni, serta desa-desa wisata di sekitarnya, yang didukung penataan DTW, rute perjalanan dan desa wisata, serta peningkatan interkoneksi sarana prasarana transportasi;
- 9) penyebaran arus wisatawan yang berkunjung ke Kompleks Candi Prambanan dan Situs Ratu Boko ke beberapa museum, *botanical heritage park*, kompleks candi-candi di Bugisan, Kalasan, dan Bokoharjo, wisata alam, wisata olahraga dan petualangan, wisata budaya non candi seperti sentra kerajinan dan seni, serta desa-desa wisata di sekitarnya, yang didukung penataan DTW, rute perjalanan dan desa wisata, serta peningkatan interkoneksi sarana prasarana transportasi; dan
- 10) pengembangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

- 10) pengembangan pola perjalanan yang mendukung penyebaran wisatawan dari Kawasan Candi Borobudur dan Prambanan ke DTW di KSPN potensial lainnya, seperti KSPN Gunung Merapi, KSPN Karimun Jawa, KSPN Klaten dan Solo, KSPN Wonogiri, KSPN Gunung Nglanggeran, dan KSPN Imogiri, dengan dukungan interkoneksi sarana prasarana transportasi.
- c. Pelindungan Aset Cagar Budaya

Pelindungan aset cagar budaya di 3 (tiga) KTA DPN BYP dilaksanakan sesuai dengan standar internasional dan disesuaikan dengan keseimbangan antara misi pelestarian, edukasi, dan kesejahteraan, dengan mengedepankan inklusivitas. Pelaksanaannya mencakup:

  - 1) peningkatan pengawasan rutin terhadap kondisi candi, kualitas bentang pandang, kualitas lingkungan kawasan di sekitarnya, serta lanskap budayanya;
  - 2) peningkatan metode, teknologi, teknik, dan kapasitas sumber daya dalam rangka pemeliharaan aset cagar budaya;
  - 3) pelaksanaan kegiatan pelindungan yang aman bagi cagar budaya dan manusia, serta ramah lingkungan, termasuk mengurangi dampak polusi dan perubahan iklim;
  - 4) pengendalian alih fungsi pemanfaatan lahan yang dapat menurunkan kualitas lanskap budaya dengan menerapkan aturan tata ruang yang tepat; dan
  - 5) peningkatan kesadaran dan partisipasi publik dan wisatawan dalam mendukung pelestarian Kompleks Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan, termasuk menghindari terjadinya kerusakan pada candi akibat perilaku vandalisme.
3. Pelestarian Aset Alam, Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Penanggulangan Bencana
  - a. Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup di DPN BYP diarahkan untuk mempertahankan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam, serta menghindari dan mengurangi kerusakan serta pencemaran. Tata kelola lingkungan difokuskan pada 4 (empat) aspek, yaitu pengelolaan sumber daya alam, pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengolahan sampah spesifik, dan pengolahan air limbah domestik. Pengelolaan sumber daya alam memperhatikan:

    - 1) keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam;
    - 2) pemanfaatan yang selektif dan didukung dengan pemanfaatan riset dan teknologi;

3) penguatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

- 3) penguatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di daerah;
- 4) komitmen, peran serta, dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan; dan
- 5) penegakan regulasi yang disertai upaya promosi/peningkatan pemahaman dan kapasitas serta insentif untuk komitmen pelestarian sumber daya alam. Pelaksanaannya akan mencakup, antara lain:
  - a) manajemen air tanah/penggunaan air tanah secara berkelanjutan, yang didukung kampanye hemat air;
  - b) pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
  - c) perluasan SPAM untuk mencapai akses 100% (seratus persen) air bersih;
  - d) pengawasan perizinan penggunaan air tanah;
  - e) pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - f) rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi sempadan sungai, waduk, pantai, dan mata air;
  - g) perlindungan daerah resapan air tanah;
  - h) integrasi sumur resapan air hujan sebagai persyaratan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/pemutakhiran peraturan daerah IMB dan peningkatan penegakan hukum;
  - i) kaji ulang RTRW provinsi dan kabupaten;
  - j) pengendalian izin tata ruang;
  - k) penambahan Ruang Terbuka Hijau;
  - l) penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS);
  - m) perlindungan dan pelestarian sumber daya air yang didukung pembangunan embung, pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPA) dan Lubang Resapan Biopori (LRB);
  - n) perlindungan erosi fisik dengan DAM penahan, DAM pengendali, terasering, dan talud; dan
  - o) pelestarian kawasan hutan/reboisasi lahan kritis.
- b. Pengolahan Limbah B3 diarahkan selaras dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Tata Cara dan Persyaratan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mengatur penetapan status limbah B3, pengurangan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, penimbunan limbah B3, pembuangan (*dumping*) limbah B3, sistem tanggap darurat dalam pengolahan limbah B3, dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Rencana aksi pengolahan limbah B3 di DPN BYP mencakup, antara lain:

1) penyediaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

- 1) penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) limbah B3 di lokasi proyek yang sesuai karakteristik limbah B3 yang disimpan;
  - 2) pengajuan surat permohonan persetujuan teknis untuk pengolahan limbah B3;
  - 3) penanganan dan pengangkutan limbah B3 bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian LHK; dan
  - 4) studi kelayakan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3 sesuai kebutuhan.
- c. Pengolahan Sampah Spesifik dengan tujuan untuk memandu pengolahan sampah yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi dan juga kegiatan/kejadian terkait di lokasi wisata seperti sampah non B3, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara tidak periodik, dan/atau sampah yang timbul akibat bencana. Prosedur yang akan dilaksanakan secara konsisten mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir sampah. Secara terinci, pelaksanaan pengolahan sampah spesifik mencakup:
- 1) pemutakhiran Rencana Induk Persampahan;
  - 2) kampanye/sosialisasi kepada masyarakat untuk menghentikan pembakaran sampah dan membuang sampah sembarangan;
  - 3) perluasan praktik pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
  - 4) menyediakan TPS 3R, TPS, dan TPA;
  - 5) penggantian dan penambahan truk dan kontainer sampah;
  - 6) penerapan standar prosedur operasional pengolahan sampah spesifik yang dilaksanakan para pekerja konstruksi di area konstruksi;
  - 7) perluasan sentra-sentra pengolahan sampah skala rumah tangga melalui 3R; dan
  - 8) perluasan penerapan daur ulang atau *recycling*:
    - a) plastik yang dikurangi atau di-*recycle* serta perluasan penggunaan produk pengganti seperti plastik *biodegradable*;
    - b) daur ulang kertas dan materi yang layak didaur ulang; dan
    - c) pemanfaatan kembali sampah spesifik, termasuk melalui ekonomi sirkular untuk berkontribusi pada pengurangan dampak limbah dan penciptaan nilai tambah/manfaat ekonomi baru.

d. Pengolahan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

- d. Pengolahan Air Limbah Domestik dari rumah tangga, aktivitas ekonomi, dan kegiatan operasional lainnya di lokasi wisata. Pendekatan yang akan dilaksanakan yaitu meningkatkan pencegahan pencemaran air, penanggulangan pencemaran air, dan pemulihan mutu air. Pelaksanaannya secara terinci akan mencakup:
- 1) menyiapkan rencana induk sanitasi;
  - 2) pengembangan sistem air limbah terpusat/IPAL Komunal fabrikasi/Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T);
  - 3) menyediakan fasilitas pengolahan air limbah domestik (IPLT);
  - 4) pengembangan dan perluasan jaringan lateral dan sambungan rumah air limbah/jaringan air limbah mikro/sambungan Rumah Air Limbah;
  - 5) pengadaan truk tinja;
  - 6) peningkatan LLTT dan sosialisasi dan penyiapan database LLTT;
  - 7) pengadaan dan penambahan truk tinja;
  - 8) sosialisasi dan percontohan pengolahan air limbah industri kecil;
  - 9) penegakan hukum tentang pembuangan air limbah ilegal utamanya dari industri besar dan sedang;
  - 10) perluasan uji kualitas air limbah secara rutin ke laboratorium yang terakreditasi; dan
  - 11) kampanye STBM untuk menghilangkan BABS.
- e. Penanggulangan Bencana
- Penanggulangan bencana difokuskan pada 3 (tiga) parameter pembentuk risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas terkait bencana. Tujuannya untuk memastikan:
- 1) kesiapsiagaan untuk pengelolaan risiko dari tahap pra, saat, dan pascabencana yang didukung penggunaan data, pemantauan, dan analisis yang konsisten;
  - 2) keselamatan manusia, harta benda, kesehatan, mata pencaharian, dan cagar budaya;
  - 3) kapasitas untuk pulih dan tumbuh lebih baik pascabencana;
  - 4) keberlanjutan kegiatan sosial ekonomi, pelestarian cagar budaya, dan pemajuan kebudayaan; dan
  - 5) kolaborasi dan kemitraan masyarakat, pihak swasta, akademisi, dan Pemangku Kepentingan lainnya. Pelaksanaannya mencakup:

a) penyusunan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

- a) penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk menjamin resiliensi dari tahap prabencana, saat bencana, dan pascabencana pelaksanaan, termasuk rencana pemulihan yang lebih baik dengan tetap menjaga kelestarian aset sosial, ekonomi, lingkungan, objek pemajuan kebudayaan, dan cagar budaya;
  - b) penguatan kelembagaan dan kemitraan lintas pemangku kepentingan dalam pengelolaan risiko dan resiliensi bencana serta perubahan iklim;
  - c) peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur penanggulangan bencana, termasuk fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas;
  - d) penguatan sistem penanggulangan bencana *multihazard*, antara lain melalui:
    - (1) pembuatan sistem evakuasi gunung api, banjir, longsor, tsunami, dan gempa bumi;
    - (2) penyiapan Sistem Peringatan Dini antara lain banjir (*Flood Early Warning System*), tsunami (*Tsunami Early Warning System*), longsor (*Landslide Early Warning System*), gunung api, dan gempa bumi (*Earthquake Warning Alert System*);
    - (3) penguatan dan pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana dan Prakiraan Cuaca dan Iklim Berbasis Dampak;
    - (4) penyusunan Rencana Induk Drainase yang menjadi basis peningkatan drainase;
    - (5) pemutakhiran standar prosedur operasional terkait kebencanaan;
    - (6) penguatan basis data dan penilaian risiko bencana *multihazard*; dan
    - (7) pengintegrasian teknologi pintar dan digital teknologi informasi kebencanaan.
  - e) peningkatan pengelolaan ekosistem, misalnya dengan pengerukan sungai terutama endapan dari lahar dingin untuk mengurangi risiko banjir di wilayah sekitar Gunung Merapi.
4. Tata Kelola Sosial Budaya
- Pelaksanaan RIDPN BYP memperhatikan tata kelola sosial budaya sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Pengelolaannya mencakup mitigasi terhadap risiko sosial, pelestarian, serta pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, melalui:

a. pengelolaan . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

- a. pengelolaan risiko sosial difokuskan pada rencana pengelolaan dampak dari pengadaan lahan, mengingat isu kepemilikan lahan masih menjadi tantangan dalam pengembangan Pariwisata di DPN BYP. Di beberapa wilayah masih banyak lahan yang masih belum dilengkapi sertifikat, tumpang tindih data terkait surat keterangan kepala desa dan bukti jual beli untuk lahan yang sama, ketidaksesuaian batas lahan, dan perselisihan harga lahan yang dipengaruhi oleh munculnya spekulator lahan.

Prinsip utama pengadaan lahan adalah bahwa semua langkah yang diambil harus dilakukan untuk meningkatkan serta memperbaiki pendapatan dan standar kehidupan warga yang terkena dampak kegiatan pengadaan lahan. Oleh karena itu, pengelolaan dampak dari pengadaan lahan ditujukan untuk:

- 1) menghindari pengadaan lahan dan penggusuran secara terpaksa;
- 2) menghindari pengadaan lahan dan/atau pemukiman kembali secara terpaksa, atau jika tidak dapat dihindari, perlu upaya mengeksplorasi alternatif desain proyek untuk meminimalisasi dampak; dan
- 3) mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang tidak terhindarkan dari pengadaan lahan, atau dari pembatasan akses terhadap penggunaan lahan atau sumber daya, atau terhadap taman nasional yang ditetapkan secara hukum dan kawasan lindung yang mengakibatkan dampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat terkena dampak dengan: (a) memberikan kompensasi tepat waktu untuk kehilangan aset dengan biaya penggantian yang wajar dan adil; dan (b) membantu orang-orang yang dipindahkan untuk memulihkan dan meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup mereka.

Pelaksanaan pengelolaan dampak pengadaan lahan mencakup:

- 1) penerapan Peraturan Pemerintah mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- 2) identifikasi warga/pihak yang berpotensi terdampak, yang terdiri dari:
  - a) kelompok rentan yang mungkin terdampak secara tidak proporsional atau menghadapi risiko menjadi lebih tersisihkan akibat proyek dan secara khusus mencakup: rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, kepala keluarga penyandang cacat, rumah tangga yang berada di bawah indikator kemiskinan yang berlaku secara umum, dan kepala rumah tangga yang berusia lanjut; dan

b) warga . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

- b) warga/pihak pemilik aset (tanah, bangunan, tanaman, dan lainnya) yang berpotensi terdampak dalam bentuk:
  - kehilangan 10% (sepuluh persen) atau lebih aset produktif total;
  - harus pindah; dan/atau
  - kehilangan 10% (sepuluh persen) atau lebih sumber penghasilan total akibat pengadaan lahan.
- 3) penyediaan informasi yang transparan kepada pihak yang terkena dampak;
- 4) pelibatan warga/pihak yang berpotensi terkena dampak dalam tahapan perencanaan proyek, seperti: penentuan lokasi proyek, jumlah dan bentuk kompensasi/ganti rugi, serta lokasi tempat pemukiman kembali;
- 5) pelaksanaan musyawarah mufakat dengan warga/pihak yang terkena dampak atas ganti rugi yang ditetapkan; dan
- 6) perancangan dan pelaksanaan program pemulihan mata pencaharian bagi warga/pihak yang terkena dampak.

Proses pemantauan dan evaluasi pengelolaan dampak pengadaan lahan dilakukan baik secara internal oleh pemrakarsa atau pelaksana proyek, maupun secara eksternal oleh lembaga pemerintah terkait, sebagai berikut:

- 1) pemantauan rutin dilakukan setiap triwulan pada tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasional;
  - 2) evaluasi pihak eksternal oleh dinas terkait di kabupaten/kota dan pihak pemberi dana yang dilakukan setiap semester dan tahunan; dan
  - 3) pelaporan oleh pemrakarsa proyek dilakukan sesuai jadwal evaluasi.
- b. Pengelolaan dan pelestarian sumber daya benda cagar budaya.
- Perencanaan Pengelolaan kawasan cagar budaya meliputi:
- 1) inventaris potensi kawasan cagar budaya, memuat data dan informasi mengenai lokasi, luas kawasan, zonasi, pemetaan kepemilikan dan peruntukan aset, pemetaan Pemangku Kepentingan, dan potensi kawasan yang meliputi namun tidak terbatas pada potensi aspek arkeologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial.
    - a) aspek arkeologi merupakan data dan informasi terkait cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya di dalam kawasan cagar budaya.
    - b) aspek lingkungan merupakan data dan informasi terkait lingkungan jalan, batas tanah, data keruangan di dalam tata guna lahan, tutupan lahan, peta penggunaan lahan, data potensi ancaman bencana alam, dan kondisi lingkungan di dalam kawasan cagar budaya.

c) aspek . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

- c) aspek ekonomi merupakan data dan informasi terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), lapangan pekerjaan dan/atau sektor usaha, dan potensi usaha yang ada di dalam kawasan cagar budaya.
- d) aspek sosial merupakan data dan informasi terkait kependudukan yang didasarkan pada pengelompokan berdasarkan jenis kelamin dan umur, persebaran kepadatan penduduk, dan objek pemajuan Kebudayaan yang ada di dalam kawasan cagar budaya.

2) Penyusunan Rencana Pengelolaan.

Penyusunan rencana pengelolaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan cagar budaya yang dapat berbentuk hamparan, area tertentu, atau jalur/koridor, yang disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut:

- a) penentuan tujuan pengelolaan, yaitu rumusan kondisi kawasan yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun meliputi:
  - (1) rumusan nilai-nilai penting kawasan yang dilakukan dengan memperhatikan kajian penetapan, zonasi, dan dokumen terkait lainnya.
  - (2) kondisi eksisting Kawasan.
  - (3) identifikasi komponen yang mempengaruhi nilai penting kawasan yang terdiri atas data dan informasi mengenai:
    - identifikasi atribut meliputi cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, lingkungan, dan masyarakat.
    - identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dan/atau mengancam atribut, meliputi faktor primer dan sekunder.
  - (4) rumusan visi dan misi pengelolaan.
- b) Penyusunan strategi dan rencana aksi kegiatan jangka panjang (5 (lima) tahun) dan jangka pendek (1 (satu) tahun) yang disusun berdasarkan tujuan pengelolaan dan memuat mengenai:
  - (1) kebijakan dan strategi untuk mengelola faktor-faktor yang berpengaruh dan/atau mengancam atribut.
  - (2) program-program yang akan dilaksanakan meliputi aktivitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
  - (3) penanggung jawab program.
  - (4) sumber pendanaan.

c) Penyusunan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

- c) Penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi memuat mengenai:
  - (1) metode pemantauan.
  - (2) periode pemantauan.
  - (3) laporan hasil pemantauan.
  - (4) rekomendasi berdasarkan evaluasi.
- 3) Pengesahan Rencana Pengelolaan  
Rencana pengelolaan diajukan kepada dan disahkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan berdasarkan peringkat kawasan cagar budaya.
- 4) Penyesuaian Rencana Pengelolaan  
Dalam hal terjadi penyesuaian terhadap dokumen rencana pengelolaan kawasan cagar budaya, pengelola kawasan wajib mengajukan kembali kepada menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan untuk disahkan kembali.
- 5) Dokumen rencana pengelolaan kawasan cagar budaya pada kawasan cagar budaya yang dikelola oleh masyarakat adat difasilitasi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

BAB IV . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

**BAB IV  
RENCANA AKSI**

Pengembangan Kepariwisata di DPN BYP perlu didukung kolaborasi antar Pemangku Kepentingan untuk saling melengkapi, membangun dialog, dan mengembangkan pemahaman baru tentang strategi pengembangan terbaik. Kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk RIDPN BYP yang mencakup jangka waktu 21 (dua puluh satu) tahun. Sasaran dan arah pengembangan dalam RIDPN BYP diterjemahkan lebih lanjut menjadi rencana aksi dengan rincian pelaksanaan difokuskan pada tahap pertama.

Rencana aksi tersebut diklasifikasi dalam empat 4 (empat) kelompok sesuai dengan tujuan dari penyusunan RIDPN, yaitu:

1. kelompok rencana aksi meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan Pariwisata terpadu dan berkelanjutan mencakup perencanaan dan koordinasi terpadu serta monitoring pengembangan Pariwisata berkelanjutan;
2. kelompok rencana aksi peningkatan infrastruktur dan penataan kawasan yang mencakup peningkatan dan rehabilitasi jalan, transportasi publik regional, infrastruktur spesifik untuk Pariwisata, air bersih sistem perpipaan, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah dan sanitasi, serta drainase dan pengendalian banjir;
3. kelompok rencana aksi meningkatkan perekonomian lokal/masyarakat yang mencakup pengembangan keterampilan, pengembangan usaha Pariwisata Masyarakat dan UMKM, serta konsolidasi komunitas; dan
4. kelompok rencana aksi meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke sektor Pariwisata yang mencakup penawaran IPRO ke calon investor, fasilitasi penanaman modal, dan peningkatan iklim investasi dan penanaman modal sektor Pariwisata yang kondusif di daerah.

Pelaksana dari RIDPN BYP adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha, serta didukung kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, media, dan kelompok masyarakat.

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan RIDPN BYP pada tahap pertama periode 2024 dapat dipenuhi dari sumber anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, antara lain pendanaan swasta, pendanaan di bawah skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta pendanaan mitra pembangunan internasional. Sumber pendanaan dari APBN dapat mencakup pendanaan kementerian/lembaga, serta transfer ke daerah dan dana desa.

Rincian kegiatan, lokasi, target, tahun, dan instansi pelaksana tercantum dalam Matriks Rencana Aksi (Tabel 7) sebagai berikut:

Tabel 7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

Tabel 7. Matriks Rencana Aksi Tahun 2024

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan untuk Memfasilitasi Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan				
1.1	Perencanaan dan Koordinasi Terpadu				
1.1.1	Fasilitasi pokja bersama	Provinsi Jawa Tengah	25 kegiatan	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.1.2	Fasilitasi pokja bersama	Daerah Istimewa Yogyakarta	5 kegiatan	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
1.1.3	Fasilitasi pokja bersama	KTA Borobudur	25 kegiatan	2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang
1.1.4	Fasilitasi pokja bersama	KTA Yogyakarta	5 kegiatan	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

1.1.5 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.1.5	Fasilitasi pokja bersama	KTA Prambanan	12 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman</li><li>• Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten</li></ul>
1.1.6	Koordinasi perencanaan program	Provinsi Jawa Tengah	25 kegiatan	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.1.7	Koordinasi perencanaan program	Daerah Istimewa Yogyakarta	5 kegiatan	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
1.1.8	Koordinasi perencanaan program	KTA Borobudur	25 kegiatan	2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang

1.1.9 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.1.9	Koordinasi perencanaan program	KTA Yogyakarta	5 kegiatan	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
1.1.10	Koordinasi perencanaan program	KTA Prambanan	12 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman</li><li>• Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten</li></ul>
1.1.11	Koordinasi dan pelaksanaan program	Provinsi Jawa Tengah	25 kegiatan	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.1.12	Koordinasi dan pelaksanaan program	Daerah Istimewa Yogyakarta	5 kegiatan	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
1.1.13	Koordinasi dan pelaksanaan program	KTA Borobudur	25 kegiatan	2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang
1.1.14	Koordinasi dan pelaksanaan program	KTA Yogyakarta	5 kegiatan	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
1.1.15	Koordinasi dan pelaksanaan program	KTA Prambanan	12 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman</li><li>• Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten</li></ul>
1.1.16	Koordinasi, monitoring, dan evaluasi program	Provinsi Jawa Tengah	25 kegiatan	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.1.17	Koordinasi, monitoring, dan evaluasi program	Daerah Istimewa Yogyakarta	5 kegiatan	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
1.1.18	Koordinasi, monitoring, dan evaluasi program	KTA Borobudur	25 kegiatan	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penelitian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang
1.1.19	Koordinasi, monitoring, dan evaluasi program	KTA Yogyakarta	5 kegiatan	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
1.1.20	Koordinasi, monitoring, dan evaluasi program	KTA Prambanan	50 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman</li><li>• Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten</li></ul>
1.1.21	Peningkatan tugas dan fungsi Museum dan Cagar Budaya (MCB) Borobudur dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X	<ul style="list-style-type: none"><li>• KTA Borobudur</li><li>• KTA Yogyakarta</li><li>• KTA Prambanan</li></ul>	3 dokumen	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
1.1.22	Peningkatan kapasitas tata kelola kelembagaan desa wisata	<ul style="list-style-type: none"><li>• KTA Borobudur</li><li>• KTA Prambanan</li></ul>	3 kegiatan	2024	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

1.1.23 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.1.23	Peningkatan kapasitas tata kelola kelembagaan Pokdarwis kota	KTA Yogyakarta	5 kegiatan	2024	Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta
1.1.24	Peningkatan kapasitas tata kelola kelembagaan Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) di Kawasan Kotagede	Daerah Istimewa Yogyakarta	1 kegiatan	2024	Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
1.1.25	Revisi Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (RTR) KSN Kawasan Candi Borobudur	KTA Borobudur	1 dokumen	2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1.1.26	Review RTRW, termasuk pengaturan bentang pandang dan intensitas pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provinsi Jawa Tengah</li><li>• Kabupaten Magelang</li><li>• Kota Yogyakarta</li><li>• Kabupaten Kulon Progo</li></ul>	4 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li></ul>

• Dinas . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 99 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo</li><li>• Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta</li></ul>
1.1.27	Penyusunan RDTR di kawasan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabupaten Kulon Progo</li><li>• Kabupaten Sleman</li><li>• Kabupaten Purworejo</li><li>• Perkotaan Prambanan</li></ul>	10 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li><li>• Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo</li><li>• Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman</li><li>• Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Purworejo</li></ul>
1.1.28	Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Borobudur	Borobudur	1 dokumen	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.1.29	Review Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Otorita Borobudur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Jawa Tengah</li></ul>	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan</li></ul>

Pariwisata . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
1.1.30	Menyusun <i>master plan</i> restorasi candi	<ul style="list-style-type: none"><li>• KSPN Borobudur</li><li>• KSPN Prambanan</li></ul>	2 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li><li>• Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>
1.1.31	Penetapan zonasi Dataran Tinggi Dieng dan Gedong Songo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dataran Tinggi Dieng</li><li>• Gedong Songo</li></ul>	2 kebijakan	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
1.1.32	Penyusunan HIA kawasan cagar budaya Borobudur	KTA Borobudur	1 dokumen	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
1.1.33	Penyusunan Peraturan Menteri mengenai Badan Pengelola kawasan cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Provinsi Jawa Tengah</li></ul>	1 dokumen	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

1.1.34 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.1.34	Fasilitasi pengembangan desa wisata penyangga kawasan otorita	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabupaten Purworejo</li><li>• Kabupaten Magelang</li><li>• Kabupaten Kulon Progo</li></ul>	3 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.1.35	Pengembangan kawasan Pariwisata terpadu (kawasan otorita Borobudur)	Kabupaten Purworejo	1 paket	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.1.36	Penyusunan rekomendasi kebijakan investasi termasuk bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provinsi Jawa Tengah</li><li>• Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li><li>• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah</li><li>• Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>

1.1.37 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.1.37	Operasional Balai Pengelola Kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta	5 kegiatan	2024	Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
1.1.38	Pembentukan pengelola Kawasan Borobudur melalui Peraturan Presiden	KTA Borobudur	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi</li><li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li><li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li></ul>
1.1.39	Review dan sinkronisasi Peraturan Daerah tentang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provinsi Jawa Tengah</li><li>• Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Kabupaten Magelang</li><li>• Kabupaten Klaten</li><li>• Kabupaten Sleman</li></ul>	7 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah</li><li>• Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>

• Kabupaten . . .

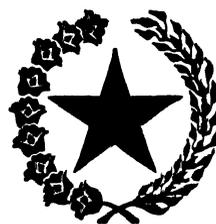


**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 103 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabupaten Bantul</li><li>• Kota Yogyakarta</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten</li><li>• Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman</li><li>• Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</li><li>• Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta</li></ul>
1.1.40	Studi Sungai Tinalah sebagai <i>Longstorage Aeropolis</i>	Kabupaten Kulon Progo	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
1.1.41	Rencana Induk Air Baku Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang	Wilayah Sungai POS (Progo-Opak-Serang)	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta

1.1.42 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.1.42	Studi kebutuhan infrastruktur dan alokasi air untuk mendukung lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)	Daerah Istimewa Yogyakarta	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
1.1.43	Pemutakhiran RISPAM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabupaten Magelang</li><li>• Kabupaten Sleman</li><li>• Kota Yogyakarta</li></ul>	3 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta</li></ul>
1.1.44	Kampanye hemat air	Kecamatan Borobudur	302 RW	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
1.1.45	Kampanye hemat air	Kecamatan Mungkid	144 RW	2024	Perusahaan Daerah Air Minum



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.1.46	Kampanye hemat air	Kecamatan Kotagede	80 RW	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
1.1.47	Kampanye hemat air	Kecamatan Kraton	86 RW	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
1.1.48	Kampanye hemat air	Kecamatan Danurejan	84 RW	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
1.1.49	Kampanye hemat air	Kecamatan Gondomanan	62 RW	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
1.1.50	Kampanye hemat air	Kecamatan Ngampilan	42 RW	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
1.1.51	Kampanye hemat air	Kecamatan Gedongtengen	72 RW	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
1.1.52	Kampanye hemat air	Kecamatan Prambanan (Klaten)	268 Desa	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
1.1.53	Kampanye hemat air	Kecamatan Prambanan (Sleman)	324 RW	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
1.1.54	Manajemen air tanah KTA Yogyakarta	Kota Yogyakarta	20 kegiatan	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

1.1.55 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.1.55	Pemutakhiran rencana induk persampahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan Perkotaan Yogyakarta</li><li>• Kabupaten Magelang</li><li>• Kabupaten Klaten</li></ul>	3 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten</li></ul>
1.1.56	Kampanye kepada masyarakat untuk berhenti melakukan praktik pembakaran sampah dan membuang sampah sembarangan dan mempromosikan pemilahan sampah pada sumbernya serta pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan limbah B3	Kecamatan Borobudur	151 RW	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
1.1.57	Kampanye kepada masyarakat untuk berhenti melakukan praktik pembakaran sampah dan	Kecamatan Mungkid	179 RW	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

membuang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 107 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
	membuang sampah sembarangan dan mempromosikan pemilahan sampah pada sumbernya serta pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan limbah B3				
1.1.58	Kampanye dan penguatan infrastruktur Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA) serta inisiasi zero sampah organik	Kecamatan Kotagede	45 Kelurahan	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
1.1.59	Kampanye kepada masyarakat untuk berhenti melakukan praktik pembakaran sampah dan membuang sampah sembarangan dan mempromosikan pemilahan sampah pada sumbernya serta pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan limbah B3	Kecamatan Kraton	43 RW	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
1.1.60	Kampanye kepada masyarakat untuk berhenti melakukan	Kecamatan Danurejan	42 RW	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

praktik . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 108 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
	praktik pembakaran sampah dan membuang sampah sembarangan dan mempromosikan pemilahan sampah pada sumbernya serta pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan limbah B3				
1.1.61	Kampanye kepada masyarakat untuk berhenti melakukan praktik pembakaran sampah dan membuang sampah sembarangan dan mempromosikan pemilahan sampah pada sumbernya serta pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan limbah B3	Kecamatan Gondomanan	31 RW	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
1.1.62	Kampanye kepada masyarakat untuk berhenti melakukan praktik pembakaran sampah dan membuang sampah sembarangan dan mempromosikan pemilahan	Kecamatan Ngampilan	21 RW	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 109 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
	sampah pada sumbernya serta pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan limbah B3				
1.1.63	Kampanye kepada masyarakat untuk berhenti melakukan praktik pembakaran sampah dan membuang sampah sembarangan dan mempromosikan pemilahan sampah pada sumbernya serta pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan limbah B3	Kecamatan Gedongtengen	36 RW	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
1.1.64	Kampanye kepada masyarakat untuk berhenti melakukan praktik pembakaran sampah dan membuang sampah sembarangan dan mempromosikan pemilahan sampah pada sumbernya serta pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan limbah B3	Kecamatan Prambanan (Klaten)	134 RW	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.1.65	Kampanye kepada masyarakat untuk berhenti melakukan praktik pembakaran sampah dan membuang sampah sembarangan dan mempromosikan pemilahan sampah pada sumbernya serta pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan limbah B3	Kecamatan Prambanan (Sleman)	6 Kelurahan	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
1.1.66	Penyiapan rencana induk sanitasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan Perkotaan Yogyakarta</li><li>• Kabupaten Magelang</li></ul>	2 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</li></ul>
1.1.67	Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabupaten Magelang</li><li>• Kota Yogyakarta</li><li>• Kabupaten Sleman</li><li>• Kabupaten Klaten</li></ul>	4 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten</li></ul>

• Dinas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman</li></ul>
1.1.68	Penegakan hukum tentang pembuangan air limbah ilegal (industri besar dan sedang)	Kabupaten Temanggung	25 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung</li><li>• Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung</li></ul>
1.1.69	Penegakan hukum tentang pembuangan air limbah ilegal (industri besar dan sedang)	Kabupaten Magelang	25 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang</li></ul>
1.1.70	Penegakan hukum tentang pembuangan air limbah ilegal (industri besar dan sedang)	Kota Magelang	25 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang</li><li>• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang</li></ul>

1.1.71 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.1.71	Penegakan hukum tentang pembuangan air limbah ilegal (industri besar dan sedang)	Kabupaten Klaten	25 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten</li><li>• Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten</li></ul>
1.1.72	Penegakan hukum tentang pembuangan air limbah ilegal (industri besar dan sedang)	Kabupaten Kulon Progo	25 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo</li><li>• Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo</li></ul>
1.1.73	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Kabupaten Bantul	66 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</li><li>• Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</li></ul>

1.1.74 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 113 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.1.74	Penegakan hukum tentang pembuangan air limbah ilegal (industri besar dan sedang)	Kabupaten Gunungkidul	25 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul</li><li>• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul</li></ul>
1.1.75	Penegakan hukum tentang pembuangan air limbah ilegal (industri besar dan sedang)	Kabupaten Sleman	25 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman</li><li>• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman</li></ul>
1.1.76	Penegakan hukum tentang pembuangan air limbah ilegal (besar, sedang, dan kecil)	Kota Yogyakarta	25 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta</li></ul>
1.1.77	Sosialisasi dan proyek percontohan pengolahan air limbah (industri kecil)	Kabupaten Temanggung	10 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung</li><li>• Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan</li></ul>

Menengah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					Menengah Kabupaten Temanggung
1.1.78	Sosialisasi dan proyek percontohan pengolahan air limbah (industri kecil)	Kabupaten Magelang	10 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang</li></ul>
1.1.79	Sosialisasi dan proyek percontohan pengolahan air limbah (industri kecil)	Kota Magelang	10 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang</li><li>• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang</li></ul>
1.1.80	Sosialisasi dan proyek percontohan pengolahan air limbah (industri kecil)	Kabupaten Kulon Progo	10 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo</li><li>• Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo</li></ul>
1.1.81	Pengendalian pencemaran lingkungan	Kabupaten Bantul	10 kegiatan	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

1.1.82 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 115 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.1.82	Sosialisasi dan proyek percontohan pengolahan air limbah (industri kecil)	Kabupaten Gunungkidul	10 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul</li><li>• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul</li></ul>
1.1.83	Sosialisasi dan proyek percontohan pengolahan air limbah (industri kecil)	Kabupaten Sleman	2 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman</li><li>• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman</li></ul>
1.1.84	Sosialisasi dan proyek percontohan pengolahan air limbah (industri kecil)	Kota Yogyakarta	10 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta</li></ul>
1.1.85	Peningkatan divisi operasi dan pemeliharaan sistem drainase atau pembentukan divisi baru di setiap Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabupaten Magelang</li><li>• Kabupaten Klaten</li><li>• Kabupaten Sleman</li><li>• Kota Yogyakarta</li></ul>	4 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten</li></ul>

• Pemerintah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 116 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemerintah Kabupaten Sleman</li><li>• Pemerintah Kota Yogyakarta</li></ul>
1.1.86	Pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kabupaten Temanggung	8.825 ha	2024	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung
1.1.87	Pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kabupaten Magelang	9.527 ha	2024	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang
1.1.88	Pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kabupaten Klaten	25.000 ha	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten
1.1.89	Pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kabupaten Kulon Progo	10.530 ha	2024	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo
1.1.90	Pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kabupaten Bantul	641 ha	2024	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul
1.1.91	Pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kabupaten Gunungkidul	48.537 ha	2024	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul
1.1.92	Pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kabupaten Sleman	1.598 ha	2024	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman

1.1.93 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 117 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.1.93	Pelindungan daerah resapan air tanah	Kabupaten Temanggung	9.732 ha	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung
1.1.94	Pelindungan daerah resapan air tanah	Kabupaten Magelang	100 ha	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
1.1.95	Pelindungan daerah resapan air tanah	Kabupaten Gunungkidul	87.014 ha	2024	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul
1.1.96	Pelindungan daerah resapan air tanah	Kabupaten Sleman	23.683 ha	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman
1.1.97	Mengintegrasikan sumur resapan air hujan sebagai persyaratan dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabupaten Magelang</li><li>• Kabupaten Klaten</li><li>• Kota Yogyakarta</li></ul>	3 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang</li><li>• Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten</li><li>• Pemerintah Kota Yogyakarta</li></ul>

1.1.98 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 118 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.1.98	Optimalisasi peran kelembagaan Kepariwisataan swasta dan masyarakat	KTA Borobudur	5 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li><li>• Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah</li><li>• Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>
1.1.99	Optimalisasi peran kelembagaan Kepariwisataan swasta dan masyarakat	KTA Prambanan	5 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li><li>• Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah</li><li>• Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>
1.1.100	Optimalisasi peran kelembagaan Kepariwisataan swasta dan masyarakat	KTA Yogyakarta	5 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li></ul>

• Dinas . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 119 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>
1.1.101	Penyediaan statistik wisatawan mancanegara di destinasi Pariwisata prioritas ( <i>Mobile Positioning Data</i> )	Daerah Istimewa Yogyakarta	2 layanan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li><li>• Badan Pusat Statistik</li></ul>
1.1.102	Pelaksanaan forum sosialisasi	KTA Borobudur	2 kegiatan	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
1.1.103	Pelaksanaan forum sosialisasi	KTA Yogyakarta	2 kegiatan	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
1.2	Monitoring Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan				
1.2.1	Fasilitasi penyiapan destinasi Pariwisata berkelanjutan (sosialisasi dan <i>workshop</i> Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Provinsi Jawa Tengah</li></ul>	4 Desa Wisata	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Peningkatan Infrastruktur dan Penataan Kawasan				

2.1 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 120 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.1	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan				
Jalan Nasional-Akses Eksternal					
2.1.1	Pembangunan <i>Fly Over</i> Canguk (Magelang)	Magelang, Jawa Tengah	500 meter	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1.2	Pembangunan <i>Fly Over</i> Arteri (Simpang Madukoro)	Semarang, Jawa Tengah	500 meter	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1.3	Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provinsi Jawa Tengah</li><li>• Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>	96,57 kilometer	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1.4	Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provinsi Jawa Tengah</li><li>• Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>	74,94 kilometer	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jalan Provinsi-Akses Eksternal					
2.1.5	Pembangunan JORR Timur ruas Prambanan-Piyungan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Piyungan-Bantul</li><li>• Prambanan-Sleman</li></ul>	10,3 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
2.1.6	Peningkatan jalan dan jembatan Provinsi Daerah Istimewa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prambanan Sleman</li></ul>	2 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber

Yogyakarta . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 121 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
	Yogyakarta Ruas Prambanan-Gayamharjo				Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
2.1.7	Pengembangan keselamatan transportasi jalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ruas Klangon-Tempel	Jalan Provinsi Klangon-Tempel, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	2 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
2.1.8	Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jalan Daerah Istimewa Yogyakarta	2 paket	2024	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.1.9	Pemeliharaan rutin Jalan Provinsi Salaman-Borobudur Provinsi Jawa Tengah	Jalan Provinsi Salaman-Borobudur, Provinsi Jawa Tengah	8 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
2.1.10	Pemeliharaan rutin Jalan Provinsi Jawa Tengah ruas Blondo-Mendut	Jalan Provinsi Blondo-Mendut, Provinsi Jawa Tengah	8 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
2.1.11	Peningkatan jalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ruas Gading-Playen	Daerah Istimewa Yogyakarta	2,83 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta

2.1.12 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 122 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.1.12	Peningkatan Jalan Kabupaten Borobudur-Pakem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Salaman</li><li>• Kabupaten Magelang</li><li>• Provinsi Jawa Tengah</li></ul>	3,5 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
2.1.13	Perbaikan jembatan kabupaten	Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
2.1.14	Perbaikan jembatan kabupaten	Desa Kenalan Kecamatan Borobudur	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
2.1.15	Perbaikan jembatan kabupaten	Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
2.1.16	Perbaikan jembatan kabupaten	Desa Majaksingi Kecamatan Borobudur	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
2.1.17	Perbaikan jembatan kabupaten	Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

2.1.18 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 123 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.1.18	Perbaiki jembatan kabupaten	Desa Giritengah Kecamatan Borobudur	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
2.1.19	Perbaiki jembatan kabupaten	Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
2.1.20	Perbaiki jembatan kabupaten	Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
2.1.21	Perbaiki jembatan kabupaten	Desa Borobudur Kecamatan Borobudur	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
2.1.22	Perbaiki jembatan kabupaten	Desa Giripurno Kecamatan Borobudur	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
2.1.23	Peningkatan jalan Jalur Ngargosari (Kulon Progo)-Ngargoretno-Paripurno-Menoreh-	Jalan Ngargosari- Ngargoretno, Kabupaten Kulon Progo	6,9 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

Ngadirejo . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 124 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
	Ngadirejo-Tegalarum- Kembanglimus-Borobudur				
2.1.24	Peningkatan jalan Jalur Ngargosari (Kulon Progo)- Ngargoretno-Giripurno- Giritengah-Karanganyar- Tanjungsari-Tuksongo- Borobudur	Jalan Ngargosari- Ngargoretno, Kabupaten Kulon Progo	8 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
2.1.25	Peningkatan jalan koridor Borobudur-Wanurejo-Candirejo- Sambeng-Bigaran-Jagalan (Kabupaten Kulon Progo)	Jalan Borobudur- Bigaran, Kabupaten Magelang	7 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
2.1.26	Peningkatan jalan koridor Borobudur-Mendut-Progowati- Adikarto-Tanjung-Sukorini- Sriwedari-Blongkeng-Jagalan (Kabupaten Kulon Progo)	Jalan Mendut-Tanjung Japuan, Kabupaten Magelang	2 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

2.1.27 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.1.27	Rehabilitasi jalan Kabupaten Sleman, ruas Ledoksari-Nglengkong	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabupaten Sleman</li><li>• Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>	4,7 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman
2.1.28	Rehabilitasi jalan Kabupaten Sleman, ruas Marangan-Nglengkong	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabupaten Sleman</li><li>• Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>	2,3 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman
2.1.29	Penyiapan <i>readiness criteria</i> pelebaran Jalan Pasar Plono-Kebun The Nglinggo (akses jalan dan jembatan menuju Lahan Otoritatif BOB)	Kabupaten Kulon Progo	3,5 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo
2.2	Transportasi Publik Regional				
2.2.1	Subsidi angkutan antarmoda di KSPN Borobudur	<ul style="list-style-type: none"><li>• KSPN Borobudur</li><li>• Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>	9 kegiatan	2024	Kementerian Perhubungan
2.2.2	Bus Rapid Transit (BRT) Koridor Prambanan-Bandar Udara Adi	Daerah Istimewa Yogyakarta	2 paket	2024	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sucipto . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 126 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
	Sucipto-Terminal Jombor-Yogyakarta-Gamping				
2.2.3	Penyusunan DED rehabilitasi terminal tipe A Giwangan	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	2024	Kementerian Perhubungan
2.2.4	Revitalisasi terminal tipe B Jombor	Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.2.5	Revitalisasi terminal tipe C Borobudur	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang
2.2.6	Revitalisasi terminal tipe B Wates	Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.2.7	Pengembangan dan pengelolaan simpul transportasi: <i>Park and Ride</i> Prambanan	Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.2.8	Pengembangan dan pengelolaan simpul transportasi: <i>Park and Ride</i>	Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta

*Ride . . .*



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 127 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
	<i>Ride Gamping</i> (Integrasi Ambarketawang)				
2.2.9	Review RIPDA Daerah Istimewa Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.2.10	Penyediaan angkutan umum antarkota dalam provinsi koridor Stasiun Kutoarjo ke Kawasan Wisata Borobudur	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
2.2.11	Penyediaan layanan bus <i>shuttle</i> ke destinasi wisata di KTA Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.2.12	Peningkatan halte TransJogja di sekitar KTA Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.2.13	Studi sistem transportasi perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.3	Infrastruktur Spesifik untuk Pariwisata				
2.3.1	Penataan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon,	Kabupaten Magelang	10,4 hektare	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

termasuk . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 128 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
	termasuk Museum Borobudur dan penataan zona 2 menjadi zona hijau				
2.3.2	Pengadaan tanah penataan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon	Kabupaten Magelang	10,4 hektare	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</li><li>• Pemerintah Kabupaten Magelang</li><li>• Pemerintah Desa Borobudur</li><li>• PT Taman Wisata Candi Borobudur</li></ul>
2.3.3	Pembangunan wisata kreatif Simpang Mendut	Kabupaten Magelang	5 paket	2024	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang
2.3.4	Pembangunan TPA Pasuruhan	Kabupaten Magelang	1 paket	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.3.5	Penataan kawasan Candi Arjuna, Aswatama, dan Kawah Sikidang	Kabupaten Banjarnegara	1 paket	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.3.6	Penataan kawasan Telaga Warna, Bukit Sikunir, dan Kawah Sikidang	Kabupaten Wonosobo	1 paket	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2.3.7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.7	Penyiapan <i>readiness criteria</i> penataan <i>rest-stop</i> di sepanjang Sumbu Imajiner	Kabupaten Magelang	5 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang
2.3.8	Penyusunan <i>guideline</i> wajah dan lanskap kawasan di sepanjang garis imajiner Mendhut-Pawon Borobudur	KTA Borobudur	1 paket	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.3.9	Penataan candi dan situs di dalam KTA Borobudur	Kabupaten Magelang	2.650 m <sup>2</sup>	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.3.10	Penyiapan <i>readiness criteria</i> penataan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)-Punthuk Cemuris ( <i>viewing point</i> )	Kabupaten Magelang	1.650 m <sup>2</sup>	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang
2.3.11	Penataan jalur wara wiri ( <i>shuttle service</i> )	Kabupaten Magelang	5 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• PT Taman Wisata Candi Borobudur</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang</li></ul>

2.3.12 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.12	Penataan desa wisata Bigaran	Kabupaten Magelang	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang</li></ul>
2.3.13	Anjungan hidroponik	Kabupaten Magelang	5 ha	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
2.3.14	Pembangunan <i>camping ground</i> , kampung dolanan	Kabupaten Magelang	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang</li></ul>
2.3.15	Borobudur <i>Island Park</i>	Kabupaten Magelang	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.16	Galeri bambu dan kerajinan di Bukit Bipitik, penataan hutan bambu	Kabupaten Magelang	1 paket	2024	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang
2.3.17	Penataan kawasan desa wisata	Kabupaten Magelang	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang</li></ul>
2.3.18	Pembangunan pasar wisata, industri pengolahan air minum	Kabupaten Magelang	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang</li></ul>
2.3.19	Pembangunan <i>rest area</i>	Kabupaten Magelang	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 132 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.20	Pembangunan taman wisata dan <i>Rest Area</i> Tegalarum	Kabupaten Magelang	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang</li></ul>
2.3.21	Penataan kawasan Jalan Desa Wisata Tuksongo, Gardu Pandang Watu Adeg	Kabupaten Magelang	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</li></ul>
2.3.22	Pembuatan Taman Agrowisata " <i>Honey Bee Garden</i> "	Kabupaten Magelang	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</li></ul>

2.3.23 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.23	Penataan Jalan Kawasan Wisata, sentra pengolahan nanas	Kabupaten Magelang	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang,</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</li></ul>
2.3.24	Penataan kawasan obyek wisata Punthuk Nduwet, Punthuk Marhaen	Kabupaten Magelang	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</li></ul>
2.3.25	Penataan kawasan wisata Ngargosari	Kabupaten Magelang	2 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang</li></ul>
2.3.26	Pembangunan destinasi wisata, Patung Bukit Mumer	Kabupaten Magelang	3 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang</li></ul>
2.3.27	Pembangunan Destinasi Wisata Borobudur <i>Art Center</i>	Kabupaten Magelang	4 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang</li></ul>
2.3.28	Penataan kawasan Wringinputih	Kabupaten Magelang	2 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang</li></ul>
2.3.29	Penataan kawasan obyek wisata Punthuk Cemuris	Kabupaten Magelang	4 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang</li></ul>

2.3.30 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 135 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.30	Penataan kawasan obyek wisata Pesanggrahan dan Monumen Gerabah	Kabupaten Magelang	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang</li></ul>
2.3.31	Penataan obyek wisata Goa Gondopurowangi dan Makam Petilasan Pangeran Diponegoro	Kabupaten Magelang	3 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang</li></ul>
2.3.32	Bantuan sarana dan prasarana pengembangan obyek wisata	Kabupaten Magelang	2 desa	2024	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2.3.33	Pengembangan area cagar budaya Kawasan Jetis	Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li><li>• Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>

2.3.34 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.34	Revitalisasi kawasan cagar budaya Kotabaru	Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kota Yogyakarta</li></ul>
2.3.35	Pengembangan Kampung Jogoyudan	Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
2.3.36	Pengembangan Kampung Wisata Cokrodiningratan	Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
2.3.37	Pengembangan potensi lahan parkir serta Ruang Terbuka Hijau segmen Margo Utomo	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
2.3.38	Pengembangan wisata segmen Margo Utomo	Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta	2 paket	2024	Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta

2.3.39 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 137 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.39	Pengembangan area teras Malioboro	Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta</li></ul>
2.3.40	Pengembangan kampung Suryatmajan dan kampung Wisata Sosromenduran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Danurejan</li><li>• Kecamatan Gedongtengen</li></ul>	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta
2.3.41	Pengembangan kampung Ratmakan	Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta</li></ul>
2.3.42	Pengembangan Kawasan Kampung Ketandan	Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta</li></ul>
2.3.43	Pengembangan kampung Bakpia-Pathuk/Ngampilan	Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta</li></ul>

• Dinas . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 138 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
2.3.44	Pengembangan tempat khusus parkir pasar sore	Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
2.3.45	Pengembangan lahan parkir eks - Universitas Pembangunan Nasional	Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
2.3.46	Pengembangan jalan KH. Ahmad Dahlan	• Kecamatan Gondomanan • Kecamatan Ngampilan	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta
2.3.47	Revitalisasi kawasan cagar budaya Kraton	Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta • Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Yogyakarta

• Dinas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>
2.3.48	Pengembangan Kampung Panembahan	Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta</li></ul>
2.3.49	Pengembangan Kampung Wisata Tamansari dan Kampung Wisata Kadipaten	Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta</li></ul>
2.3.50	Pengembangan Kampung Wisata Kauman	Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta</li></ul>
2.3.51	Penataan jalan Senopati	Kota Yogyakarta	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta

2.3.52 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.52	Pengembangan jalan dan taman parkir Senopati	Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta</li></ul>
2.3.53	Pengembangan lahan parkir Terminal Ngabean	Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
2.3.54	Pengembangan koleksi ruang pamer dan penyesuaian alur cerita Museum Sonobudoyo	Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>
2.3.55	Pengembangan akses dan jalan Taman Sari dan Kraton	Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta	9 kilometer	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta</li></ul>
2.3.56	Pengembangan wisata virtual segmen Kraton	Kecamatan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>

2.3.57 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.57	Penataan Jalan Pendukung sekitar Sumbu Filosofi	Kecamatan Gondomanan dan Ngampilan, Kota Yogyakarta	2 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta</li></ul>
2.3.58	Pengembangan Lapangan Minggiran menjadi Ruang Terbuka Hijau Multiguna	Kecamatan Mantriweron, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>
2.3.59	Revitalisasi bangunan cagar budaya Pangung Krapyak dan Area Sekelilingnya	Kecamatan Sewon, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta</li></ul>

2.3.60 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.60	Pengembangan kampung Mijen dan Kampung Wisata Niti Gedongkiwo	Kecamatan Mantriaron, Kota Yogyakarta	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta</li></ul>
2.3.61	Pengembangan Jalan segmen Plengkung Gading-Krapyak	Kecamatan Kraton dan Mantriaron, Kota Yogyakarta	2 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
2.3.62	Renovasi dan penataan area Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) sebagai <i>rest stop</i> dan lahan parkir	Kecamatan Mantriaron Kota Yogyakarta	1 paket	2024	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
2.3.63	Pengembangan kawasan Prowirotaman	Kecamatan Mantriaron Kota Yogyakarta	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>
2.3.64	Penyiapan <i>readiness criteria</i> pembuatan Hutan Mini Panggung Krapyak dan <i>visitor center</i> segmen	Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Plengkung . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
	Plengkung Gading-Panggung Krapyak				
2.3.65	Pengembangan wisata virtual Plengkung Gading-Panggung Krapyak	Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>
2.3.66	Penyiapan <i>readiness criteria</i> pengembangan segmen Gading-Panggung Krapyak	Kecamatan Danurejan	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta
2.3.67	Penyiapan <i>readiness criteria</i> pedestrianisasi Jalan Utama di dalam Zona 1-2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kelurahan Purbayan</li><li>• Kelurahan Jagalan</li></ul>	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
2.3.68	Revitalisasi Cepuri keliling Kotagede	Kota Yogyakarta	1 paket	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2.3.69 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 144 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.69	Penyiapan dokumen usulan revitalisasi Pasar Kotagede/Pasar Legi	Kota Yogyakarta	1 dokumen	2024	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
2.3.70	Revitalisasi Kawasan Kedaton dan Watu Gilang	Kota Yogyakarta	1 paket	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.3.71	Pembangunan Museum Perak dan Museum Kotagede sebagai pusat informasi kawasan di Rumah Kalang Tegalgendu	Kota Yogyakarta	1 paket	2024	Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.3.72	Pedestrianisasi dan penataan fasad bangunan di Jalan Mondorakan	Kota Yogyakarta	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta
2.3.73	Adaptasi bangunan cagar budaya Kelurahan Purbayan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Kotagede</li><li>• Kecamatan Sewon</li><li>• Kelurahan Purbayan</li></ul>	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li><li>• Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>

2.3.74 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.74	Bangunan cagar budaya Kelurahan Jagalan	Kelurahan Jagalan	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li><li>• Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>
2.3.75	Revitalisasi Jagang Selatan: pembangunan Embung Mataram	Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul	1 paket	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.3.76	Penyiapan dokumen usulan ekstensifikasi Pasar Singosaren	Desa Singosaren, Kabupaten Bantul	1 dokumen	2024	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
2.3.77	Penyiapan <i>readiness criteria</i> pembangunan Taman Pintar 2: <i>Aquatic Art Tech Park</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kelurahan Warungboto</li><li>• Kelurahan Pandeyan</li><li>• Kelurahan Prenggan</li></ul>	3,19 ha	2024	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta
2.3.78	Penyiapan <i>readiness criteria</i> pembangunan Talud di sepanjang Sungai Gajah Wong yang masuk ke dalam <i>EcoDistrict</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kelurahan Warungboto</li><li>• Kelurahan Pandeyan</li><li>• Kelurahan Prenggan</li></ul>	2.000 m <sup>2</sup>	2024	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.79	Penyiapan <i>readiness criteria</i> pembuatan pilot project Kawasan <i>EcoDistrict</i> Skala Kampung	Kelurahan Prenggan	23.360 m <sup>2</sup>	2024	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta
2.3.80	Pembangunan Gajah Wong <i>Learning Center</i>	Kelurahan Prenggan	500 m <sup>2</sup>	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.3.81	Pembangunan percontohan ( <i>prototype</i> ) pedestrian Jalan Pramuka	Kelurahan Giwangan	2.800 m <sup>2</sup>	2024	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta
2.3.82	Penataan, perencanaan, dan penentuan tema Klaster bersama dengan Kinerja Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) Kotagede	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kelurahan Rejowinangun</li><li>• Kelurahan Prenggan</li><li>• Kelurahan Purbayan</li><li>• Kota Yogyakarta</li><li>• Desa Jagalan</li><li>• Desa Singosaren</li><li>• Kabupaten Bantul</li></ul>	1 paket	2024	Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.83	Bangunan rumah kalang atau rumah tradisional sebagai <i>living museum</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kelurahan Rejowinangun</li><li>• Kelurahan Prenggan</li><li>• Kelurahan Purbayan</li><li>• Kota Yogyakarta</li><li>• Desa Jagalan</li><li>• Desa Singosaren</li><li>• Kabupaten Bantul</li></ul>	1 paket	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.3.84	Pengembangan kampung wisata Rejowinangun	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Kotagede</li><li>• Kota Yogyakarta</li></ul>	1 paket	2024	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
2.3.85	Pengembangan kampung wisata Purbayan dan Prenggan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Kotagede</li><li>• Kota Yogyakarta</li></ul>	1 paket	2024	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
2.3.86	Pengembangan kampung wisata Pandean	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Umbulharjo</li><li>• Kota Yogyakarta</li></ul>	1 paket	2024	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
2.3.87	Peningkatan kualitas rumah swadaya untuk kawasan Pariwisata (untuk pondok wisata)	24 kampung wisata di Kota Yogyakarta	340 unit	2024	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

2.3.88 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.88	Pengembangan sarana hunian pendukung kawasan Pariwisata	17 kampung wisata di Kota Yogyakarta	228 unit	2024	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
2.3.89	Penyiapan <i>readiness criteria</i> pembangunan Anjungan Cerdas Bugisan	Kabupaten Klaten	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Klaten
2.3.90	Pembuatan dan peletakan penunjuk arah dalam zona kawasan wisata	KTA Prambanan	1 paket	2024	PT Taman Wisata Candi Borobudur
2.3.91	Pelestarian Situs Candi Plaosan	KTA Prambanan	1 paket	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.3.92	Pelestarian Situs Candi Sewu	KTA Prambanan	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li><li>• PT Taman Wisata Candi Borobudur</li></ul>
2.3.93	Pelestarian Situs Candi Lumbung, Situs Candi Bubrah, dan Candi Gana	KTA Prambanan	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li></ul>

• PT Taman . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					• PT Taman Wisata Candi Borobudur
2.3.94	Pelestarian Situs Candi Sojiwan	Situs Candi Sojiwan	1 paket	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.3.95	Pelestarian Situs Candi Prambanan	KTA Prambanan	1 paket	2024	• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • PT Taman Wisata Candi Borobudur
2.3.96	Pelestarian Candi Kedulan	Kalasan, Sleman	1 paket	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.3.97	Pelestarian Candi Sari	Kalasan, Sleman	1 paket	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.3.98	Pelestarian Candi Kalasan	Kalasan, Sleman	1 paket	2024	• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

• Dinas . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 150 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					• Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.3.99	Pelestarian Candi Ijo	Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman	1 paket	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.3.100	Pelestarian Candi Barong	Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman	1 paket	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.3.101	Pelestarian Candi Dawangsari	Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman	1 paket	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.3.102	Pelestarian Candi Banyunibo	Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman	1 paket	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.3.103	Pelestarian Candi Miri	Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman	1 paket	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2.3.104 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.104	Pelestarian Situs Arca Gupolo dan Arca Ganesha	Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman	1 paket	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.3.105	Peningkatan kapasitas SDM, objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya (termasuk SDM pemerintah)	KTA Prambanan	3 candi	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li><li>• Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>
2.3.106	Pemasangan <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) dan panel media informasi wisata candi-candi di kawasan Prambanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan Prambanan</li><li>• Candi Prambanan</li><li>• Situs Ratu Boko</li><li>• Candi Ijo</li><li>• Candi Barong</li><li>• Candi Banyunibo</li><li>• Candi Sari</li><li>• Candi Kalasan</li><li>• Candi Kedulan</li><li>• Tebing Breksi</li></ul>	10 paket	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta

2.3.107 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 152 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.3.107	Penyiapan <i>readiness criteria</i> pembangunan Kampung Agro	Kecamatan Tempel	1 dokumen	2024	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman
2.3.108	Penyiapan <i>readiness criteria</i> penanda masuk DIY	Kecamatan Tempel	1 dokumen	2024	Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta
2.3.109	Dukungan pengembangan desa wisata	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Klaten	2 kegiatan	2024	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
2.3.110	Unit Pelaksana Teknis Dinas, Agro Techno Park Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kabupaten Klaten	1 paket	2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten
2.4	Air Bersih Sistem Perpipaan				
2.4.1	SPAM Regional Kartamantul II pada kegiatan Jaringan Pipa Distribusi	Kabupaten Bantul	130 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
2.4.2	SPAM Regional Kartamantul II pada kegiatan Jaringan Pipa Distribusi	Kabupaten Sleman	49 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman

2.4.3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.4.3	SPAM Regional Kartamantul II pada kegiatan Jaringan Pipa Distribusi	Kota Yogyakarta	346 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
2.4.4	SPAM Regional Kartamantul II pada kegiatan Sambungan Rumah	Kabupaten Bantul	4.320 SR	2024	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul
2.4.5	SPAM Regional Kartamantul II pada kegiatan Sambungan Rumah	Kabupaten Sleman	1.620 SR	2024	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sleman
2.4.6	SPAM Regional Kartamantul II pada kegiatan Sambungan Rumah	Kota Yogyakarta	17.280 SR	2024	Perusahaan Daerah Air Minum Kota Yogyakarta
2.4.7	Pembangunan SPAM Kamijoro Kapasitas 150 liter/detik berupa Unit Instalasi Pengolahan Air untuk Layanan Kabupaten Kulon Progo	Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2.4.8 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.4.8	SPAM Kamijoro pada kegiatan pipa transmisi	Kabupaten Kulon Progo	31 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.4.9	SPAM Kamijoro pada kegiatan jaringan pipa distribusi	Kabupaten Kulon Progo	737 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo
2.4.10	SPAM Kamijoro pada kegiatan sambungan rumah	Kabupaten Kulon Progo	2.175 SR	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
2.4.11	Penyiapan <i>readiness criteria</i> pembangunan Bendungan Bener (DAM) pada SPAM Regional Bener	Provinsi Jawa Tengah	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
2.4.12	Perluasan IKK Air Bersih Mungkid	Kecamatan Mungkid	11.181 SR	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang</li><li>• Perusahaan Daerah Air Minum</li></ul>
2.4.13	Perluasan IKK Air Bersih Prambanan (Klaten)	Kecamatan Prambanan (Klaten)	2.032 SR	2024	Perusahaan Daerah Air Minum

2.4.14 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 155 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.4.14	Perluasan IKK Air Bersih Prambanan (Sleman)	Kecamatan Prambanan (Sleman)	1.524 SR	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Sleman</li><li>• Perusahaan Daerah Air Minum</li></ul>
2.4.15	Pengurangan kebocoran Jaringan PDAM	Kecamatan Borobudur	3 paket	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
2.4.16	Pengurangan kebocoran Jaringan PDAM	Kecamatan Mungkid	4 paket	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
2.4.17	Pengurangan kebocoran Jaringan PDAM	Kecamatan Kotagede	1 paket	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
2.4.18	Pengurangan kebocoran Jaringan PDAM	Kecamatan Kraton	4 paket	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
2.4.19	Pengurangan kebocoran Jaringan PDAM	Kecamatan Danurejan	5 paket	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
2.4.20	Pengurangan kebocoran Jaringan PDAM	Kecamatan Gondomanan	2 paket	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
2.4.21	Pengurangan kebocoran Jaringan PDAM	Kecamatan Ngampilan	4 paket	2024	Perusahaan Daerah Air Minum

2.4.22 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 156 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.4.22	Pengurangan kebocoran Jaringan PDAM	Kecamatan Gedongtengen	8 paket	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
2.4.23	Pengurangan kebocoran Jaringan PDAM	Kecamatan Prambanan (Klaten)	1 paket	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
2.4.24	Pengurangan kebocoran Jaringan PDAM	Kecamatan Prambanan (Sleman)	2 paket	2024	Perusahaan Daerah Air Minum
2.5	Pengelolaan Sampah				
2.5.1	Pembangunan tempat pemindahan/daur ulang sampah tingkat kelurahan (TPS 3R)	Kecamatan Borobudur	20 lokasi	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
2.5.2	Pembangunan tempat pemindahan/daur ulang sampah tingkat kelurahan (TPS 3R)	Kecamatan Mungkid	15 lokasi	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
2.5.3	Pembangunan tempat pemindahan/daur ulang sampah tingkat kelurahan (TPS 3R)	Kecamatan Kotagede	3 lokasi	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
2.5.4	Pembangunan tempat pemindahan/daur ulang sampah tingkat kelurahan (TPS 3R)	Kecamatan Kraton	3 lokasi	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

2.5.5 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 157 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.5.5	Pembangunan tempat pemindahan/daur ulang sampah tingkat kelurahan (TPS 3R)	Kecamatan Danurejan	3 lokasi	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
2.5.6	Pembangunan tempat pemindahan/daur ulang sampah tingkat kelurahan (TPS 3R)	Kecamatan Gondomanan	2 lokasi	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
2.5.7	Pembangunan tempat pemindahan/daur ulang sampah tingkat kelurahan (TPS 3R)	Kecamatan Ngampilan	2 lokasi	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
2.5.8	Pembangunan tempat pemindahan/daur ulang sampah tingkat kelurahan (TPS 3R)	Kecamatan Gedongtengen	2 lokasi	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
2.5.9	Pembangunan tempat pemindahan/daur ulang sampah tingkat kelurahan (TPS 3R)	Kecamatan Banguntapan	1 lokasi	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
2.5.10	Pembangunan tempat pemindahan/daur ulang sampah tingkat kelurahan (TPS 3R)	Kecamatan Prambanan (Sleman)	5 lokasi	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

2.5.11 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.5.11	Pembangunan tempat pemindahan/daur ulang sampah tingkat kelurahan (TPS 3R)	Kecamatan Kalasan	5 lokasi	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
2.5.12	Penambahan truk dan kontainer sampah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Prambanan (Klaten)</li><li>• Kecamatan Prambanan (Sleman)</li><li>• Kabupaten Magelang</li><li>• Kota Yogyakarta</li></ul>	310 unit	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta</li></ul>
2.5.13	Pembangunan TPST Kawasan	Kecamatan Depok (Sleman)	1 unit	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman</li></ul>
2.5.14	Pembangunan TPST Modalan	Kecamatan Banguntapan (Bantul)	1 unit	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li></ul>

2.6 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 159 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.6	Pengolahan Air Limbah dan Sanitasi				
2.6.1	Pengembangan sistem air limbah terpusat di KTA Yogyakarta (Kartamantul)	Kartamantul, Kabupaten Sleman	104 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
2.6.2	STBM untuk menghilangkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Kecamatan Borobudur	1.696 SR	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
2.6.3	STBM untuk menghilangkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Kecamatan Mungkid	3.852 SR	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
2.6.4	STBM untuk menghilangkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Kecamatan Mertoyudan	289 SR	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
2.6.5	STBM untuk menghilangkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Kecamatan Tempuran	764 SR	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

2.6.6 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 160 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.6.6	STBM untuk menghilangkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Kecamatan Muntilan	3.999 SR	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
2.6.7	Pengembangan jaringan lateral dan sambungan rumah air limbah di KTA Yogyakarta	Kecamatan Kotagede	12.375 SR	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
2.6.8	Pengembangan jaringan lateral dan sambungan rumah air limbah di KTA Yogyakarta	Kecamatan Kraton	6.082 SR	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
2.6.9	Pengembangan jaringan lateral dan sambungan rumah air limbah di KTA Yogyakarta	Kecamatan Danurejan	9.737 SR	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
2.6.10	Pengembangan jaringan lateral dan sambungan rumah air limbah di KTA Yogyakarta	Kecamatan Gondomanan	4.877 SR	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
2.6.11	Pengembangan jaringan lateral dan sambungan rumah air limbah di KTA Yogyakarta	Kecamatan Ngampilan	8.623 SR	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 161 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.6.12	Pengembangan jaringan lateral dan sambungan rumah air limbah di KTA Yogyakarta	Kecamatan Gedongtengen	8.824 SR	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
2.6.13	Fasilitas pengolahan lumpur (IPLT)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabupaten Magelang</li><li>• Kabupaten Sleman</li></ul>	2 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman</li></ul>
2.6.14	Pengadaan truk tinja	Kabupaten Magelang	165 unit	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang</li></ul>
2.6.15	Pengadaan truk tinja	Kota Yogyakarta	26 unit	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta</li></ul>

2.6.16 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.6.16	Pengadaan truk tinja	Kabupaten Klaten	24 unit	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten</li><li>• Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten</li></ul>
2.6.17	Pengadaan truk tinja	Kabupaten Sleman	19 unit	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman</li><li>• Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman</li></ul>
2.6.18	Peningkatan fasilitas sanitasi setempat dan penambahan sistem IPAL komunal	Kecamatan Borobudur	14.704 SR	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li></ul>
2.6.19	Peningkatan fasilitas sanitasi setempat dan penambahan sistem IPAL komunal	Kecamatan Mungkid	18.312 SR	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang</li></ul>

2.6.20 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 163 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.6.20	Peningkatan fasilitas sanitasi setempat dan penambahan sistem IPAL komunal	Kecamatan Kotagede	24.686 SR	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta</li></ul>
2.6.21	Peningkatan fasilitas sanitasi setempat dan penambahan sistem IPAL komunal	Kecamatan Kraton	10.284 SR	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta</li></ul>
2.6.22	Peningkatan fasilitas sanitasi setempat dan penambahan sistem IPAL komunal	Kecamatan Danurejan	6.321 SR	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta</li></ul>
2.6.23	Peningkatan fasilitas sanitasi setempat dan penambahan sistem IPAL komunal	Kecamatan Gondomanan	9.032 SR	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta</li></ul>
2.6.24	Peningkatan fasilitas sanitasi setempat dan penambahan sistem IPAL komunal	Kecamatan Ngampilan	3.528 SR	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta</li></ul>
2.6.25	Peningkatan fasilitas sanitasi setempat dan penambahan sistem IPAL komunal	Kecamatan Gedongtengen	5.052 SR	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta</li></ul>
2.6.26	Peningkatan fasilitas sanitasi setempat dan penambahan sistem IPAL komunal	Kecamatan Prambanan (Klaten)	10.608 SR	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten</li></ul>
2.6.27	Peningkatan fasilitas sanitasi setempat dan penambahan sistem IPAL komunal	Kecamatan Prambanan (Sleman)	11.130 SR	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman</li></ul>
2.6.28	Peningkatan fasilitas sanitasi setempat dan penambahan sistem IPAL komunal	Kecamatan Berbah	232 SR	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman</li></ul>

2.6.29 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 165 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.6.29	Peningkatan fasilitas sanitasi setempat dan penambahan sistem IPAL komunal	Kecamatan Kalasan (Tamanmartani)	127 SR	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman</li></ul>
2.6.30	Perluasan jaringan pemantauan kualitas air	Kabupaten Temanggung	5 kegiatan	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
2.6.31	Perluasan jaringan pemantauan kualitas air	Kabupaten Magelang	5 kegiatan	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
2.6.32	Perluasan jaringan pemantauan kualitas air	Kota Magelang	5 kegiatan	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
2.6.33	Perluasan jaringan pemantauan kualitas air	Kabupaten Kulon Progo	5 kegiatan	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
2.6.34	Pemantauan kualitas air sungai	Kabupaten Bantul	5 sungai	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
2.6.35	Perluasan jaringan pemantauan kualitas air	Kabupaten Gunungkidul	5 kegiatan	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul
2.6.36	Perluasan jaringan pemantauan kualitas air	Kabupaten Sleman	5 kegiatan	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

2.6.37 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.6.37	Perluasan jaringan pemantauan kualitas air	Kota Yogyakarta	5 kegiatan	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
2.6.38	Penyiapan <i>readiness criteria</i> peningkatan kapasitas IPLT Regional Sewon	Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul	1 Unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
2.6.39	Optimalisasi IPAL regional Sewon	Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul	3,8 kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
2.7	Drainase dan Pengendalian Banjir				
2.7.1	Rehabilitasi lahan kritis DAS Hulu di KTA BYP	Kabupaten Magelang (Perbukitan Menoreh)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 unit Kebun Bibit Rakyat (KBR)</li><li>• 1 unit Kebun Bibit Desa (KBD)</li></ul>	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

• Rehabilitasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Rehabilitasi DAS 512 ha</li><li>• 10 unit Pelestarian Sumber Daya Alam</li><li>• 3 unit DAM Penahan</li><li>• 9 unit <i>Gully Plug</i></li><li>• Pemeliharaan II 1 ha</li></ul>		
2.7.2	Rehabilitasi lahan kritis DAS Hulu di KTA BYP	Kabupaten Kulon Progo (Perbukitan Menoreh)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 unit KBR</li><li>• 1 unit KBD</li><li>• Rehabilitasi DAS 374 ha</li><li>• Pemeliharaan II di lingkungan Bandar</li></ul>	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
			Udara YIA 50 ha		
2.7.3	Rehabilitasi lahan kritis DAS Hulu di KTA BYP	Kabupaten Purworejo (Perbukitan Menoreh)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 unit KBR</li><li>• 2 unit KBD</li><li>• Rehabilitasi DAS 520 ha</li><li>• 3 unit DAM Penahan</li><li>• 9 unit <i>Gully Plug</i></li><li>• pemeliharaan I turus jalan 1 km</li><li>• pemeliharaan I 49 km</li></ul>	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.7.4	Rehabilitasi lahan kritis DAS di KTA BYP	Kabupaten Kulon Progo	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 unit KBR</li><li>• 1 unit KBD</li><li>• 2 unit DAM Penahan</li></ul>	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

• 6 unit . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
			• 6 unit <i>Gully Plug</i>		
2.7.5	Rehabilitasi lahan kritis DAS di KTA BYP	Kabupaten Magelang	• 5 unit KBR • 1 unit KBD • 3 unit DAM Penahan • 9 unit <i>Gully Plug</i>	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.7.6	Rehabilitasi lahan kritis DAS di KTA BYP	Kabupaten Purworejo	• 4 unit KBR • 2 unit KBD • 3 unit DAM Penahan • 9 unit <i>Gully Plug</i>	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.7.7	Penyiapan <i>readiness criteria</i> perlindungan erosi fisik (DAM penahan, DAM pengendali, rorak, terasering, dan talud) DAS Hulu di KTA BYP	Kabupaten Temanggung	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Temanggung

2.7.8 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.7.8	Penyiapan <i>readiness criteria</i> perlindungan erosi fisik (DAM penahan, DAM pengendali, rorak, terasering, dan talud) DAS Hulu di KTA BYP	Kabupaten Magelang	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang
2.7.9	Penyiapan <i>readiness criteria</i> perlindungan erosi fisik (DAM penahan, DAM pengendali, rorak, terasering, dan talud) DAS Hulu di KTA BYP	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo
2.7.10	Penyiapan <i>readiness criteria</i> perlindungan erosi fisik (DAM penahan, DAM pengendali, rorak, terasering, dan talud) DAS Hulu di KTA BYP	Kabupaten Bantul	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
2.7.11	Penyiapan <i>readiness criteria</i> perlindungan erosi fisik (DAM penahan, DAM pengendali, rorak,	Kabupaten Sleman	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman

terasering . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 171 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
	terasering, dan talud) DAS Hulu di KTA BYP				
2.7.12	Pembangunan Sumur Resapan Air Hujan (SRAH)	Kabupaten Magelang	9.600 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
2.7.13	Pembangunan SRAH	Kabupaten Kulon Progo	1.200 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo
2.7.14	Pembangunan SRAH	Kabupaten Bantul	1.800 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
2.7.15	Pembangunan SRAH	Kabupaten Gunungkidul	8.400 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul
2.7.16	Pembangunan SRAH	Kabupaten Sleman	1.200 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.7.17	Pembangunan SRAH	Kota Yogyakarta	1.200 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
2.7.18	Penyiapan konstruksi (embung) <i>readiness</i> kolam <i>criteria</i> retensi	Desa Joho, Kabupaten Klaten	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
2.7.19	Penyiapan konstruksi (embung) <i>readiness</i> kolam <i>criteria</i> retensi	Desa Pereng, Kabupaten Klaten	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
2.7.20	Penyiapan konstruksi (embung) <i>readiness</i> kolam <i>criteria</i> retensi	Desa Brajan, Kabupaten Klaten	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
2.7.21	Peningkatan drainase di KTA	Kecamatan Borobudur	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
2.7.22	Peningkatan drainase di KTA	Kecamatan Mungkid	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

2.7.23 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 173 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.7.23	Peningkatan drainase di KTA	Kecamatan Tegalrejo	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
2.7.24	Peningkatan drainase di KTA	Kecamatan Gondomanan	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
2.7.25	Peningkatan drainase di KTA	Kecamatan Umbulharjo	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
2.7.26	Peningkatan drainase di KTA	Kecamatan Mantriweron	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
2.7.27	Peningkatan drainase di KTA	Kecamatan Kotagede	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
2.7.28	Peningkatan drainase di KTA	Kawasan Kandang Menjangan	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber

Daya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
2.7.29	Peningkatan drainase di KTA	Kawasan <i>Jogja Expo Center</i> (JEC)	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
2.7.30	Peningkatan drainase di KTA	<i>Ring-road</i> Selatan	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
2.7.31	Peningkatan drainase di KTA	Kecamatan Prambanan (Klaten)	1 paket	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
2.7.32	Penyiapan sistem peringatan dini banjir bandang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabupaten Klaten</li><li>• Kabupaten Magelang</li><li>• Kabupaten Sleman</li><li>• Kabupaten Bantul</li><li>• Kota Yogyakarta</li></ul>	1 kegiatan	2024	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

2.7.33 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 175 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.7.33	Pemasangan rambu evakuasi kebencanaan dan sistem peringatan dini tsunami	Kabupaten Bantul	1 TEWS	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
2.7.34	Pemasangan rambu evakuasi kebencanaan tsunami	Kabupaten Gunungkidul	1 kegiatan	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul
3	Meningkatkan Perekonomian Lokal/Masyarakat				
3.1	Pengembangan Keterampilan				
3.1.1	Pengembangan SDM Ekonomi kreatif di Kawasan Borobudur	Provinsi Jawa Tengah	1 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.1.2	Peningkatan kapasitas SDM OPK dan cagar budaya (termasuk SDM pemerintah)	<ul style="list-style-type: none"><li>● Provinsi Jawa Tengah</li><li>● Kabupaten Magelang</li><li>● Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>● Kota Yogyakarta</li><li>● Kabupaten Sleman</li><li>● Kabupaten Bantul</li><li>● Kabupaten Klaten</li></ul>	60 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>● Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li><li>● Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah</li><li>● Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.1.3	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang HIA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provinsi Jawa Tengah</li><li>• Kabupaten Magelang</li><li>• Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Kota Yogyakarta</li><li>• Kabupaten Sleman</li><li>• Kabupaten Bantul</li><li>• Kabupaten Klaten</li></ul>	60 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li><li>• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah</li><li>• Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>
3.1.4	Terbentuknya forum komunikasi antar institusi Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provinsi Jawa Tengah</li><li>• Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>	2 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.1.5	Sertifikasi kompetensi untuk tenaga kerja industri (usaha) Pariwisata	KTA Borobudur	2.600 orang	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Badan Nasional Sertifikasi Profesi</li><li>• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah</li></ul>

• Dinas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang</li><li>• Lembaga Sertifikasi Profesi</li></ul>
3.1.6	Sertifikasi kompetensi untuk tenaga kerja industri (usaha) Pariwisata	KTA Yogyakarta	2.100 orang	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Badan Nasional Sertifikasi Profesi</li><li>• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta</li><li>• Lembaga Sertifikasi Profesi</li></ul>
3.1.7	Sertifikasi kompetensi untuk tenaga kerja industri (usaha) Pariwisata	KTA Prambanan	3.800 orang	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Badan Nasional Sertifikasi Profesi</li><li>• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah</li></ul>

• Dinas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten</li><li>• Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman</li><li>• Lembaga Sertifikasi Profesi</li></ul>
3.1.8	Akses internet tetap pita lebar	KTA Borobudur	1 kegiatan	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
3.1.9	Akses internet tetap pita lebar	Kabupaten Bantul	1 kegiatan	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
3.1.10	Pengukuran <i>Quality of Services</i> (QoS) Jaringan Telekomunikasi Seluler	KTA Borobudur	10 kegiatan	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
3.1.11	Pengukuran QoS Jaringan Telekomunikasi Seluler	KTA Yogyakarta	10 kegiatan	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika

3.1.12 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.1.12	Pengukuran QoS Jaringan Telekomunikasi Seluler	KTA Prambanan	10 kegiatan	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
3.1.13	<i>Digital Talent Scholarship (DTS)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• KTA Borobudur</li><li>• KTA Yogyakarta</li><li>• KTA Prambanan</li></ul>	100 orang	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
3.1.14	Fasilitasi adopsi teknologi digital UMKM	Daerah Istimewa Yogyakarta	1 paket	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
3.1.15	Diseminasi informasi melalui media luar ruang di lokasi strategis	KTA Borobudur	5 lokasi	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
3.1.16	Diseminasi informasi melalui media luar ruang di lokasi strategis	KTA Yogyakarta	2 lokasi	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
3.1.17	Peningkatan pendidikan informal untuk guru, dosen, dan <i>trainer</i> terkait Pariwisata, budaya, bahasa, pelestarian, dan UMKM	Daerah Istimewa Yogyakarta	25 orang	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

3.1.18 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.1.18	Peningkatan pendidikan informal untuk guru, dosen, dan <i>trainer</i> terkait Pariwisata, budaya, bahasa, pelestarian, dan UMKM	Provinsi Jawa Tengah	25 orang	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.19	Peningkatan pendidikan informal untuk guru, dosen, dan <i>trainer</i> terkait Pariwisata, budaya, bahasa, pelestarian, dan UMKM	KTA Borobudur	25 orang	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.20	Peningkatan pendidikan informal untuk guru, dosen, dan <i>trainer</i> terkait Pariwisata, budaya, bahasa, pelestarian, dan UMKM	KTA Yogyakarta	25 orang	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.21	Peningkatan pendidikan informal untuk guru, dosen, dan <i>trainer</i> terkait Pariwisata, budaya, bahasa, pelestarian, dan UMKM	KTA Prambanan	50 orang	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.22	Peningkatan pendidikan informal untuk guru, dosen, dan <i>trainer</i>	Daerah Istimewa Yogyakarta	200 orang	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

terkait . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
	terkait Pariwisata, budaya, bahasa, pelestarian, dan UMKM				
3.1.23	Peningkatan pendidikan informal untuk guru, dosen, dan <i>trainer</i> terkait Pariwisata, budaya, bahasa, pelestarian, dan UMKM	Provinsi Jawa Tengah	200 orang	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.24	Peningkatan pendidikan informal untuk guru, dosen, dan <i>trainer</i> terkait Pariwisata, budaya, bahasa, pelestarian, dan UMKM	KTA Borobudur	200 orang	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.25	Peningkatan pendidikan informal untuk guru, dosen, dan <i>trainer</i> terkait Pariwisata, budaya, bahasa, pelestarian, dan UMKM	KTA Kota Yogya	200 orang	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.26	Peningkatan pendidikan informal untuk guru, dosen, dan <i>trainer</i> terkait Pariwisata, budaya, bahasa, pelestarian, dan UMKM	KTA Prambanan	300 orang	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

3.1.27 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.1.27	Peningkatan pengetahuan dan pengalaman guru, dosen, dan <i>trainer</i> pada lembaga formal dan nonformal	Daerah Istimewa Yogyakarta	25 kegiatan	2024	Kementerian Pendidikan, Riset, dan Kebudayaan, Teknologi
3.1.28	Peningkatan pengetahuan dan pengalaman guru, dosen, dan <i>trainer</i> pada lembaga formal dan nonformal	Provinsi Jawa Tengah	25 kegiatan	2024	Kementerian Pendidikan, Riset, dan Kebudayaan, Teknologi
3.1.29	Peningkatan pengetahuan dan pengalaman guru, dosen, dan <i>trainer</i> pada lembaga formal dan nonformal	KTA Borobudur	25 kegiatan	2024	Kementerian Pendidikan, Riset, dan Kebudayaan, Teknologi
3.1.30	Peningkatan pengetahuan dan pengalaman guru, dosen, dan <i>trainer</i> pada lembaga formal dan nonformal	KTA Yogyakarta	25 kegiatan	2024	Kementerian Pendidikan, Riset, dan Kebudayaan, Teknologi
3.1.31	Peningkatan pengetahuan dan pengalaman guru, dosen, dan <i>trainer</i> pada lembaga formal dan nonformal	KTA Prambanan	50 kegiatan	2024	Kementerian Pendidikan, Riset, dan Kebudayaan, Teknologi

3.1.32 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.1.32	Penyediaan fasilitas/sarana dan prasarana lembaga pendidikan Pariwisata: Sekolah Vokasi, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Daerah Istimewa Yogyakarta	25 kegiatan	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.33	Penyediaan fasilitas/sarana prasana lembaga pendidikan Pariwisata: Sekolah Vokasi, SMK, BLK, dan LPK	Provinsi Jawa Tengah	25 kegiatan	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.34	Penyediaan fasilitas/sarana prasana lembaga pendidikan Pariwisata: Sekolah Vokasi, SMK, BLK, dan LPK	KTA Borobudur	25 kegiatan	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.35	Penyediaan fasilitas/sarana prasana lembaga pendidikan Pariwisata: Sekolah Vokasi, SMK, BLK, dan LPK	KTA Yogyakarta	25 kegiatan	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

3.1.36 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 184 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.1.36	Penyediaan fasilitas/sarana prasana lembaga pendidikan Pariwisata: Sekolah Vokasi, SMK, BLK, dan LPK	KTA Prambanan	50 kegiatan	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.37	Peningkatan akreditasi institusi pendidikan Kepariwisata: Sekolah Vokasi, SMK, BLK, dan LPK	Daerah Istimewa Yogyakarta	13 kegiatan	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.38	Peningkatan akreditasi institusi pendidikan Kepariwisata: Sekolah Vokasi, SMK, BLK, dan LPK	Provinsi Jawa Tengah	12 kegiatan	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.39	Peningkatan akreditasi institusi pendidikan Kepariwisata: Sekolah Vokasi, SMK, BLK, dan LPK	KTA Borobudur	13 kegiatan	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.40	Peningkatan akreditasi institusi pendidikan Kepariwisata: Sekolah Vokasi, SMK, BLK, dan LPK	KTA Yogyakarta	12 kegiatan	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.41	Peningkatan akreditasi institusi pendidikan Kepariwisata: Sekolah Vokasi, SMK, BLK, dan LPK	KTA Prambanan	37 kegiatan	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.1.42	Pembangunan Pusat Pelatihan Berbasis Kompetensi Terpadu (LSP)	Kabupaten Magelang	1 unit	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.43	Pelatihan bahasa asing dan <i>public speaking</i> / pengembangan kepribadian bagi para pedagang di lokasi Candi Borobudur	Candi Borobudur	2.000 orang	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.44	Peningkatan kapasitas pelaku seni pahat dalam memenuhi permintaan domestik dan internasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dusun Prumpung/ Sidoharjo</li><li>• Desa Taman Agung</li><li>• Kecamatan Muntilan</li><li>• Kabupaten Magelang</li></ul>	500 orang	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.45	Pengembangan <i>teaching factory</i> SMK	Daerah Istimewa Yogyakarta	2 lembaga	2024	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
3.1.46	Program Guru Penggerak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Provinsi Jawa Tengah</li></ul>	2.877 orang	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

3.1.47 . . .

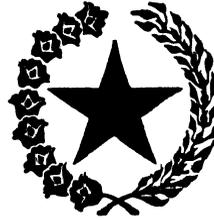


**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 186 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.1.47	Program Sekolah Penggerak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>• Provinsi Jawa Tengah</li></ul>	2.259 orang	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3.1.48	Kemitraan kelompok perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan yang ditingkatkan	Kabupaten Gunungkidul	2 kelompok	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.1.49	Kemitraan kelompok perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan yang ditingkatkan	Kabupaten Bantul	2 kelompok	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.1.50	Kemitraan kelompok perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan yang ditingkatkan	Kabupaten Kulon Progo	2 kelompok	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.1.51	Pelatihan pengelolaan sampah bernilai ekonomi	Daerah Istimewa Yogyakarta	90 orang (30 orang/tahun)	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.1.52	Pelatihan pengelolaan wisata edukasi lingkungan hidup dan kehutanan	Daerah Istimewa Yogyakarta	90 orang (30 orang/tahun)	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3.1.53 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.1.53	Pembangunan fasilitas penanganan sampah di destinasi wisata prioritas (PEN) kapasitas 2 ton/hari	Kabupaten Magelang	1 unit	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.1.54	Penyiapan tapak destinasi wisata alam prioritas yang dikembangkan di 3 (tiga) destinasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Taman Nasional Gunung Merapi</li><li>• Taman Nasional Gunung Merbabu</li><li>• Hutan Pendidikan Wanagama</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 Desain Tapak TN</li><li>• 3 FS dan DED</li><li>• 1 Masterplan Wisata Alam</li></ul>	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.1.55	Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata alam prioritas yang dikembangkan di 3 (tiga) destinasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Taman Nasional Gunung Merapi</li><li>• Taman Nasional Gunung Merbabu</li><li>• Hutan Pendidikan Wanagama</li></ul>	3 destinasi	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.1.56	Promosi dan informasi destinasi wisata alam prioritas yang dikembangkan di 3 (tiga) destinasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Taman Nasional Gunung Merapi</li><li>• Taman Nasional Gunung Merbabu</li><li>• Hutan Pendidikan Wanagama</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 <i>Online Booking</i> Taman Nasional</li><li>• 1 PNPB <i>Online Terpusat</i></li></ul>	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.1.57	Penguatan kelembagaan pengembangan kelompok masyarakat jasa wisata alam	<ul style="list-style-type: none"><li>• Taman Nasional Gunung Merapi</li><li>• Taman Nasional Gunung Merbabu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 kelompok</li><li>• 20 izin jasa wisata alam</li></ul>	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.1.58	Pelatihan masyarakat pengembangan kelompok masyarakat jasa wisata alam	<ul style="list-style-type: none"><li>• Taman Nasional Gunung Merapi</li><li>• Taman Nasional Gunung Merbabu</li></ul>	20 kelompok	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.1.59	Bantuan masyarakat pengembangan kelompok masyarakat jasa wisata alam	<ul style="list-style-type: none"><li>• Taman Nasional Gunung Merapi</li><li>• Taman Nasional Gunung Merbabu</li></ul>	20 paket bantuan	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.1.60	Pelatihan <i>upskilling</i> terapis spa	• DPN Borobudur - Yogyakarta - Prambanan	2 Kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.1.61	Pelatihan pemandu ekowisata <i>birdwatching</i> dan <i>paintball</i>	• Provinsi Jawa Tengah • Daerah Istimewa Yogyakarta	8 Orang	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.1.62	Pelatihan pondok wisata	KTA Borobudur	1 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.1.63	Pelatihan pondok wisata	KTA Yogyakarta	1 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.1.64	Pelatihan pondok wisata	KTA Prambanan	1 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.1.65	Pelatihan-bahasa asing: Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, dan lain lain	KTA Borobudur	2 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.1.66 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 190 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.1.66	Pelatihan–bahasa asing: Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, dll	KTA Yogyakarta	2 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.1.67	Pelatihan–bahasa asing: Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, dll	KTA Prambanan	2 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.1.68	Pelatihan agrowisata	KTA Borobudur	1 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.1.69	Pelatihan agrowisata	KTA Prambanan	1 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.1.70	Pelatihan pengelolaan desa wisata	Kabupaten Magelang	30 Orang	2024	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3.1.71	Bantuan pengembangan BUM Desa	Kabupaten Magelang	1 paket	2024	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

3.1.72 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 191 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.1.72	Pelatihan <i>housekeeping</i>	KTA Prambanan	1 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.1.73	Pelatihan bagi pelatih pemanduan wisata berbasis kompetensi	<ul style="list-style-type: none"><li>● Provinsi Jawa Tengah</li><li>● Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>	2 Kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.1.74	Bimbingan teknis penyusunan proposal dan presentasi bisnis ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"><li>● Provinsi Jawa Tengah</li><li>● Daerah Istimewa Yogyakarta</li></ul>	2 Kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.1.75	Peningkatan pengetahuan dan pengalaman Kepariwisataan berbasis pelestarian dan pemanfaatan peluang ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>● KTA Borobudur</li><li>● KTA Yogyakarta</li><li>● KTA Prambanan</li></ul>	3 Kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.1.76	Pendukung dan koordinasi dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pengalaman Kepariwisataan berbasis Pelestarian dan pemanfaatan peluang ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>● KTA Borobudur</li><li>● KTA Yogyakarta</li><li>● KTA Prambanan</li></ul>	3 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.1.77 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 192 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.1.77	Pelatihan <i>packaging</i>	KTA Prambanan	4 kegiatan	2024	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten
3.1.78	Sertifikasi kompetensi untuk masyarakat yang bekerja di bidang Pariwisata	KTA Borobudur	5.000 orang	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang</li></ul>
3.1.79	Sertifikasi kompetensi untuk masyarakat yang bekerja di bidang Pariwisata	KTA Yogyakarta	5.000 orang	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta</li></ul>
3.1.80	Sertifikasi kompetensi untuk masyarakat yang bekerja di bidang Pariwisata	KTA Prambanan	10.000 orang	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman</li><li>• Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Klaten</li></ul>

3.1.81 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 193 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.1.81	Sertifikasi kompetensi untuk masyarakat yang bekerja di bidang Pariwisata	Kabupaten Bantul	5.000 orang	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan,</li><li>• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</li></ul>
3.1.82	Sertifikasi kompetensi untuk penyandang disabilitas (difabel) yang bekerja di bidang Pariwisata	KTA Borobudur	250 orang	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang</li></ul>
3.1.83	Sertifikasi kompetensi untuk penyandang disabilitas (difabel) yang bekerja di bidang Pariwisata	KTA Yogyakarta	250 orang	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta</li></ul>
3.1.84	Sertifikasi Kompetensi untuk penyandang disabilitas (difabel) yang bekerja di bidang Pariwisata	KTA Prambanan	500 orang	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman</li><li>• Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Klaten</li></ul>

3.1.85 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.1.85	Sertifikasi Kompetensi untuk penyandang disabilitas (difabel) yang bekerja di bidang Pariwisata	Kabupaten Bantul	250 orang	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</li></ul>
3.2	Pengembangan Usaha Pariwisata Masyarakat dan UMKM				
3.2.1	Pembinaan dan pengembangan lembaga inkubator	Kota Yogyakarta	30 Lembaga	2024	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3.2.2	<i>Entrepreneur Hub</i>	Kota Yogyakarta	100 Orang	2024	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3.2.3	Pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas di kalangan kelompok strategis	Kabupaten Sleman	25 Orang	2024	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3.2.4	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Perkoperasian	Kota Yogyakarta	40 Orang	2024	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3.2.5	Pengembangan UMKM dan keterampilan	Kabupaten Magelang	5 kegiatan	2024	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang

3.2.6 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 195 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.2.6	Pengembangan UMKM dan keterampilan	Kota Yogyakarta	5 kegiatan	2024	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta
3.2.7	Pengembangan UMKM dan keterampilan	Kabupaten Sleman	5 kegiatan	2024	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman
3.2.8	Pengembangan UMKM dan keterampilan	Kabupaten Klaten	5 kegiatan	2024	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten
3.2.9	Peningkatan keterampilan masyarakat lokal terkait dengan bidang Pariwisata	Kabupaten Magelang	5 kegiatan	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang
3.2.10	Peningkatan keterampilan masyarakat lokal terkait dengan bidang Pariwisata	Kota Yogyakarta	5 kegiatan	2024	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
3.2.11	Peningkatan keterampilan masyarakat lokal terkait dengan bidang Pariwisata	Kabupaten Sleman	5 kegiatan	2024	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman
3.2.12	Peningkatan keterampilan masyarakat lokal terkait dengan bidang Pariwisata	Kabupaten Klaten	5 kegiatan	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

3.2.13 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.2.13	Penyediaan data analisis dari <i>digital platform</i>	KTA Prambanan	1 paket	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.2.14	Penyelenggaraan manajemen pengelolaan pondok wisata terintegrasi	Kabupaten Magelang	3 Desa	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang</li><li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li></ul>
3.3	Konsolidasi Komunitas				
3.3.1	Kampanye sadar wisata (sosialisasi sadar wisata, pelatihan sadar wisata, penyusunan proposal pengembangan desa wisata, pendampingan desa wisata)	KTA Yogyakarta	1 Desa	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.3.2	Kampanye sadar wisata (sosialisasi sadar wisata, pelatihan sadar wisata, penyusunan proposal	KTA Prambanan	1 Desa	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

pengembangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 197 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
	pengembangan desa wisata, pendampingan desa wisata)				
3.3.3	Pengembangan atraksi budaya dan atraksi malam hari	KTA Borobudur	8 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.3.4	Pendukung <i>event</i> budaya terpadu	KTA Yogyakarta	2 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.3.5	Koordinasi dan sinergitas <i>calendar of events</i>	KTA Prambanan	2 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.3.6	Pengembangan atraksi budaya dan atraksi malam hari	KTA Yogyakarta	8 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.3.7	Pengembangan atraksi budaya dan atraksi malam hari	KTA Prambanan	8 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.3.8 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 198 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.3.8	Penyelenggaraan workshop penyusunan dan sinergitas <i>calendar of events</i>	KTA Prambanan	4 paket	2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten
4	Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif untuk Investasi Swasta ke Sektor Pariwisata				
4.1	Penawaran IPRO ke Calon Investor (Promosi)				
4.1.1	<i>Regional Investment Forum</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• KTA Borobudur</li><li>• KTA Prambanan</li><li>• KTA Yogyakarta</li></ul>	1 kegiatan	2024	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4.2	Fasilitasi Penanaman Modal				
4.2.1	Fasilitasi penyelesaian permasalahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• KTA Borobudur</li><li>• KTA Prambanan</li><li>• KTA Yogyakarta</li></ul>	3 badan usaha	2024	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4.3	Peningkatan Iklim Investasi dan Penanaman Modal Sektor Pariwisata yang Kondusif di Daerah				
4.3.1	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Kabupaten Sleman	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

4.3.2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 199 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
4.3.2	Kajian kebijakan penanaman modal	Kabupaten Sleman	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman
4.3.3	Peningkatan minat investasi, kerja sama, dan penanaman modal melalui promosi investasi	Kabupaten Sleman	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman
4.3.4	Peningkatan minat investasi, kerja sama, dan penanaman modal melalui peningkatan monitoring penanaman modal	Kabupaten Sleman	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman
4.3.5	Peningkatan minat investasi melalui peningkatan monitoring penanaman modal	Kabupaten Sleman	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman
4.3.6	Peningkatan kemudahan sistem perizinan Pariwisata	Kabupaten Sleman	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

4.3.7 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 200 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
4.3.7	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kota Yogyakarta	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
4.3.8	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kota Yogyakarta	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
4.3.9	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Kota Yogyakarta	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
4.3.10	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha	Kota Yogyakarta	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
4.3.11	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kota Yogyakarta	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
4.3.12	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Kota Yogyakarta	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

4.3.13 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 201 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
4.3.13	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Kota Yogyakarta	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
4.3.14	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Kota Yogyakarta	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
4.3.15	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Kota Yogyakarta	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
4.3.16	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kota Yogyakarta	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
4.3.17	Pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik	Kota Yogyakarta	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

4.3.18 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 202 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
4.3.18	Pelaksanaan operasional pelayanan perizinan	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
4.3.19	Pelaksanaan penerbitan perizinan	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
4.3.20	Pengelolaan data perizinan	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
4.3.21	Pengelolaan teknologi informasi perizinan	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
4.3.22	Penyusunan rencana penanaman modal	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
4.3.23	Penyusunan profil investasi dan peluang investasi	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten

4.3.24 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 203 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
4.3.24	Pengelolaan pengaduan perizinan Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
4.3.25	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
4.3.26	Pengelolaan pelayanan konsultasi informasi regulasi perizinan	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
4.3.27	Sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana penanaman modal	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
4.3.28	Penyediaan informasi peluang investasi di kawasan Pariwisata	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	5 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
4.3.29	Peningkatan promosi penanaman modal	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	1 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten

4.3.30 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 204 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
4.3.30	Perencanaan, pengembangan investasi dan penanaman modal	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
4.3.31	Peningkatan layanan perizinan sektor Pariwisata (akomodasi, restoran, rumah makan, rekreasi hiburan, dan biro perjalanan)	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten</li><li>• Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Klaten</li></ul>
4.3.32	Pelaksanaan forum komunikasi dan koordinasi untuk kerjasama investasi dan penanaman modal	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
4.3.33	Peningkatan perizinan perindustrian usaha kecil dan menengah	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	5 paket	2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten</li><li>• Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten</li></ul>

4.3.34 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 205 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
4.3.34	Pelaksanaan dan penerbitan perizinan	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
4.3.35	Pengelolaan data penanaman modal dan Perizinan	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
4.3.36	Penyusunan profil investasi dan peluang investasi	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
4.3.37	Pengelolaan pengaduan perizinan Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
4.3.38	Perencanaan dan penyusunan kebijakan penanaman modal	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
4.3.39	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang

4.3.40 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 206 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
4.3.40	Pengkajian dan sosialisasi peraturan penanaman modal dan perizinan	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
4.3.41	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antarusaha besar dan usaha kecil menengah	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
4.3.42	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
4.3.43	Penyusunan kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
4.3.44	Fasilitasi pameran investasi	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang

4.3.45 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 207 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
4.3.45	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kepeminatan UMKM, investasi dan jumlah investor	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
4.3.46	Sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana penanaman modal	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
4.3.47	Menyediakan informasi peluang investasi di kawasan Pariwisata	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
4.3.48	Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang Pariwisata dengan sektor terkait	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
4.3.49	Perencanaan, pengembangan investasi, dan penanaman modal	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang

4.3.50 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 208 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
4.3.50	Peningkatan layanan perizinan sektor Pariwisata (akomodasi, restoran, rumah makan, rekreasi hiburan, dan biro perjalanan)	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
4.3.51	Pemantauan dan evaluasi realisasi perizinan sektor Pariwisata	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	6 paket	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Departemen Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum, -



Silvanna Djaman

SK No 125228 C